

ANALISA

1985 — 11

MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Medelina KUSHARWANTI
S. TJOKROWARDOJO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Tanah Abang III/27,
Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534,
356535

ANALISA

TAHUN XIV, NO. 11. NOVEMBER 1985

PENGANTAR REDAKSI	892
MAKNA PERSATUAN DAN KESATUAN INDONESIA <i>H. Anton DJAWAMAKU</i>	895
TIPE-TIPE PEMIKIRAN KEAGAMAAN <i>SUWARDI</i>	924
KELAS MENENGAH SEBAGAI KELOMPOK STRATEGIS <i>Medelina KUSHARWANTI</i>	936
KEBIJAKAN ALIH TEKNOLOGI: SUATU TINJAUAN EKONOMI <i>H. Haryo ASWICAHYONO</i>	940
KERANGKA LANDASAN HUKUM DAN PROBLEMATIK DASARNYA <i>Oct. Ovy NDOUK</i>	944
PEMUDA DAN TANTANGANNYA <i>BABARI</i>	959
PENDAYAGUNAAN WADAH REMAJA <i>BABARI</i>	969

Pengantar Redaksi

Memperkokoh persatuan dan kesatuan elemen-elemen bangsa dan negara Indonesia adalah merupakan pekerjaan yang tidak dapat diabaikan dalam usaha pembangunan. Sejarah telah membuktikan bahwa beberapa negara mengalami kegagalan dan/atau kesulitan dalam usaha pembangunannya karena kurang memberi perhatian yang sepadan terhadap hal yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa atau negaranya.

Kesatuan dan persatuan suatu bangsa dapat terancam bukan saja karena pengaruh yang datang dari luar tetapi juga sebagai akibat dari usaha pembangunan yang telah dilakukan. Usaha pembangunan yang mempengaruhi elemen-elemen bangsa dan negara secara tidak serasi dengan sendirinya akan memperlemah kesatuan dan persatuan. Dengan beranggapan bahwa dalam usaha pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia selalu ada kemungkinan kadar persatuan dan kesatuan bangsa dapat berubah, maka ANALISA terbitan bulan November ini akan menyoroti masalah tersebut dengan menurunkan tujuh buah tulisan. Tulisan-tulisan tersebut saling berkaitan walaupun temanya berbeda-beda.

Tulisan pertama dengan judul "Makna Persatuan dan Kesatuan Indonesia" oleh H. Anton DJAWAMAKU, memaparkan makna persatuan dan kesatuan secara politis kultural dan secara khusus menguraikan masalah persatuan dan kesatuan kebangsaan yang pernah dialami oleh Indonesia. Dengan uraian yang bersifat historis ini penulis ingin mengemukakan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan ditingkatkan dan untuk tujuan tersebut langkah-langkah apa yang perlu dilakukan.

Faktor agama sering mempengaruhi kesatuan dan persatuan suatu bangsa termasuk Indonesia. Oleh karenanya, tipe-tipe pemikiran keagamaan sangat perlu diketahui. Sehubungan dengan ini, tulisan kedua yang berjudul "Tipe-

tipe Pemikiran Keagamaan'' oleh SUWARDI, mengupas beberapa aliran pemikiran keagamaan yang berkembang di masyarakat beserta masalah-masalah yang timbul dari padanya. Masalah-masalah yang timbul dengan sengaja disoroti secara terinci dengan maksud untuk menemukan bentuk penghayatan keagamaan yang dapat mempercepat dan memperkuat ketunggalikaan Indonesia.

Sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam beberapa Pelita, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang satu kelompok anggota masyarakat yang biasa disebut kelas menengah. Berdasarkan beberapa penelitian perilaku kelompok masyarakat ini berbeda dengan kelompok anggota masyarakat lainnya dan perbedaan tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengetahui hal ini secara lebih mendalam beberapa hal yang berkaitan dengan kelas menengah dipaparkan oleh Medelina KUSHARWANTI dalam tulisannya yang berjudul ''Kelas Menengah Sebagai Kelompok Strategis.''

Sering dikemukakan, bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, negara-negara yang sedang berkembang dapat mempercepat proses pembangunannya. Kalau pernyataan ini diyakini oleh negara-negara berkembang secara apriori, kemungkinan negara-negara tersebut akan terperosok dalam belenggu teknologi atau bahkan dapat mengalami kegagalan dalam usaha pembangunannya. Dalam beberapa tahun yang lalu masalah pemilihan teknologi merupakan masalah yang hangat dibicarakan karena ternyata tidak semua teknologi yang maju dapat berperan mempercepat proses pembangunan negara berkembang tertentu. Di lain pihak karena teknologi baru biasanya dikuasai oleh negara-negara yang sudah maju maka negara berkembang harus membeli teknologi tersebut. Dengan kata lain, untuk dapat memanfaatkan teknologi tertentu, negara-negara yang sedang berkembang harus membayar. Masalah harga bukan masalah sederhana karena kesalahan menangani hal ini dapat menimbulkan friksi sosial yang pada gilirannya mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan ini dan untuk memperjelas masalahnya, H. Haryo ASWICAHYONO, dalam tulisannya yang berjudul ''Kebijakan Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Ekonomi'' menyoroti hal yang berkaitan dengan masalah harga dari alih teknologi.

Hari depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh mereka yang tergolong remaja dan pemuda saat ini serta hukum yang sedang dan akan diberlakukan. Dengan hukum dan peraturan hukum yang tepat, perilaku masyarakat dapat diarahkan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Dan dengan membekali generasi muda atau remaja saat ini dengan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi, niscaya sasaran pembangunan akan mudah dicapai tanpa menimbulkan gejolak

ataupun friksi-friksi di kalangan masyarakat. Karena masalah ini penting dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara maka tiga tulisan terakhir yaitu "Kerangka Landasan Hukum dan Problematik Dasarnya," oleh Ovy NDOUK; "Pemuda dan Tantangannya" serta "Pendayagunaan Wadah Remaja," keduanya oleh BABARI memaparkan masalah yang berkaitan dengan hukum serta pemuda dan remaja yang kesemuanya dianggap patut dipikirkan.

November 1985

REDAKSI

Makna Persatuan dan Kesatuan Indonesia

H. Anton DJAWAMAKU*

Secara etimologis, perkataan "persatuan" dan "kesatuan" berasal dari kata dasar "satu," sesuatu yang tidak terpisah-pisah. Persatuan dan kesatuan yang mutlak hanya ada satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di luar Tuhan, persatuan dan kesatuan menunjukkan kepada adanya kemanunggalan yang tidak mutlak sifatnya. Persatuan dan kesatuan seperti ini selalu merupakan "compositum," mengandung kemajemukan. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan ini selalu berada dalam proses. Proses persatuan dan kesatuan itu bisa semakin meluas dan mendalam. Tetapi proses itu bisa juga berupa perpecahan dari persatuan dan kesatuan yang ada.

Persatuan dan kesatuan di luar Tuhan, bisa berwujud persatuan dan kesatuan fisik-alamiah, bisa pula berupa persatuan dan kesatuan politis-kultural. Yang akan dibahas di sini adalah persatuan dan kesatuan politis-kultural, dan lebih spesifik lagi adalah persatuan dan kesatuan Kebangsaan Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, yang berasal dari masa Kebangkitan Nasional. Sebelum itu mungkin telah ada gejala persatuan dan kesatuan, namun persatuan dan kesatuan yang secara historis terjalin erat dengan konsep kebangsaan, berawal dengan tumbuhnya kesadaran perjuangan sebagai suatu bangsa.

LATAR BELAKANG SEJARAH

Latar belakang sejarah persatuan dan kesatuan Kebangsaan Indonesia tampak di dalam dua periode: periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan usaha-usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi

*Staf CSIS

mencapai cita-cita kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia menjadi kenyataan sejarah, maka periode selanjutnya ditandai dengan usaha-usaha bagaimana menyusun dan mengisi cita-cita kemerdekaan itu dalam persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Masa Sebelum Kemerdekaan

Gerakan Kebangkitan Nasional diawali dengan berdirinya suatu perserikatan pada tanggal 20 Mei 1908 yang tersusun secara modern dan diberi nama Budi Utomo.¹ Semenjak itu tumbuhlah berbagai organisasi pergerakan yang berdasarkan kesatuan etnis, yaitu gerakan-gerakan yang mendasarkan diri pada ras, keturunan, kesukuan ataupun golongan, di samping pergerakan yang terdiri dari perkumpulan campuran. Ada organisasi pergerakan pemuda, wanita, perkumpulan serikat sekerja dan yang didasarkan pada solidaritas kedaerahan. Tumbuh pula organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, ekonomi (perdagangan) dan politik.

Budi Utomo pada mulanya lebih merupakan pergerakan kultural daripada politik, untuk membentuk identitas kultural yang sama sebagai landasan perjuangan kebangsaan. Walaupun persamaan kultur itu pada awal kelahirannya masih terbatas pada masyarakat Jawa, tetapi titik tolak ini justru memacu kesadaran kebangsaan yang lebih luas dan mencakup di dalam sejarah perjuangan pergerakan rakyat di kala itu.² Pada tahun 1912 berdirilah Indische Partij, suatu organisasi politik yang pertama sekali mengembangkan cita-cita kemerdekaan tanah air dan bangsa serta menentang diskriminasi.³ Konsep kebangsaan yang dianutnya tidak mempunyai konotasi etnis, rasial maupun biologis.

Dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan ini, menggejala pula gerakan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang beraneka ragam. Pada bulan November 1918 terbentuklah "Radical Concentratie," suatu badan kerjasama antara wakil-wakil organisasi pergerakan di dalam

¹Sejak itu hampir semua aksi ke arah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia diorganisasikan secara modern. Antara lain dilakukan melalui organisasi-organisasi sebagai alat perjuangan, dengan asas dan tujuan perjuangan yang jelas serta pengurus yang tetap. Buku yang mengulas hal ini secara terinci antara lain A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1984), cetakan ke-10.

²Budi Utomo sendiri di dalam konperensinya ke-21 dari tanggal 25-27 Desember 1930 di Solo mengatakan terbuka bagi semua bangsa Indonesia. Kemudian dalam konperensi yang diadakan di Solo dalam bulan Desember 1931, Budi Utomo mengubah tujuannya dengan secara tegas mengatakan berusaha mencapai Indonesia Merdeka. *Ibid.*, hal. 49 dan 119.

³Mohammad Hatta, "Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional (di) Indonesia," dalam *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Agustus, 1976) 1, cetakan ke-2, hal. 50.

Volksraad. Tuntutannya untuk membentuk parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen, telah ditanggapi serius oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan perbaikan. Sekalipun janji perbaikan yang terkenal dengan sebutan "November Belofte" tidak pernah terwujud, namun tanggapan serius itu telah memberikan arti politis yang penting bagi persatuan dan perjuangan di antara organisasi-organisasi pergerakan.⁴ Pada tanggal 22 November 1922 berdirilah Radicale Concentratie Baru yang merupakan kerjasama di antara organisasi pergerakan yang berhaluan nasionalis, sosialis dan komunis.⁵ Kesadaran bahwa persatuan di antara organisasi-organisasi yang beraneka ragam itu merupakan alat perjuangan yang lebih efektif, telah mendorong terjadinya proses kebhinnekaan menuju ketunggalikaan demi tercapai cita-cita kemerdekaan bangsa.

Proses kebhinnekaan menuju ketunggalikaan dengan wawasan kebangsaan semakin dipacu oleh perkembangan yang terjadi di dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Pada tahun 1924 misalnya para pelajar bumi putera di Belanda mengubah nama organisasinya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan anggaran dasar yang jelas-jelas menegaskan untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Sementara itu dari perjuangan pergerakan organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia, tampaklah wawasan kebangsaan semakin menemukan perumusan yang nyata.⁶ Dalam Kongres Pemuda I di Jakarta dari tanggal 30 April - 2 Mei 1926 terbentuklah organisasi Pemuda Indonesia yang merupakan peleburan dari organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan.⁷ Dalam Kongres Pemuda II di Jakarta konsep kebangsaan menemukan perumusan yang lebih jelas dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang terkenal itu. Kongres itu memutuskan bahwa Sumpah Pemuda wajib dipakai sebagai pedoman bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia. Di samping itu juga dinyatakan keyakinan bahwa persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yakni: kemauan, sejarah, hukum adat serta pendidikan dan kepanduan.⁸

⁴Radicale Concentratie yang pertama ini adalah badan kerjasama antara wakil-wakil dari Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dan Nationaal Indische Partij (NIP), lihat A.G. Pringgodigdo (ed.), "Radicale Concentratie" dalam *Ensiklopedi Umum* (Penerbitan Jajasan Kanisius, 1973), hal. 1105. Lihat juga S. Sjahir: "Faham Persatoean di dalam Strategie dan Taktik Perdjoengan," dalam *Pikiran dan Perdjoengan* (Jakarta: Poestaka Rakjat, 1947), hal. 36-38.

⁵A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 46.

⁶*Ibid.*, hal. 49-58.

⁷Hardjito, *Risalah Gerakan Pemuda* (Jakarta: Pustaka Antara, 1952), hal. 12-13.

⁸Lihat Moh. Koesnoe, "Kongres Pemuda Tahun 1928 dan Persoalan Hukum Nasional," dalam *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga Press, 1979), cetakan ke-1, hal. 134.

Selanjutnya PNI yang tampil di atas pentas sejarah pada tanggal 4 Juli 1927, terus-menerus menggelorakan semangat persatuan atas dasar paham kebangsaan. Atas inisiatif Soekarno dengan PNI-nya, pada tanggal 17 Desember 1927 berdirilah Permupakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Keinsyafan akan mutlak perlunya persatuan guna mensukseskan perjuangan kemerdekaan, merupakan ide dasar berdirinya PPPKI. Oleh karena itu program pokoknya adalah menyatukan haluan aksi-aksi kebangsaan. Untuk menghindari perselisihan dalam PPPKI, maka soal-soal yang dianggap peka seperti non-koperasi, keagamaan, asas perhimpunan, tidak dijadikan acara pembicaraan.⁹

PPPKI sempat hidup beberapa tahun akan tetapi tidak berhasil menghimpun semua organisasi pergerakan di dalam wadahnya itu, oleh karena terjadi perbedaan paham yang sangat tajam mengenai dasar-dasar persatuan bagi semua organisasi pergerakan. Perbedaan paham ini tampak antara Ir. Soekarno selaku pimpinan PPPKI di satu pihak dengan Hatta dan Sjahrir di lain pihak yang mewakili organisasi-organisasi pergerakan di luar PPPKI. Soekarno tetap menghendaki kebudayaan asli/kebangsaan Indonesia sebagai pokok dasar persatuan yang mengikat massa rakyat. Sedangkan Hatta dan Sjahrir menghendaki sistem demokrasi Barat sebagai pokok dasar persatuan.¹⁰ Persoalan mengenai pokok dasar persatuan ini akhirnya menimbulkan perpecahan di dalam PPPKI sendiri. Di satu pihak golongan nasionalis menghendaki kebangsaan Indonesia sebagai dasar pergerakan dan persatuan, sedang di pihak lain golongan Islam menghendaki Islam sebagai asas dasar perjuangan, malahan sebagai dasar kehidupan bangsa. Akibatnya PPPKI menjadi lumpuh dari dalam.¹¹

Pada tanggal 21 Mei 1939 berdiri Gabungan Politik Indonesia (GAPI) menggantikan PPPKI. Dasar GAPI adalah hak menentukan nasib sendiri, persatuan kebangsaan, demokrasi dan kesatuan aksi. Dengan dasar ini GAPI tidak hanya berhasil mempersatukan partai-partai politik, tetapi juga

⁹A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 74-79. Lihat juga Ir. Soekarno, "Menyambut Kongres PPPKI" dalam *Dibawah Bendera Revolusi I* (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965), Cetakan ke-4, hal. 83-86.

¹⁰Mohammad Hatta, "Persatuan Yang Dicari, Per-sate-an Yang Dapat," dalam *Kumpulan Karangan*, *op. cit.*, hal. 21-44. Lihat juga S. Sjahrir, "Faham Persatoean Didalam Strategie dan Taktik Perdjoengan," dalam *Pikiran dan Perdjoengan*, *op. cit.*, hal. 21-44. Lihat juga tulisan Sjahrir, "Barisan Persatoean Baroe," hal. 51-54.

¹¹H. Agus Salim menyerang Bung Karno secara sarkastis dalam *Harian Fajar Asia*, 29 Juli 1928 bahwa semangat persatuan yang dikobar-kobarkan itu berarti berhala kepada Tanah Air, atau menghamba dan membudak kepada tanah air. Lihat Ir. Soekarno, "Ke Arah Persatuan" dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, *op. cit.*, hal. 109-114. Lihat juga H. Agus Salim: "Cinta Bangsa dan Tanah Air" dalam *Seratus Tahun Haji Agus Salim* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 346-358.

organisasi-organisasi serikat sekerja. Dalam kongres yang diadakan dalam bulan Desember 1939, dilansir tuntutan Indonesia berparlemen. Di samping itu diputuskan bahwa bendera persatuan adalah Merah Putih, lagu persatuan: Indonesia Raya dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Pada tanggal 14 September 1941, Kongres Rakyat yang merupakan perangkat tertinggi dalam organisasi GAPI diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia. Majelis ini merupakan badan perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat dan tuntutan Indonesia berparlemen. Pimpinan Majelis terdiri dari wakil-wakil dari tiga federasi, yaitu GAPI (Federasi organisasi-organisasi politik), MIAI (federasi organisasi-organisasi agama Islam) dan PVPN (federasi perkumpulan-perkumpulan serikat sekerja).¹²

Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, peranan GAPI tertelan dalam gemuruh peperangan Asia Timur Raya dan periode ini merupakan masa yang amat berat dalam sejarah bangsa Indonesia. Meskipun demikian dinamika perjuangan persatuan kebangsaan terus bergerak dalam masa pendudukan Jepang. Langkah-langkah politik yang diambil Jepang dalam menghadapi segala resiko peperangan yang dimulainya, justru semakin mematangkan dan memacu gerakan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.¹³ Oleh karena itu setelah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan atas pertanyaan Ketua Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tentang apa dasar Indonesia merdeka, masalah fundamental ini segera dapat dijawab secara meyakinkan antara lain oleh Supomo, Moh. Yamin dan Soekarno. Para anggota BPUPKI memang mengemukakan pandangan yang beraneka ragam mengenai masalah dasar tersebut. Walaupun demikian semua mereka memiliki semangat yang sama yaitu bersama-sama berusaha menemukan dasar-dasar yang dapat mempersatukan seluruh Bangsa dan Negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk itu. Terjadi lagi proses kebhinnekaan menuju ketunggalikaan yang jauh lebih kuat dari masa-masa sebelumnya.¹⁴

Dalam sidang-sidang BPUPKI diketahui ada tiga aliran pemikiran pokok (ideologi) yang mempertahankan pendiriannya masing-masing dan dalam hal-

¹²Lihat A.G. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 417-420. Lihat juga A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 145-151.

¹³Sejak bulan September 1944 Jepang menyatakan "Indonesia akan merdeka kelak kemudian hari." Janji ini sekaligus diikuti dengan persiapan ke arah kemerdekaan itu. Antara lain kemerdekaan bersuara dan propaganda tentang Indonesia Merdeka dibolehkan. Bendera Merah Putih dibolehkan berkibar di sebelah bendera Jepang. Pembentukan Dewan Sanyo yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia dari tiap Departemen sebagai persiapan untuk menjadi Dewan Menteri kelak dalam Indonesia Merdeka. Lihat Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1970), cetakan ke-2, hal. 9-10.

¹⁴Baca Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I. (Jakarta: Siguntang, 1971), cetakan ke-2, hal. 59-473.

hal tertentu menolak pandangan pihak lainnya. Pertama, Ideologi Kebangsaan tampak di dalam pandangan-pandangan yang mempertahankan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, Ideologi Barat Modern Sekular tampak dari pendapat-pendapat yang menghendaki masuknya hak-hak dasar di dalam Undang-Undang Dasar, adanya pertanggungjawaban para Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dipisahkannya urusan negara dari urusan agama. Ketiga, Ideologi Islam tampak dari pendapat yang menghendaki bahwa agama Islam menjadi dasar negara, negara mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam, bahwa Presiden harus yang beragama Islam, dan bahwa agama resmi negara adalah agama Islam.¹⁵

Oleh karena itu diusahakan kompromi-kompromi di antara ketiga golongan tersebut. Hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan aliran Barat Modern Sekular, tampak di dalam pasal-pasal yang pada hakikatnya memuat hak-hak dan kewajiban warga negara. Akan tetapi dimuatnya pasal tersebut merupakan bagian yang dirasa tidak bertentangan dengan alam pikiran kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam tercapai dalam bentuk rumusan yang termaktub di dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta." Walaupun demikian perbedaan pandangan antara ideologi kebangsaan dan ideologi Islam berlangsung lagi di dalam sidang BPUPKI yang membahas materi rancangan Undang-Undang Dasar. Akhirnya setelah dilakukan perubahan sistematik dan redaksional, rancangan Undang-Undang Dasar pun dapat diterima dengan suara bulat.¹⁶

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soekarno dan Hatta masing-masing ditunjuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua PPKI.¹⁷ Pada tanggal 9 Agustus 1945 kedua pemimpin itu beserta Radjiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat di Vietnam untuk menemui Marsal Terautji, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu Marsal Terautji menjelaskan bahwa Pemerintah Jepang di Tokyo telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan itu diserahkan kepada PPKI.¹⁸ Ternyata perkembangan kea-

¹⁵A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985), cetakan ke-1, hal. 47-48.

¹⁶*Ibid.*, hal. 48-51. Untuk uraian yang lebih terinci lihat Moh. Yamin, *op. cit.*, hal. 153-160; 371-375; 382-396. Bandingkan juga dengan J.H.A. Logemann, *Keterangan-keterangan Baru tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar Indonesia 1945* (Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1982), hal. 4-11.

¹⁷Sartono Kartodirdjo et al., *Sejarah Nasional Indonesia*, VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 22.

¹⁸Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 20-21.

daan berlangsung demikian cepat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Pemerintah Jepang memaklumkan penyerahannya kepada Sekutu.¹⁹ Dengan begitu secara de facto maka berakhirlah pendudukan militer Jepang di Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Kebangsaan

Penyerahan Jepang kepada Sekutu yang dimaklumkan pada tanggal 14 Agustus 1945, berarti sejak saat itu secara de facto Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Akan tetapi di lain pihak Sekutu pun belum menjejakkan kakinya di negeri ini. Para pemimpin pergerakan termasuk para tokoh Pemuda pada umumnya berpikir bagaimana memanfaatkan momentum sejarah yang sangat singkat ini sebaik-baiknya untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan Negara RI. Dengan demikian Sekutu yang akan menginjakkan kaki di bumi Indonesia akan berhadapan langsung dengan seluruh rakyat dari negara yang baru merdeka ini.²⁰

Dalam situasi yang sangat genting itu terjadilah ketegangan yang memuncak antara para pemimpin pemuda di satu pihak dengan Soekarno dan Hatta di lain pihak, mengenai cara penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 atas nama seluruh bangsa Indonesia, bukan atas nama PPKI yang dibentuk oleh Jepang, oleh karena kemerdekaan Indonesia bukanlah buatan Jepang. Akan tetapi Soekarno-Hatta tetap berkeras bahwa pernyataan kemerdekaan harus ditetapkan oleh PPKI, karena badan itu dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Mohammad Hatta menegaskan bahwa dengan ikutnya PPKI tercapailah simbol persatuan nasional. Rasa persatuan ke dalam itu lebih penting daripada pertimbangan yuridis dari luar, apakah PPKI diangkat oleh Jepang atau tidak. Rasa persatuan Indonesia itu sangat penting dalam penyelenggaraan Revolusi Nasional, terutama untuk menghadapi Sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan Belanda ke Indonesia, bukan untuk menghadapi Jepang yang sudah kalah perang.²¹

Akibat ketegangan tersebut pada tanggal 16 Agustus pagi hari, Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok, tetapi pada sore harinya dikembalikan ke Jakarta. Pada malam hari itu Soekarno-Hatta mengumpulkan para anggota PPKI guna membahas teks proklamasi kemerdekaan. Dalam pembahasan itu hadir pula para pemimpin pemuda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.²² Dengan proklamasi ke-

¹⁹A.G. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 993.

²⁰Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 22-26.

²¹*Ibid.*, hal. 11, 28-37.

²²*Ibid.*, hal. 38-65.

merdekaan yang dinyatakan oleh Soekarno-Hatta itu, maka terbentuklah Negara Kesatuan Bangsa Indonesia. Sedang penyusunan Negara Kesatuan RI dilakukan dalam rapat PPKI yang diperluas keanggotaannya pada tanggal 18 Agustus 1945.²³

Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 terjadi perkembangan penting yang berkenaan dengan masalah dasar negara RI. Seorang opsir kaigun (angkatan laut) menyampaikan keberatan sangat dari masyarakat Indonesia bagian Timur, terhadap bagian kalimat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan sjar'i'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Hal ini dianggap bersifat diskriminatif dan apabila kalimat itu tetap dipertahankan, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.²⁴ Menghadapi perkembangan yang sangat serius ini, sebelum sidang PPKI Bung Hatta telah berusaha mencari kesepakatan mengenai soal itu dengan anggota-anggota PPKI aliran ideologi Islam dan berhasil. Mereka ini adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan.²⁵

Selanjutnya mengawali sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Wakil Ketua Moh. Hatta menyampaikan keterangan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar, sebagaimana telah disetujui oleh BPUPKI mengalami perubahan, berupa dihilangkannya kata-kata: "... dengan kewajiban menjalankan sjar'i'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Atas dasar itu perubahan-perubahan terjadi pula pada beberapa bagian dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 29 ayat (1) diubah menjadi: "Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dan pasal 6 ayat (1) menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli." Kata-kata: "... yang beragama Islam," dicoret.²⁶

Menurut Moh. Hatta, perubahan yang dilakukan itu setelah mendapat persetujuan berbagai golongan dan dengan pertimbangan bahwa dalam suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa sebaiknya tidak ditempatkan suatu hal yang hanya mengenai sebagian rakyat Indonesia, sekalipun bagian yang tersebar. Pencoretan yang dilakukan adalah untuk menjaga *persatuan bangsa* dan *keutuhan seluruh* wilayah Indonesia.²⁷ Di dalam sidang Bung Hatta mengatakan:

²³*Ibid.*, hal. 70-71.

²⁴Dari persoalan itu kiranya menjadi jelas bahwa agama tidak bisa menjadi faktor integrasi bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini. Sebuah tesis yang menguraikan bahwa agama bukan hanya memainkan peranan bagi terwujudnya integrasi, tetapi juga memainkan peranan pemecah-belah dalam masyarakat, ditulis oleh Clifford Geertz: *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (terjemahan Aswab Mahasin), Bandung: Pustaka Jaya, 1981.

²⁵Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 66-70.

²⁶Moh. Yamin, *op. cit.*, hal. 401-402.

²⁷Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 67.

"Oleh karena hasrat kita semua ialah menjatakan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya dalam masa jang genting ini kita mewujudkan persatuan jang bulat, maka pasal-pasal jang bertentangan dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar. ... Inilah perubahan jang maha penting menjatukan segala bangsa."²⁸

Selanjutnya masih ada perubahan yang hanya bersifat penegasan. Setelah disetujui semua anggota, Pembukaan itu lalu disahkan.

Selanjutnya PPKI membahas materi rancangan Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan pembahasan rancangan Pembukaan yang dilakukan secara tuntas, pembicaraan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar ini tampaknya sekedar memenuhi kelengkapan konstitusional dari Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini tampak dari penegasan Ketua PPKI, Ir. Soekarno:

"... bahwa Undang-Undang Dasar jang buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara: ini Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana jang lebih tenteram, kita akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat jang dapat membuat Undang-Undang Dasar jang lebih lengkap dan lebih sempurna."²⁹

Akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar itu disahkan setelah mendapat persetujuan para anggota PPKI.

Dengan demikian dilihat dari sejarah terjadinya UUD 1945, perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 37 UUD 1945, hanya boleh dilakukan terhadap Batang Tubuh. Sedangkan pembentukan Pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya terpisah dari pembentukan Batang Tubuhnya, sekalipun Batang Tubuh UUD 1945 itu merupakan penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Menurut isinya, Pembukaan Undang-Undang Dasar memuat dasar dan tujuan pembentukan Negara Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar memuat *asas kerohanian Negara: Pancasila*, *asas politik negara: Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan tujuan negara*.³⁰ Jadi Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah jiwa dari Proklamasi Negara Kesatuan Kebangsaan yang dimaklumkan pada tanggal 17 Agustus 1945.³¹ Oleh karena itu perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar berarti pembubaran Negara Proklamasi.

²⁸Mohamad Yamin, *op. cit.*, hal. 401-402.

²⁹*Ibid.*, hal. 410.

³⁰Notonagoro, *Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pantjasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia* (Yogya: Universitas Gadjah Mada: 1957), hal. 12-17.

³¹Mohammad Hatta, "Djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945," *Mimbar Indonesia*, No. 37, Tahun 1959.

Betapapun kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diuraikan di atas, dengan disahkannya UUD itu pada tanggal 18 Agustus 1945 berarti Negara Proklamasi telah memiliki Konstitusi Negara. Konstitusi ini diundangkan di dalam Berita Negara RI dan terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya.³² Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila, ideologi Negara yang mengandung cita-cita kenegaraan dan cita-cita hukum, selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Penjelasan merupakan uraian ideologi kebangsaan mengenai Konstitusi Negara RI. Undang-Undang Dasar dan Penjelasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan konstitusi tersebut.

Pancasila yang diterima menjadi ideologi negara adalah suatu hasil dari musyawarah yang telah dilakukan secara panjang lebar sampai akhirnya diterima oleh semua pihak sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dengan demikian dasar negara RI ini adalah suatu konsensus yang dipegang teguh untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketegangan dan konflik sosial, dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan, akan selalu terwujudlah persatuan kesatuan kebangsaan. Dalam keadaan demikian, Pancasila berfungsi mempersatukan berbagai golongan dan aliran pemikiran yang ada di bumi Indonesia.³³ Dalam pengertian ini, Pancasila berfungsi sebagai dinamik inti bagi segala golongan dan lapisan masyarakat Indonesia.

Konsensus itu dicapai tidak hanya karena semua pihak secara mendalam menyadari *perlunya persatuan*, tetapi juga karena Pancasila memuat unsur-unsur yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila dapat diterima oleh semua pihak karena memuat *unsur-unsur bersama*, sehingga masing-masing dapat melihatnya sebagai miliknya, sebagai bagian penting dari pandangan hidupnya.³⁴ Di samping itu Pancasila adalah suatu sintesa antara dasar-dasar kenegaraan yang telah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah dan apa yang baik dan berguna dari tradisi hidup kebangsaan Indonesia untuk menyusun suatu tertib negara modern.³⁵

Dengan demikian Pancasila bukan hanya sebagai wadah, sekaligus juga isi. Kedua hal ini hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Dari sudut isi, Pancasila

³²Lihat *Berita Negara RI No. 7 Tahun 1946*. Pembukaan dan Batang Tubuh dimuat sebagai Lampiran I, sedangkan Penjelasannya dimuat sebagai Lampiran II dari Berita RI tersebut.

³³Rahmat Subagya, *Pantja Sila Dasar Negara Indonesia* (Yogya: Basis, 1955), hal. 33-34.

³⁴Kirdi Dipoyudo, *Pancasila Arti dan Pelaksanaannya* (Jakarta: CSIS, 1984), cetakan ke-2, hal. 31.

³⁵Rahmat Subagya, *op. cit.*, hal. 40.

tidak sekedar nama dan rumus mengenai dasar negara, sumber hukum dan ideologi. Akan tetapi Pancasila adalah *satu kesatuan ideologi negara* yang memuat pula ajaran-ajaran mengenai negara, hukum dan mengenai manusia dan masyarakat.³⁶ Dalam pengertian sebagai satu kesatuan ideologi ini, Pancasila menjadi wadah, menjadi kerangka acuan bagi seluruh rakyat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi Pancasila mempersatukan pelbagai golongan masyarakat bangsa Indonesia, mempersatukan pelbagai kebhinnekaan yang ada.

Dari perkembangan mengenai sejarah pemikiran tentang dasar negara itu, di dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah terjadi perubahan yang fundamental sifatnya. Usul-usul yang mencerminkan pemikiran aliran (ideologi) Islam, baik di dalam Pembukaan maupun di Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang dirancang oleh BPUPKI dihapuskan (tidak dipakai). Dengan ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 ini maka konsep kebangsaan menemukan formulasinya secara jelas. Konsep kebangsaan itu nampak jelas di dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menyatakan: "Kami *bangsa Indonesia* dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" Konsep kebangsaan juga tersingkap di dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping terungkap lebih lanjut di dalam Penjelasan UUD 1945, terutama di dalam Bagian Umumnya.

Jadi Konstitusi Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah konstitusi yang didukung oleh konsep kebangsaan secara penuh. Oleh karena itu konsep kebangsaan menjadi acuan bangsa Indonesia seluruhnya. Dengan demikian dapatlah ditarik benang merah antara Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan UUD 1945. Keseluruhannya itu merupakan perwujudan dari konsep kebangsaan yang otentik, yang murni.

Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Negara RI diproklamasikan dan Konstitusi Negara disahkan, ada dua permasalahan pokok yang harus dihadapi oleh Bangsa dan Negara. Pertama, masalah mempertahankan kemerdekaan Negara Proklamasi dan kedua, bagaimana mengisi cita-cita kemerdekaan itu. Pada hal pertama ditandai dengan usaha-usaha untuk menghadapi Sekutu dengan Belanda bonekanya dan kompleksitas permasalahan yang timbul dalam periode itu. Pada hal yang kedua ditandai dengan bermacam-macam usaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia berada dalam fase "mencari-cari" bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan dapat dibagi dalam beberapa periodisasi.

³⁶A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 317.

Usaha Mempertahankan Negara Proklamasi (1945-1950)

Dalam bulan November 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat sebagai langkah-langkah politik agar dapat dimulainya perundingan dengan Belanda. Dalam maklumat itu Pemerintah menghendaki: (1) Sekutu dan Belanda mengakui Negara dan Pemerintah RI; (2) hutang-hutang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II ditanggung oleh Pemerintah RI; (3) berdirinya partai-partai politik sebagai sarana perjuangan. Selanjutnya sebagai realisasi maklumat itu, Kabinet Presidensiil diganti dengan Kabinet Parleментар dan Sjahrir menjadi Perdana Menteri.³⁷ Menanggapi perkembangan ini, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya tanggal 25-27 November 1945 membenarkan kebijaksanaan Pemerintah tersebut dan menyatakan sebagai hal yang "perlu dalam keadaan sekarang."³⁸

Perundingan dengan Belanda memang segera dapat dilakukan di bawah pimpinan PM Sjahrir. Akan tetapi kebijaksanaan pemerintah yang mendorong dimulainya perundingan itu, ternyata membawa dampak yang sangat jauh ke dalam seluruh segi kehidupan Bangsa dan Negara. Pembentukan partai-partai sekalipun dengan restriksi untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, tetapi tidak mengacu kepada ideologi negara Pancasila. Dilihat dari sumber ideologi kepartaian pada waktu itu, ada partai-partai yang berdasarkan ideologi keagamaan, ada yang berdasarkan pada ideologi Barat Modern Sekular dan ada yang berdasarkan ideologi persatuan dan kebangsaan.³⁹ Sementara itu perubahan dari sistem Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parleментар pada dasarnya merupakan penyimpangan konstitusional, oleh karena Konstitusi UUD 1945 menganut sistem Kabinet Presidensiil dalam penyelenggaraan negara.

Akibatnya praktek kehidupan politik lebih diwarnai oleh persaingan di antara partai-partai untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya dalam pemerintahan negara, sambil tetap mengacu kepada ideologi golongannya.

³⁷Sartono Kartodirdjo et al., *op. cit.*, hal. 34. Lebih jauh mengenai pembentukan partai-partai lihat Maklumat Pemerintah 3 November 1945 dalam Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1977), hal. 46.

³⁸*Ibid.*, hal. 54. Pembentukan partai-partai dan sistem Kabinet Parleментар, di samping karena tuntutan keadaan pada saat itu, adalah juga sesuai dengan pemikiran Sjahrir sendiri yang menganut paham Sosialisme Demokrat. Paham ini cukup berpengaruh di Eropa Barat antara lain berwujud dalam sistem Demokrasi Parleментар. Pemikiran Sjahrir tergolong ke dalam aliran Barat Modern Sekular.

³⁹Yang berdasarkan ideologi keagamaan adalah Masyumi, Parkindo, Partai Katolik; yang berdasarkan ideologi Barat Modern Sekular adalah PKI, PBI (Partai Buruh Indonesia), Partai Rakyat Jelata, PSI dan PRS (Partai Rakyat Sosialis); yang berdasarkan pada ideologi persatuan dan kebangsaan adalah Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia) dan PNI.

masing-masing. Penerapan sistem parlementer telah menyebabkan instabilitas pemerintahan secara berkepanjangan. Kabinet silih berganti dalam waktu yang relatif singkat dan rata-rata umur tiap Kabinet tidak lebih dari satu tahun.⁴⁰ Perkembangan ini tidak hanya meniadakan semangat kekeluargaan, semangat integratif yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, malah semakin merangsang perpecahan di dalam kehidupan bangsa dan negara. Di samping itu perundingan dengan Belanda menjadi berlarut-larut.

Sementara itu muncul pergolakan rakyat di beberapa daerah. Rupanya kemerdekaan yang baru didapat sering menghilangkan pertimbangan bahwa kemerdekaan itu ada batasnya.⁴¹ Antara bulan Desember 1945 dan Februari 1946 perang saudara berkecamuk di Aceh antara golongan ulama dan kaum adat. Di Sumatera Utara terjadi pergolakan rakyat terhadap raja-raja dan banyak keluarga raja yang terbunuh.⁴² Sementara perundingan dengan Belanda masih berlarut-larut, Negara Kesatuan RI dirobek-robek oleh Belanda menjadi negara-negara bagian dan dilanjutkan dengan agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Posisi RI yang sudah sangat lemah ini semakin dikoyak-koyak oleh pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Begitu pemberontakan ini berhasil ditumpas, Belanda melancarkan agresi militer II pada tahun 1948-1949.⁴³ Ketika agresi militer ini belum berakhir, pada tahun 1949 terjadi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwirjo yang hendak mendirikan Negara Islam.⁴⁴

Agresi militer Belanda itu mendapat kecaman dunia internasional dan Belanda ditekan untuk melakukan perundingan dengan RI. Setelah melewati beberapa konperensi pendahuluan, pada tanggal 23 Agustus 1949 berlangsung Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sementara berlangsung KMB terjadi pendekatan-pendekatan antara wakil RI dan wakil-wakil negara bagian, mempersiapkan naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 14 Desember 1949 dalam suatu "pertemuan untuk permusyawaratan federal," naskah konstitusi itu disetujui dan ditandatangani. Secara konstitusional berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Dalam Mukadimah Konstitusi RIS Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, sekalipun dengan perumusan yang berbeda dari Pembukaan UUD 1945, tetapi bentuk negara

⁴⁰Antara bulan Agustus 1945 hingga tahun 1950 telah berlangsung enam Kabinet yang silih berganti. Yaitu Kabinet Presidensial I, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II, Kabinet Sjahrir III, Kabinet Amir Sjarifuddin dan Kabinet Hatta.

⁴¹Pernyataan ini dikemukakan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya pada tanggal 7 Februari 1946 di Solo. Lihat Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 11.

⁴²G. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (New York, 1961), hal. 163. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 38-39.

⁴³*Ibid.*, hal. 47-62.

⁴⁴Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 231-233.

berubah menjadi Republik Federal. Pada tanggal 27 Desember 1948 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, kecuali Irian Jaya.⁴⁵

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pengakuan kedaulatan RI ternyata segera diikuti dengan gerakan menuju negara kesatuan, tetapi bersamaan dengan itu di beberapa daerah terjadi gerakan separatis yang segera dihadapi oleh satuan-satuan ABRI secara tegas.⁴⁶ Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan lahirlah Negara Kesatuan RI dengan Undang-Undang Dasarnya yang dikenal sebagai UUD Sementara 1950.⁴⁷ Akan tetapi UUDS 1950 ternyata bersifat dualistis. Di dalam Pembukaan tetap dimuat ideologi kebangsaan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan. Sedangkan di dalam Batang Tubuh UUD itu dicantumkan sistem parlementer dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak-hak dasar manusia, yang merupakan pengejawantahan dari ideologi Barat Modern Sekular. Dengan UUD yang bersifat dualistis bisa dibayangkan bahwa Negara Kesatuan RI senantiasa terancam perpecahan dari dalam tubuh bangsanya sendiri.

Pada tahun 1950 terjadi pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa gerakannya adalah bagian dari DI/TII Kartosuwirjo. Pada tahun 1951 Kahar Muzakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwirjo. Gerakan DI/TII juga terjadi di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Sementara itu di daerah Kebumen terjadi pula pemberontakan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdurachman. Pada bulan Desember 1951, Batalyon 426 di daerah Kudus dan Magelang menggabungkan diri dengan DI/TII. Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan "Proklamasi" Daud Beureuh bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah Imam Kartosuwirjo, pada tanggal 20 September 1953.⁴⁸

⁴⁵*Ibid.*, hal. 236-237; 243; 245; 247; 250-251; Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 62-72. Masalah Irian Barat akhirnya diselesaikan melalui Penentuan Pendapat Rakyat pada tanggal 14 Juni - 2 Agustus 1969 yang hasilnya seluruh Irian Barat tetap bergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁶Di antaranya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950, petualangan Andi Aziz di Makasar 5 April 1950 dan pembentukan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Lihat Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 260-263; 270-276.

⁴⁷Masa beriakunya Konstitusi RIS berlangsung dari tanggal 14 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 adalah masa yang amat singkat. Oleh karena itu dalam ulasan ini tidak dibuat sebagai suatu periode sendiri sebagaimana lazimnya.

⁴⁸Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal 82-85; Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 289; 294-295; 298-301; 311-313.

Gejala separatis yang bermotivasi kedaerahan telah tampak pada tahun-tahun awal periode ini, di antaranya Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda Federal di Makasar.⁴⁹ Perpecahan semakin gawat ketika unsur-unsur angkatan perang mulai melibatkan diri. Pada tanggal 20 Desember 1956 Letkol Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng dan mengambil alih pemerintahan di Sumatera Tengah. Pada waktu yang hampir bersamaan terbentuklah Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara, dengan maksud yang sama pula. Pokok pangkal pertentangan antara pusat dan daerah adalah masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang kian meruncing. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memaklumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dua hari kemudian Dewan Manguni menyatakan putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan yang terakhir ini dikenal dengan nama Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).⁵⁰

Di samping gerakan separatis baik yang bermotivasi keagamaan dan kedaerahan, juga muncul dan berkembang gerakan-gerakan rasialis. Salah satu sebab pokok timbulnya gerakan rasialis adalah ketimpangan struktur ekonomi warisan kolonial. Dalam periode ini sebagian pengusaha Belanda masih aktif di bidang keuangan, perbankan dan perkebunan besar. Dalam bidang perdagangan pada umumnya dikuasai oleh orang Cina, demikian juga orang-orang Arab walaupun tidak begitu menonjol seperti orang-orang Cina. Pemerintah berusaha mengatasi ketimpangan struktur ekonomi ini antara lain dengan menurunkan program Benteng pada bulan April 1950, tetapi mengalami kegagalan karena ketidakstabilan politik waktu itu. Gerakan anti Cina, semakin meluas terutama karena kewarganegaraan rangkap yang mereka miliki.⁵¹ PP 10/1959 yang melarang perdagangan eceran yang bersifat asing di luar ibukota kabupaten dan karesidenan,⁵² ternyata menimbulkan exodus besar-besaran orang-orang keturunan Cina itu dari wilayah RI. Nasionalisasi

⁴⁹Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 88.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 97-98; Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 340-341; 361-369.

⁵¹Masalah dwi-kewarganegaraan orang-orang keturunan Cina sebenarnya telah ada sejak jaman kolonial. Usaha pemerintah RI pada tahun 1955 untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dikenal dengan Perjanjian Soenario-Chou, secara tidak langsung semakin memasyarakatkan adanya dwi-kewarganegaraan orang-orang keturunan Cina, sehingga semakin meningkatnya sentimen rasial terhadap mereka. Lihat J.A.C. Mackie dan Charles A. Coppel, "Suatu survei Awal Masalah Cina di Indonesia" dalam B.P. Paulus (penyusun), *Masalah Cina, Hasil Penelitian Ilmiah di Beberapa Negara Asia dan Australia* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1976), hal. 18-22. Khusus mengenai Perjanjian Soenario-Chou, lihat UU No. 2 Tahun 1958, LN Tahun 1958 No. 5.

⁵²Departemen Pertahanan Keamanan, "Peraturan Presiden RI No. 10/1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang bersifat Asing di luar Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Keresidenan," dalam *Himpunan Peraturan Kebijaksanaan Masalah Cina* (Jakarta, 1980), hal. 206-209.

perusahaan-perusahaan Belanda akibat sengketa Irian Barat, juga semakin meningkatkan gerakan rasialis. Bersamaam dengan itu juga terjadi gerakan anti Arab di Surakarta dan sekitarnya.

Apabila dalam periode sebelumnya sistem parlementer telah menimbulkan instabilitas pemerintahan, hal yang sama juga terjadi dalam periode Demokrasi Liberal ini. Rata-rata umur tiap Kabinet tidak lebih dari satu setengah tahun.⁵³ Di samping itu suasana umum juga diwarnai dengan terjadinya proses perbedaan pandangan dan perpecahan. Misalnya perpecahan di dalam Masyumi dengan keluarnya NU dari partai politik itu. Perbedaan pendapat juga terjadi antara pemerintah dan satuan-satuan ABRI, hal mana terungkap dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa 27 Juni 1955 dan Peristiwa 14 Desember 1955.⁵⁴ Suasana pertentangan dan perpecahan itu dipertajam dengan adanya persiapan-persiapan Pemilu 1955 dan dilanjutkan terus dalam DPR dan Konstituante. Peristiwa yang dirasa sebagai puncak perbedaan pendapat dan perpecahan adalah keputusan Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada tanggal 1 Desember 1956.⁵⁵

Konflik ideologi di antara partai-partai politik yang terus meluas dan menajam dalam masyarakat, menemukan ungkapannya secara eksplisit dan sistematis pada saat Konstituante mengadakan pembahasan mengenai dasar negara. Meskipun aliran ideologi begitu banyak di dalam sidang Konstituante, namun dalam perkembangannya tampak adanya tiga aliran utama. Aliran pertama menghendaki sosial ekonomi sebagai dasar negara, dan menolak Pancasila ataupun Islam. Aliran kedua, menghendaki agama Islam menjadi dasar negara, dan menolak Pancasila serta sosial ekonomi sebagai dasar negara. Aliran ketiga, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan menolak sosial ekonomi dan agama Islam untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Perbedaan pandangan yang bersifat tripolar ini, di dalam perkembangannya berubah menjadi dichotomi bipolar antara pandangan yang menghendaki agama Islam sebagai dasar negara, dengan pandangan yang menghendaki Pancasila tetap menjadi dasar negara Republik Indonesia.⁵⁶

Untuk mengatasi perpecahan-perpecahan lebih lanjut, tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno menjelaskan apa yang dikenal sebagai Konsepsi

⁵³Dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 telah berlangsung Tujuh Kabinet yang memerintah yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Soekiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali-Wongso, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Djuanda.

⁵⁴Lihat Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 305-308; 320-322; 331.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 339.

⁵⁶A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 100-157.

Presiden. Di dalam konsepsi itu terkandung kritik terhadap sistem demokrasi Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan jiwa Proklamasi 1945, demikian pula terhadap sistem kepartaian yang telah berkembang di Indonesia.⁵⁷ Dalam berbagai kesempatan Presiden Soekarno dan Pemerintah menganjurkan kepada Konstituante untuk kembali kepada UUD 1945 yang merupakan jaminan hakiki bagi keselamatan dan kelangsungan Bangsa dan Negara Kesatuan RI.⁵⁸ Dengan adanya usul itu, perdebatan dalam Konstituante berkembang menjadi menerima atau tidak usul pemerintah, dan keinginan keras pihak Islam untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai "Staats fundamentalnorm" dari Negara Proklamasi. Jalan keluar yang ditempuh dengan melakukan pemungutan suara dalam Konstituante ternyata Konstituante pun tidak berhasil untuk menentukan pilihan itu.⁵⁹

Kenyataan ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno sampai pada kesimpulan bahwa telah timbul "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan Negara, Nusa dan Bangsa." Atas usul PNI yang didukung oleh Angkatan Darat, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden.⁶⁰ Isi pokok Dekrit Presiden ini ialah pembubaran Konstituante, menyatakan berlaku kembali UUD 1945, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan DPA Sementara. Perlu dicatat bahwa dalam konsiderans Dekrit itu, Presiden Soekarno menyatakan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.⁶¹ Dengan adanya Dekrit ini, maka secara yuridis-formal berakhirlah perdebatan mengenai dasar negara dan sifat sementara dari UUD 1945. Walaupun demikian gelombang perbedaan pendapat ternyata berkembang terus dan mewarnai periode selanjutnya.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Tindakan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, secara yuridis merupakan hak Kepala Negara untuk menyelamatkan Negara dalam

⁵⁷Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 344-385.

⁵⁸Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957 Presiden Soekarno menyatakan bahwa sistem politik dan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional telah menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa.

⁵⁹A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 168.

⁶⁰Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 103-104.

⁶¹*Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75 tahun 1959*: "Keputusan Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.

keadaan bahaya, sekalipun tindakan itu bertentangan dengan Konstitusi dan UUDS 1950. Secara praktis, tindakan Presiden yang menyimpang dari konstitusi adalah akibat dari adanya krisis demokrasi. Menurut Hatta, penerapan demokrasi yang tidak mengenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan oleh diktatur. Ini adalah hukum besi dari sejarah dunia. Demokrasi dapat berjalan baik, apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Inilah yang kurang pada pemimpin-pemimpin partai politik kita.⁶²

Walaupun tindakan Presiden pada saat itu dengan Dekrit kembali kepada UUD 1945 dapat dibenarkan, tetapi isi Dekrit 5 Juli 1959 itu masih merupakan kompromi ideologis. Oleh karena dalam Dekrit itu Presiden Soekarno menyatakan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Pernyataan demikian tidak dapat dipertahankan sebab persoalan Piagam Jakarta telah selesai dengan ditetapkan dan disahkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Kompromi ideologis ini mungkin dapat dipahami atas dasar perkembangan situasi pada waktu itu. Dalam sidang-sidang konstituante maupun di luar sidang itu, golongan yang mengajukan agama Islam menjadi dasar negara berusaha keras mewujudkan tujuannya itu.⁶³ Pertentangan ideologis lalu berkembang antara golongan yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan usul pemerintah di satu pihak, dan golongan yang mengajukan agama Islam sebagai dasar negara di pihak lain.

Dengan kompromi ideologis ini pada hakikatnya berarti Presiden Soekarno mengakui dan membolehkan perjuangan golongan Islam untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, hanya saja situasi sekarang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.⁶⁴ Dengan demikian Dekrit 5 Juli 1959 tidak menyelesaikan pertikaian ideologis secara tuntas. Meskipun begitu partai-partai dengan suara mayoritas di DPR mendukung tindakan Presiden Soekarno. Golongan minoritas menganggap bahwa perbuatan Presiden itu adalah tindakan perkosaan demokrasi, tetapi menyesuaikan dirinya terhadap kenyataan yang baru itu. Dengan dinyatakannya Dekrit itu terbukalah jalan bagi Presiden Soekarno untuk merealisasikan konsepsinya.

⁶²Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Pustaka Antara; 1966), hal. 9.

⁶³Sementara pertentangan ideologis dalam sidang Konstituante semakin memuncak, Konperensi Organisasi Islam di Bandung pada tanggal 21 Mei 1959 mendukung sepenuhnya perjuangan golongan Islam, khususnya untuk memberi status hukum kepada Piagam Jakarta sebagai Konstitusi Proklamasi. Lihat A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 168.

⁶⁴Bandingkan dengan uraian Bung Karno mengenai dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Moh. Yamin, *op. cit.*, hal. 74-75.

Dengan berlaku kembali UUD 1945, Presiden Soekarno dengan sendirinya menjadi Kepala Pemerintahan dan Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada Parlemen. Pada tanggal 22 Juni 1959 ia mengangkat anggota-anggota MPRS yang terdiri dari wakil-wakil politik dan wakil-wakil golongan fungsional (termasuk Angkatan Bersenjata). Kemudian Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 karena pertentangan mengenai masalah anggaran dan membentuk DPR-GR yang anggotanya mempunyai pola yang sama dengan MPRS. Sistem kepartaian juga ditetapkan dengan syarat antara lain harus menerima dan membela Konstitusi dan Pancasila. Di samping itu juga dibentuk perangkat lainnya, termasuk Front Nasional sebagai wadah kesatuan dari segala kekuatan bangsa. Pada akhir tahun 1959 Presiden Soekarno telah meletakkan perangkat-perangkat kenegaraan dan politik.⁶⁵ Di samping itu ia juga memberikan perangkat ideologis berupa Manipol-USDEK dan Nasakom dengan revolusi menjadi tema pemikiran yang utama.⁶⁶

Seluruh pemikiran Presiden Soekarno itu kemudian dikukuhkan menjadi ketetapan-ketetapan MPRS. Pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang kemudian dinyatakan sebagai Manipol-USDEK, dengan Ketetapan MPRS No. I/1960 dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Demikian juga pemikiran Presiden Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah Untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin. Bahkan dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden Seumur Hidup.⁶⁷ Dari seluruh perkembangan itu, ternyata Dekrit Kembali ke UUD 1945 dalam gerak pelaksanaannya merupakan penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soekarno tampil sebagai faktor utama penentu politik Indonesia dengan berbagai gelar agung yang disandangnya.⁶⁸

Walaupun peranan partai-partai politik secara umum mengalami kemunduran, tetapi PKI dalam periode ini mengalami perkembangan yang amat

⁶⁵A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 174-176.

⁶⁶Manipol-USDEK berisi lima kebijaksanaan pokok: (1) kembali ke UUD 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin; (5) Kepribadian Indonesia. Nasakom adalah pemikiran mengenai terhimpunnya Nasionalisme, Agama dan Komunisme dalam satu wadah. Uraian terinci lihat Dewan Pertimbangan Agung, *Tujuh Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi*, hal. 75 dan seterusnya.

⁶⁷Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, *Buku KESEPULUH Himpunan Putusan-putusan MPRS* (Jakarta: MPRS, 1972), hal. 15-77.

⁶⁸Adalah menarik komentar Bung Hatta mengenai Presiden Soekarno dalam periode ini: "Tudjuannja selalu balk, tetapi langkah-langkah jang diambilnja kerap kali mendjauhkan dia dari tudjuannja itu. Dan sistim diktatur jang diadakannja sekarang atas nama demokrasi terpimpin akan membawa ia kepada keadaan jang bertentangan dengan tjita-tjitannya selama ini." Mohamad Hatta, *op. cit.*, hal. 20.

pesat. Pengembangan tema revolusi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, merupakan suasana yang sangat menguntungkan pertumbuhan dan perkembangan PKI. Dengan melakukan penyesuaian ideologi secara taktis, PKI menjadikan dirinya masuk dalam kelompok yang menerima Pancasila sebagai dasar negara, meskipun memiliki tafsiran sendiri.⁶⁹ Peranan PKI semakin kuat sesudah Pancasila dan UUD 1945 diselubungi oleh Manipol-USDEK dan Nasakom. Selanjutnya PKI secara terencana dan konsisten berusaha menanamkan pengaruhnya secara luas di dalam lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan tubuh Angkatan Bersenjata. Tindakan PKI mempunyai dampak atas perkembangan politik dalam negeri maupun di luar negeri.

Kekuatan sosial politik yang dalam periode ini dapat menandingi PKI adalah Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Darat. Suasana politik di Indonesia pada waktu itu sedikit banyak ditentukan oleh tiga faktor penting: Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. PKI mengusulkan agar dibentuk Angkatan ke-5, tetapi hal ini ditentang oleh Angkatan Darat. Ketegangan semakin memuncak, terutama sesudah beredar berita atas sakitnya Presiden Soekarno, berita tentang adanya Dokumen Gilchrist dan berita mengenai adanya Dewan Jenderal. Semua ini akhirnya bermuara pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965. PKI terlibat di dalamnya, sebagai bagian dari usaha mencapai maksudnya merebut kekuasaan dan membuat Indonesia menjadi negara komunis.⁷⁰ Akan tetapi PKI gagal dan dengan kegagalan itu terbukti bahwa komunisme tidak dapat menjadi faktor pemersatu bangsa dan negara Republik Indonesia.

Masa Orde Baru

Reaksi terhadap G-30-S/PKI membawa kelahiran Orde Baru. Sesudah usaha pemulihan ketertiban dan keamanan, dan sesudah Jenderal Soeharto membubarkan PKI berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966, reaksi terhadap Peristiwa G-30-S/PKI berkembang menjadi bersifat total dan lebih fundamental. Gejolak nasional yang terjadi itu bukanlah sekedar terbatas kepada faktor PKI dengan strategi dan taktik perjuangannya, akan tetapi juga disebabkan adanya faktor-faktor lain yang memungkinkan berkembangnya semua peristiwa tersebut. Di antaranya yang terutama adalah karena praktek kehidupan kenegaraan tidak lagi didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai

⁶⁹Di depan Kursus Kader Revolusi tanggal 16 Oktober 1964, Ketua Umum PKI Aidit menyatakan: "Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau kita sudah bersatu, Pancasila tidak perlu lagi." Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 108.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 119-123.

acuan normatifnya. Oleh karena itu Orde Baru bangkit dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di dalam pelbagai segi kehidupan bangsa dan negara. Pancasila dan UUD 1945 adalah ideologi kebangsaan dan konstitusi kebangsaan kita.

Dengan tekad itu Orde Baru telah berhasil merintis jaman pembangunan dalam sejarah kita. Pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan, diletakkan dalam suatu Wawasan Nusantara. Di samping itu diupayakan jalinan timbal balik secara dinamis dan integralistik antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional. Secara demikian berhasilnya pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya dengan ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional. Dengan pemikiran dasar ini, fase demi fase pembangunan telah dilalui, Pelita demi Pelita telah dilaksanakan, dan pembangunan itu pun tidak lain daripada usaha mengisi cita-cita kemerdekaan kebangsaan kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pembangunan ini dengan tegas dinyatakan sebagai pengamalan Pancasila.

Walaupun demikian pembangunan di dalam Orde Baru bukan berarti tanpa permasalahan. Pelurusan tertib konstitusional dalam bidang kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah dimulai sejak Sidang Umum MPRS 1966 dan terus dimantapkan perkembangannya dalam sidang-sidang MPR berikutnya. Problematik yang muncul dalam bidang ini masih saja bersumber pada konflik ideologis dan konstitusi. Manifestasinya antara lain muncul dalam persoalan sistem politik Demokrasi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila, sistem hukum Pancasila dan sistem pendidikan Pancasila. Jadi pada tataran kenegaraan, secara formal pembangunan persatuan dan kesatuan kebangsaan relatif telah terbaku, walaupun tetap menjadi persoalan di dalam gerak pelaksanaannya. Sedangkan pada tataran kemasyarakatan hambatan masih jauh lebih besar, terutama terletak pada faktor-faktor historis, sosiologis, psikologis. Sebagian besar daripadanya merupakan warisan kolonial, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin pada masa yang lalu.

Berdasarkan kenyataan ini, pembangunan di dalam Orde Baru, pembangunan persatuan kesatuan kebangsaan, hendaknya ditempuh melalui dialektika struktur dan kultur. Kulturnya adalah persatuan, yaitu jiwa, semangat, dinamik inti, yang membuat semua orang, semua golongan warga negara Indonesia merasa terikat sebagai satu bangsa. Hal itu tiada lain adalah konsep kebangsaan yang telah menumbuhkan kebangkitan nasional, mewujudkan proklamasi kemerdekaan kebangsaan dan yang kini tetap menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka. Sedangkan strukturnya adalah kesatuan, yaitu wadah yang memungkinkan jiwa, semangat dan dinamik inti

dari konsep kebangsaan itu berfungsi secara utuh, sepenuhnya. Sesuai dengan realita kita sebagai suatu masyarakat majemuk, adalah logis kita menerima struktur *bhinneka tunggal ika*.

Dengan struktur *bhinneka tunggal ika*, kita membina dan mengembangkan secara positif dan kreatif, kebhinnekaan yang terjalin dalam ketunggalikaan. Kebhinnekaan tidak dapat dielakkan, bahkan akan selalu tampil sebagai kebutuhan perkembangan masyarakat kita terhadap profesionalisasi dan fungsionalisasi. Struktur yang *bhinneka* ini harus terbuka bagi setiap warga negara, tanpa konotasi etnis, daerah, golongan ataupun agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang menyatukan dan mengikat kebhinnekaan itu adalah nilai-nilai Pancasila yang berintikan kebersamaan dan kekeluargaan dalam wadah negara kesatuan dan persatuan Indonesia. Paham negara yang oleh Soepomo disebut negara integralistik, negara kekeluargaan.⁷¹

Para penyelenggara negara, termasuk pemerintah dibebani suatu amanat untuk selalu mewujudkan nilai dan semangat kekeluargaan ini agar selaras dengan Undang-Undang Dasar yang disusun berdasarkan semangat kekeluargaan, semangat integratif itu.⁷² Sebagai jiwa dan perekat pembangunan nasional, jiwa, semangat dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan sendirinya akan menyentuh berbagai bidang kehidupan kebangsaan kita. Walaupun demikian tentu saja kita tidak menyatukan yang memang tidak dapat disatukan. Kita tidak pula menyatukan yang memang tidak perlu disatukan. Persatuan yang sungguh-sungguh menyatukan itu dasar asasinya.⁷³

Melalui pendekatan dialektis antara struktur dan kultur itu berarti bahwa aktualisasi kultur selalu melalui struktur. Relevansi dari struktur adalah kalau ia merupakan fungsi bagi kultur. Suatu saat pembinaan persatuan dan kesatuan kebangsaan mungkin lebih menekankan kepada struktur, tetapi tanpa mengabaikan kultur; sebaliknya di waktu lain mungkin akan lebih menekankan aspek kultur, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek struktur. Apabila struktur dan kultur tidak berfungsi secara dinamis, tidak berkembang secara seimbang, maka situasi persatuan dan kesatuan akan berkembang ke arah yang tidak sehat. Di dalam kerangka inilah maka masalah pembauran menempati posisi yang amat penting. Pembauran belum sepenuhnya menjadi proses

⁷¹Mohammad Yamin, *op. cit.*, hal. 118.

⁷²Moerdiono, "Perjalanan Sejarah Bangsa Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945," *Media Karya*, No. 6, 11 Agustus 1984, hal. 6.

⁷³Pendirian ini dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara. Lihat Daoud Joesoef, "Ki Hajar Dewantara dan Kebudayaan Nasional," *Sinar Harapan*, 25-27 Februari 1985.

fungsional dalam pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah ini mempunyai jangkauan yang amat luas, namun salah satu masalah yang paling menonjol dewasa ini adalah pembauran yang menyangkut warga negara keturunan Cina.

Problematisasi pembauran ini tidak tumbuh dari ideologi dan konstitusi kita. Problem pembauran lebih merupakan problematisasi sejarah, sosiologis dan psikologis. Dari sejarah kolonial diketahui bahwa demi tujuan penjajahannya di bumi Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan pemisahan yang dogmatik struktural antara orang-orang Cina dan orang-orang pribumi. Pemisahan yang dogmatik struktural itu diberi kekuatan hukum dan meliputi segala bidang kehidupan: dari lahir hingga akhir hayatnya masing-masing. Secara dogmatik struktural terjadi pemisahan antara orang Cina dan pribumi di dalam sistem hukumnya, di dalam pemukimannya, di dalam kegiatan kehidupannya, di dalam bidang ekonomi dan di dalam bidang pendidikannya. Pola dogmatik struktural ini telah menumbuhkan sikap dan perilaku psikologis yang penuh kecurigaan, saling asing-mengasingkan yang satu dengan yang lain, menjadi makin jauh dalam jarak dan perasaan, yang kesemuanya mempersukar tumbuhnya rasa solidaritas bersama.⁷⁴

Warisan kolonial seperti itu harus kita tinggalkan dan tanggalkan, dan mulai membangun sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan semangat dan cita-cita kebangsaan. Kemerdekaan kebangsaan yang sudah dicapai itu hendaknya diwujudkan dengan menyingkirkan segala bentuk diskriminasi, untuk digantikan dengan semangat persatuan dan kesatuan, baik di dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan serta hukum. Dalam kerangka ini semua maka masalah pembauran menjadi amat penting. Proses pembauran itu penting karena kita sudah bertekad menghayati konsep kebangsaan yang tidak menerima segala bentuk diskriminasi dan tidak didasarkan kepada konotasi etnis. Proses pembauran itu penting karena kita bermaksud membangun masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Proses pembauran itu penting karena kehidupan kebangsaan telah kita tuangkan dalam bentuk negara kebangsaan: Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ideologi kebangsaan: Pancasila dan konstitusi kebangsaan UUD 1945.

POKOK-POKOK KONSEP PERSATUAN DAN KESATUAN

Dari latar belakang sejarah baik sebelum maupun setelah Proklamasi Kemerdekaan, ternyata bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia terjadi di dalam sejarah bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu menjadi realita

⁷⁴Soepardjo Rustam, "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa," *Analisa* (CSIS, Tahun XIII, No. 11, November 1984), hal. 842.

politik, yaitu pengalaman manusia bangsa Indonesia yang menyejarah.⁷⁵ Sebagai realita hidup, Persatuan dan Kesatuan Indonesia telah muncul sejak jaman Kebangkitan Nasional. Yang amat menarik sejak periode Kebangkitan Nasional adalah terjadinya proses Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini ada dan tumbuh kebhinnekaan, tetapi perkembangannya bergerak dalam kerangka ketunggalikaan.

Yang timbul untuk menyatukan dan mengatasi kebhinnekaan itu adalah cita-cita kebangsaan.⁷⁶ Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan terungkap menjadi makin jelas dan bentuk Sumpah Pemuda yang mengikrarkan cita-cita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hakikat Sumpah Pemuda adalah bangkitnya kesadaran nasional dan semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kesadaran yang dijiwai oleh semangat kebangsaan tersebut merupakan modal dan menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan perjuangan memperoleh kemerdekaan bagi Bangsaanya. Persatuan dan kesatuan itu lebih diperkuat dengan adanya pengakuan atas bendera nasional yang satu yaitu Merah Putih serta pengakuan atas lagu kebangsaan yang satu pula yaitu Indonesia Raya.

Selanjutnya walaupun mengalami pasang surut sebagai akibat dari berkembangnya bermacam-macam aliran, aspirasi dan ideologi yang mempengaruhi sejarah perjuangan rakyat Indonesia, akan tetapi paham kebangsaan itulah yang akhirnya mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan kebangsaan kita. Dengan proklamasi itu telah lahir bangsa Indonesia, bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat, sebagaimana dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945. Dan proklamasi itu pun segera disusun dengan dibentuknya Konstitusi Negara Kebangsaan, yang didasarkan atas satu Ideologi Kebangsaan yaitu Pancasila.⁷⁷

Keseluruhan makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya, pada hakikatnya telah dijiwai oleh kon-

⁷⁵Pengertian sejarah dalam hal ini tidak hanya berupa rangkaian peristiwa-peristiwa. Tetapi juga bahwa seluruh rangkaian peristiwa itu adalah ungkapan dari realita yang lebih mendalam, yang dinamis, yang senantiasa menggerakkan manusia dalam proses sejarah tersebut. Lihat A.M.W. Pranarka, "Sejarah dan Politik," dalam *Menuju Satu Indonesia Baru* (Kumpulan Karangan, Yogyakarta: 1971), hal. 82-87.

⁷⁶Cita-cita yang terwujud menjadi konsep kebangsaan ini telah menjadi pedoman sikap Golkar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Lihat hasil Rapim Paripurna Golkar di Jakarta tanggal 18-19 Oktober 1984. Lihat juga Soepardjo Rustam, *op. cit.*, hal. 836-839.

⁷⁷A.M.W. Pranarka, "Pancasila adalah Rumus Ideologi Kebangsaan Kita," wawancara khusus dengan Suara Karya, *Suara Karya*, 23 Agustus 1984.

sepsi kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Undang-Undang Dasar itu konsepsi kebangsaan menemukan wujudnya yang formal dan konstitusional. Jadi persatuan dan kesatuan mendapat kristalisasi yang jelas di dalam ideologi kebangsaan: Pancasila, konstitusi kebangsaan: UUD 1945 dan Negara Kebangsaan: Negara Kesatuan RI. Berdasarkan ideologi dan konstitusi kebangsaan tersebut, maka konsep persatuan dan kesatuan mempunyai acuan yang resmi formal dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ideologi Kebangsaan merupakan acuan konsepsional tentang siapakah kita bangsa Indonesia ini. Konsep kebangsaan itulah yang menjiwai dan merupakan "Geistliche Hintergrund" atau "dinamika batin" di dalam pertumbuhan bangsa Indonesia menjadi suatu nasyon baru. Walaupun terdapat elemen-elemen dari Barat yang mempengaruhi ataupun ikut membentuk paham kebangsaan, yang lazim dikenal sebagai paham nasionalisme, namun terdapat perbedaan mendasar antara nasionalisme sebagai konsep yang tumbuh di Barat itu dengan paham kebangsaan yang kita anut. Antara keduanya terdapat konteks yang berbeda, meskipun di dalamnya terkandung pula beberapa substansi dasar yang dapat menjadi titik temu. Konsep kebangsaan mempunyai corak dan ciri yang khas sebagai pengejawantahan kepribadian kita bangsa Indonesia.

Konsep kebangsaan adalah konsep dinamis, sebab kebangsaan itu adalah dinamika. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan kebangsaan pun tidak berhenti dengan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan serta disusunnya konstitusi dan ideologi. Persatuan dan kesatuan kebangsaan tetap menjiwai dan mengantarkan rakyat Indonesia menghadapi berbagai rintangan dan cobaan sejarahnya, baik yang berbentuk agresi penjajah, pertikaian politik dan ideologi yang berlarut-larut, maupun infiltrasi dan subversi dari berbagai kekuatan baik dari dalam maupun dari luar. Berdasarkan pengalaman sejarah itu Orde Baru telah sampai pada suatu kesimpulan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang pada hakikatnya juga berarti tekad untuk menghayati dan mengamalkan konsep kebangsaan kita itu secara murni dan konsekuen.

Pokok-pokok esensi dari konsep persatuan dan kesatuan kebangsaan adalah sebagai berikut:

Persatuan dan Kesatuan Selalu Terikat Dengan Konsep Kebangsaan

Konsep kebangsaan merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan suatu bangsa, suatu hal yang amat fundamental bagi kita bangsa

Indonesia. Konsep kebangsaan itulah yang menjiwai dan merupakan dinamika batin (*Geistliche Hintergrund*) di dalam pertumbuhan bangsa Indonesia menjadi suatu nasion baru. Konsep kebangsaan kita itu tumbuh sebagai identitas diri dari perjuangan rakyat Indonesia, yang sifat dan coraknya majemuk, identitas yang mampu membentuk perjuangan rakyat menjadi perjuangan Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu kebangsaan adalah konsepsi perjuangan yang mengatasi segala paham golongan dan perorangan, yang menyatukan seluruh rakyat.

Konsep kebangsaan kita mempunyai corak ataupun ciri tersendiri, berbeda dengan paham dan kebangsaan yang berasal dari Barat yang lazim disebut dengan nasionalisme. Konsep kebangsaan yang kita anut adalah kebangsaan yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar ini dapatlah dikatakan bahwa konsep kebangsaan kita tidak berdasarkan pada falsafah yang sempit dan deterministik, serta tidak bersifat dogmatis. Oleh karena itu pembangunan persatuan dan kesatuan selalu terikat dengan konsep kebangsaan tersebut.

Persatuan dan Kesatuan Kebangsaan Bersifat Integralistik Kekeluargaan

Persatuan dan kesatuan kebangsaan adalah persatuan dan kesatuan yang bersifat integralistik kekeluargaan. Yaitu ciri-ciri persatuan hidup yang lahir dari alam pikiran kebudayaan Indonesia, di antaranya memiliki ciri-ciri: keseimbangan lahir dan batin, pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat, musyawarah, suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan rakyat yang satu dengan yang lain, dan segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, serta semangat kekeluargaan. Atas dasar itu Soepomo menegaskan:

"... Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjorak masjarakat Indonesia, adalah ... Negara jang integralistik, negara jang bersatu dengan seluruh rakjatnja, jang mengatasi seluruh golongan-golongannja dalam lapangan apa pun."

Lebih lanjut dikatakan:

"... Sesuai dengan semangat Indonesia aseli tadi, negara tidak mempersatukan dirinja dengan golongan terbesar daiam masjarakat, pun tidak mempersatukan dirinja dengan golongan jang paling kuat (golongan politik atau ekonomi jang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala sescorang, mempersatukan dirl dengan segala lapisan rakjat seluruhnja."⁷⁸

⁷⁸Moh. Yamin, *op. cit.*, hal. 113-114.

Di dalam negara kekeluargaan ini dianut pendirian bahwa seluruh warga negaranya terlibat sedalam-dalamnya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya dalam kiprah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Para pemimpin dibebani suatu amanat untuk selalu mewujudkan semangat kekeluargaan agar selaras dengan UUD yang sengaja disusun berdasar semangat kekeluargaan itu, yaitu semangat integralistik. Semangat yang ingin selalu merangkul dan mendekati setiap lapisan dan golongan yang beraneka ragam dalam tubuh bangsa ini, agar seluruhnya itu ikut berkiprah dengan bergairah dalam karya besar membangun bangsa dan negara kesatuan.

Persatuan dan Kesatuan Kebangsaan Bersifat Anti Diskriminatif dan Tidak Ada Konotasi Etnis

Atas dasar paham kekeluargaan atau integralistik itu, dapatlah dikatakan bahwa konsep persatuan dan kesatuan kebangsaan yang kita anut sampai dewasa ini, bukanlah suatu konsep persatuan dan kesatuan yang sempit ataupun konsep persatuan dan kesatuan yang tertutup. Persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedaerahan, kedudukan maupun status ekonomi.

Persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia tidak dilandasi pada konotasi etnis, tetapi justru menemukan titik tolaknya di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah sebabnya maka konsep persatuan dan kesatuan kebangsaan kita tidak menerima secara konsepsional pengertian mayoritas dan minoritas, pengertian tentang adanya warga negara kelas satu dan warga negara kelas dua. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Persatuan dan Kesatuan Kebangsaan Bersifat Bhinneka Tunggal Ika

Dalam seluruh proses sejarah bangsa kita, kebhinnekaan tumbuh berjalanan dengan ketunggalikaan. Bahkan kita telah pula mengalami proses gejolak dan ketegangan silih berganti antara kebhinnekaan yang menjadi desintegratif dengan ketunggalikaan yang sifatnya integratif. Kebhinnekaan memang mudah sekali cenderung menjadi anasir desintegratif, terutama kalau salah satu faktor kebhinnekaan dikembangkan untuk dipaksakan menjadi acuan yang sifatnya nasional, menyeluruh dan semesta. Hal ini tampak antara lain dalam pergumulan politik dan ideologi dalam sejarah bangsa kita. Sebaliknya kita pun tidak dapat menetapkan suatu ketunggalikaan yang

mematikan kebhinekaan, seperti tampak dalam gagasan Partai tunggal untuk seluruh rakyat Indonesia.⁷⁹

Di dalam cita-cita kebangsaan itu sesungguhnya kebhinnekaan akan dapat mengalami perkembangan yang sebaik-baiknya dengan keserasian di dalam ketunggalikaan bangsa Indonesia. Ketunggalikaan yang tumbuh dan berkembang sebagai acuan kebangsaan, baik dalam wujud dasar negara, konstitusi, ideologi dan pandangan hidup bangsa itu bukanlah ketunggalikaan yang mematikan, membekukan kebhinekaan. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia ini memang disatukan di dalam kenyataan bahwa kita adalah satu bangsa, disatukan oleh sejarah, oleh kebudayaan, disatukan dalam satu negara kebangsaan, satu pandangan kebangsaan, satu dasar negara dan satu ideologi nasional.

Persatuan dan Kesatuan Kebangsaan Selalu Terikat dengan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang senantiasa memandang Nusantara keseluruhannya sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan-keamanan. Dengan cara pandang demikian maka pelbagai kepentingan yang lebih sempit, seperti kepentingan daerah dan kepentingan golongan, harus mengalah kepada kepentingan nasional yang lebih besar, apabila terjadi benturan kepentingan antara keduanya.

PENUTUP

Kini sejarah telah membawa kita kepada saat di mana seluruh pemikiran dan tenaga perlu dipusatkan untuk mewujudkan kerangka landasan pembangunan nasional. Kerangka landasan yang memungkinkan bangsa dan negara kita dapat tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang merdeka, ber-satu, berdaulat, di tengah dunia yang tidak menentu dan saling terkait ini. Ini adalah suatu proses "nation building" bangsa dan negara RI. Suatu proses yang kompleks, proses yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah bangsa Indonesia, baik masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang. Dalam seluruh proses perkembangan Nation Building bangsa Indonesia itu, konsep kebangsaan Indonesia tetap menjadi dinamika batin yang sifatnya kreatif dan integratif, sehingga memungkinkan perkembangan bhinneka tunggal ika, baik dalam dimensi struktur maupun dalam dimensi kultur.

⁷⁹Lihat Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 14.

Problematisasi pembauran harus dipahami dalam latar belakang ini. Pembauran adalah bagian dari nation building: yaitu pertumbuhan persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia. Dengan perkataan lain pembauran adalah proses fungsional di dalam pembangunan persatuan dan kesatuan kebangsaan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa dengan pembauran tidaklah dimaksudkan untuk membentuk suatu ras Indonesia baru; tetapi untuk membentuk suatu nation baru, bangsa baru, bangsa Indonesia yang tidak mempunyai konotasi etnis. Dalam proses pembauran ini yang terutama dan pertama-tama akan menyangkut masalah ideologis, yaitu ideologi kebangsaan Indonesia. Dalam hubungan ini pula maka proses pembauran tidaklah berarti pembauran yang rasialistik. Inilah yang dimaksudkan dengan pembauran di dalam kerangka persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia. Persatuan dan kesatuan yang selalu terkait dengan konsep kebangsaan yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah Indonesia.

Tipe-tipe Pemikiran Keagamaan

SUWARDI*

Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan¹ yang pada tanggal 31 Mei 1985 disetujui untuk disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, jauh hari sebelumnya telah sempat menggoncang pendapat masyarakat luas, khususnya masyarakat keagamaan. Telah dijelaskan dan ditegaskan oleh pemerintah bahwa rancangan undang-undang itu bukanlah dimaksudkan untuk mencampuri apalagi mengatur urusan rumah tangga agama. Sekalipun demikian, reaksi yang paling santer datang dari kelompok agama seperti MUI (Islam), Parisada (Hindu Dhärma), Walubi (Budha), MAWI (Katolik), PGI (Kristen), maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bercorakan keagamaan seperti: PMKRI, GAMKI, HMI, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muslimin Indonesia, Ikatan Pemuda NU, Fatayat NU, Nasi'atul Aisiah.² Organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut berusaha menyampaikan saran, harapan dan tanggapannya sekitar rancangan undang-undang untuk selanjutnya diolah dan dibahas oleh DPR.

Karena itu tidak mengherankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut tampaknya telah memacu tumbuhnya pemikiran-pemikiran keagamaan. Apabila kita amati pemikiran-pemikiran keagamaan tersebut, tampaknya bersifat heterogen, artinya tidak terdapat suatu aliran yang bisa disebut sebagai satu-satunya pemikiran keagamaan. Bahkan tidak jarang ada

*Staf CSIS

¹RUU ini merupakan satu dari paket lima RUU Bidang Politik. Dalam Penjelasan dinyatakan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama dan agama tidak mungkin dipancasilakan... Juga dinyatakan bahwa undang-undang itu tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

²Lihat pemberitaan media massa menjelang tanggal 23 April 1985, saat mulai pembahasan RUU.

perbedaan tajam antara yang satu dengan yang lain. Bila kita selami ke belakang, pola-pola pemikiran keagamaan tersebut pada dasarnya bermula dari konteks pemikiran budaya iamannya, yang berada dalam tegangan pemikiran dogmatisme otoriter di satu pihak, dan relativisme totaliter di pihak lain.

KONTEKS PEMIKIRAN KEAGAMAAN

Konteks pemikiran keagamaan ini erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran manusia pada umumnya.³ Kalau dewasa ini kesadaran manusia modern tentang dirinya, masyarakatnya, dan dunianya telah berubah, maka hal itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu ataupun sebelumnya, yang sudah pasti amat berpengaruh mendalam. Peristiwa-peristiwa itu antara lain munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang pengetahuan alam secara empiris-eksperimental, yang kemudian berdampak pada ilmu-ilmu sosial, filsafat maupun theologi. Kejadian-kejadian tersebut merupakan awal dari berakhirnya jaman abad pertengahan, dan permulaan bagi jaman modern.

Dengan mudarnya abad pertengahan dan lahirnya jaman modern, tamillah dua aliran pemikiran besar rasionalisme dan empirisme,⁴ yang keduanya tercermin dalam perkembangan ilmu maupun filsafat. *Rasionalisme* mendorong pengembangan pemikiran-pemikiran manusia dalam menyusun teori-teori, sedangkan *empirisme* mendorong pengembangan pemikiran-pemikiran manusia dalam melakukan percobaan-percobaan. Munculnya Rene Descartes⁵ yang berusaha menemukan kepastian baru dalam sistem ilmu pengetahuan, mempertajam dualisme pemikiran-pemikiran di atas.

Sejak jaman modern itu, kepercayaan orang kepada kemampuan pengetahuan manusia menjadi semakin besar, sehingga terjadilah suatu gerakan di mana manusia merasa bahwa segala sesuatu akan dapat dijangkau dan dipecahkan oleh manusia melalui ilmu pengetahuannya saja. Namun demikian, keadaan jaman modern itu tidak bisa mengelak dari macam-macam krisis dan perpecahan yang menimpa dunia ilmu pengetahuan. Terjadilah separasi antara theologi dengan ilmu dan filsafat, dan selanjutnya disusul

³Lihat A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985), hal. 262-270 tentang: Perkembangan Pemikiran Dunia Pada Awal Abad XX.

⁴Tokoh-tokoh *empirisme* misalnya: J. Locke (1632-1704), G. Berkeley (1684-1753), D. Hume (1771-1776); dan tokoh-tokoh *rasionalisme* antara lain: R. Descartes (1596-1650), Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-1716), Pascal (1623-1662).

⁵Rene Descartes (1596-1650) yang juga disebut bapak filsuf modern, mencari kepastian baru berawal dari keberadaan dirinya sendiri sebagai dasar kepastian yang mutlak (*Cogito ergo sum*). Dirinya sendiri dipahami secara jelas dan tepat (*clairement at distinctement*). Pikiran itu sama sekali imanen. "Cogito" itu tertutup pada dirinya sendiri.

separasi filsafat di satu pihak dan ilmu pengetahuan di lain pihak. Dari sanalah kemudian terjadi separasi lagi di dalam kubu filsafat maupun kubu ilmu pengetahuan, sehingga timbullah macam-macam ilmu pengetahuan dan filsafat, yang masing-masingnya menjadi deterministik eksklusif. Setelah tumbuhnya berbagai pengetahuan yang masing-masing menyatakan diri mempunyai otonomi penuh, muncullah usaha-usaha untuk membangun suatu induk ilmu pengetahuan atau sintesa yang menyeluruh, untuk mengatasi perpecahan-perpecahan yang semakin majemuk dan rumit.⁶

Kendati demikian konflik tetap saja terjadi, yang pada garis besarnya dapat dibedakan dalam dua aliran penting, yaitu: *idealisme* dan *positivisme*.⁷ Separasi yang makin majemuk dan kompleks menciptakan sekat-sekat dan kotak-kotak pada masing-masing bidang dan disiplin ilmu, yang satu mengeksklusifkan yang lain, karena semua merasa lebih unggul daripada yang lain. Kompleksitas perkembangan ilmu pengetahuan ini membawa serta problem-problem lain, karena dari sana mulai dipersoalkan masalah supremasi satu di atas yang lain. Orang mulai mencari, manakah jenis pengetahuan yang memegang kedaulatan atas kebenaran dan kepastian: *theologi*, ilmu ataukah filsafat. Dalam latar belakang seperti ini Auguste Comte (1798-1857) mengemukakan tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Menurut pendapatnya, evolusi perkembangan pengetahuan berlangsung dalam tiga tahap, *theologi* - filsafat dan akhirnya (yang paling sempurna) pengetahuan positif. Dengan pernyataan ini *theologi* ditinggalkan jauh di belakang, baik oleh filsafat maupun lebih-lebih oleh ilmu pengetahuan.

Melihat perkembangan pengetahuan yang menunjukkan pola konvergen dan divergen ataupun tunggal dan jamak, selanjutnya muncul keinginan-keinginan untuk memperkembangkan komunikasi dan dialog antara berbagai jenis ilmu pengetahuan serta dengan cabang-cabangnya. Keinginan ini melahirkan apa yang kini disebutnya pendekatan multidisipliner dan interdisipliner.

Evolusi ilmu pengetahuan di atas, mengantarkan manusia kepada suatu kesadaran baru, bahwa tidak ada satu jenis pengetahuan pun yang ternyata

⁶Immanuel Kant (1724-1804) mencoba mempersatukan rasionalisme dengan empirisme. Ia memperlihatkan bahwa pada dasarnya pengetahuan itu merupakan "kerjasama" dari dua unsur, pengalaman indrawi dan keaktifan akal budi. Pengalaman indrawi merupakan unsur "a-posteriori," dan akal budi merupakan unsur "a-priori." Empirisme dan rasionalisme hanya mementingkan satu dari dua unsur tersebut, sehingga hasilnya setiap kali selalu berat sebelah. Di sini Kant memperlihatkan bahwa pengetahuan itu selalu merupakan sebuah sintesa. Sintesa tersebut merupakan titik pangkal periode baru yang disebutnya "idealisme."

⁷Tokoh-tokoh aliran *idealisme* antara lain: Immanuel Kant, Fichte (1762-1814), Schelling (1775-1854), Hegel (1770-1831). Sedangkan tokoh-tokoh aliran *positivisme*, antara lain: J. Stuart Mill (1806-1873), H. Spencer (1820-1903).

memiliki kebenaran dan kepastian secara mutlak, sehingga tidak ada satu pengetahuan yang dapat dikatakan berdaulat atas jenis-jenis pengetahuan yang lain. Kebenaran dan kepastian ilmiah bukanlah kebenaran dan kepastian filsafat, dan bukan pula kebenaran dan kepastian ilmu dan theologi. Theologi, filsafat dan ilmu adalah bagian-bagian dari evolusinya ilmu pengetahuan; serta pengetahuan adalah bagian dari hidup dan kehidupan manusia.

Dalam pada itu tampillah kecenderungan mencari kualitas kebenaran serta kepastian pengetahuan, karena validitas suatu pengetahuan sangat ditentukan oleh kualitas kebenaran dan kepastiannya. Pertanyaan-pertanyaan sekitar "adakah kebenaran dan kepastian" serta "bagaimana memperolehnya," pada dasarnya mengarahkan pertanyaan mendasar mengenai pengetahuan itu sendiri. Keinginan untuk menemukan kebenaran dan kepastian yang absolut, tampaknya telah mendesak orang kepada masalah kritika, yakni suatu kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang memiliki kebenaran dan kepastian tersebut.

Dalam situasi perkembangan ilmu yang tidak kunjung selesai itu, di sebelah yang lain terjadi pula pergumulan antara ajaran Hellenisme di satu pihak dan ajaran Semitisme di pihak yang lain.⁸ Pada jaman modern khususnya, tampak bahwa ajaran Hellenisme lebih unggul dari pada ajaran Semitisme. Itu berarti bahwa aliran pemikiran yang kuat adalah menolak supremasi theologi sebagai pemegang kebenaran dan kepastian yang mutlak; dan selanjutnya yang dominan adalah peranan pikiran dan individu manusia, sebagai penentu kebenaran dan kepastian. Bahkan lebih dari itu, lebih jauh lagi Hellenisme condong menolak agama dan akhirnya menolak Tuhan sendiri.

Melihat perkembangan pemikiran yang demikian itu, selanjutnya muncul pendekatan-pendekatan baru, yang pemahamannya mengenai pengetahuan, kebenaran dan kepastian tidak lagi bersandar pada konstruksi teoretis irrealis dari pikiran manusia yang akhirnya hanya akan menciptakan suatu "super-structure" baru. Pendekatan-pendekatan yang baru itu meletakkan dirinya dalam konteks hidup dan kehidupan manusia yang realis, kritis, aktif dan dinamis, oleh sebab itu bersifat relatif. Pendekatan ini tidak sekali jadi,

⁸Baik Hellenisme maupun Semitisme beranggapan bahwa pengetahuan merupakan daya yang penting untuk menemukan kebenaran dan kepastian yang sifatnya mutlak. Menurut ajaran Hellenisme, kebenaran dan kepastian mutlak ditentukan oleh pemikiran manusia, sehingga transendensi diingkari dan imanensi dijadikan bernilai mutlak. Sedangkan menurut ajaran Semitisme, kebenaran dan kepastian berpangkal dari yang Ilahi (Tuhan), dan selanjutnya melalui perwahyuan-Nya, kebenaran dan kepastian yang mutlak itu diserahkan kepada manusia melalui institusi keagamaan. Baik Hellenisme maupun Semitisme memberikan ajaran yang mengandung kebenaran serta kepastian yang bersifat deterministik, dogmatis, normatif dan eksklusif.

melainkan harus selalu diperbarui dan dimantapkan, dikembangkan dan disempurnakan. Dalam perspektif yang demikian ini, kepastian dan kebenaran pemikiran dipahami dan dimengerti menurut masing-masing peranannya dalam hidup dan kehidupan, yang menyangkut pembaharuan, perkembangan, maupun pembangunan manusia-masyarakat dan dunianya. Dalam pada itu pemikiran-pemikiran tentang segala sesuatu termasuk pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan dunia masuk ke dalam ruang-ruang diskusi dan seminar, dialog dan musyawarah, sehingga pemikiran-pemikiran tersebut sempat bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran dunia modern. Proses pendekatan yang demikian juga terjadi dalam lingkup pemikiran tentang keagamaan.

Dengan munculnya pola pendekatan yang baru itu, pada dasarnya dalam konteks sejarah perkembangan pemikiran, secara tegas dapat dibedakan adanya dua tipe pemikiran tentang keagamaan. *Pertama*, tipe pemikiran (lama) yang cenderung memandang agama sebagai hal absolut, mutlak, oleh sebab itu agama bersifat normatif, doktriner; dan *kedua*, tipe pemikiran (baru) yang cenderung memandang agama sebagai hal yang nisbi, oleh sebab itu agama bersifat relatif, komplementer. Adapun tipe-tipe pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

AGAMA SEBAGAI HAL YANG MUTLAK

Tipe pemikiran seperti ini bukan pola baru dan tidak sulit untuk dipahami. Sejak dahulu kala manusia merasa dirinya selalu terbatas dan tidak pasti, baik tentang kehidupan di dunia ini maupun lebih-lebih tentang kehidupan di seberang kematian. Oleh sebab itu ia cenderung mencari pegangan dan andalan yang mutlak, absolut. Dalam pada itu, manusia menemukannya di dalam agama, sehingga agama baginya merupakan jaminan untuk kehidupannya, baik yang duniawi maupun yang ukhrowi tanpa ada pemisahan. Karena fungsi agama yang demikian, maka semua hukum, perintah serta ajaran agama bersifat absolut, *determinan* bagi manusia. Manusia tidak mungkin mengatakan "no," "mboten," ataupun "tidak," melainkan selalu harus menjawabnya "setuju," "ya," "inggih," dan "amin." Tipe pemikiran ini cenderung memandang serta membuat agama sebagai hal yang mutlak, total, universal dan normatif. Manusia dan masyarakat dunianya dipikirkan sebagai satu ordo baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan maupun keamanan, di mana agama merupakan penjamin dari kelestarian ordo-ordo tersebut. Sehubungan dengan itu, tipe pemikiran ini menganggap manusia sebagai "budak" atau sekurang-kurangnya berjiwa budak. Artinya, manusia tidak lagi mempunyai otonomi dan kebebasannya. Oleh sebab itu manusia cenderung untuk bersikap pasrah, pasif, dan naif menerima segala sesuatunya

sebagai hal yang sudah ditentukan dan harus diterima sebagaimana adanya. Suara hatinya tidak lagi menyerukan "kata" dari dalam lubuk hatinya yang terdalam, melainkan justru dari "luar" hatinya.

Bagaimanakah pemikiran tentang kedudukan pemuka agama dalam tipe pemikiran tersebut? Karena agama dianggapnya sebagai hal yang mutlak, total, universal, dan normatif, maka pemuka agama dipikirkan mempunyai hal-hal yang istimewa. Pemikiran tersebut menempatkan pemuka agama secara apriori "berdiri" di pihak Tuhan, bahkan mewakili Tuhan. Ia memiliki oraculum,⁹ dan menjadi juru tafsir rencana Tuhan, sekaligus pelaksana tunggal, baik dalam hidup yang lahiriah maupun yang batiniah. Ia menjadi panutan segalanya. Demikianlah gambaran pemuka agama dalam pola pikiran agama sebagai hal yang mutlak.

Cakupan agama di dalam pemikiran ini bukan saja terbatas pada hal-hal yang adikodrati, melainkan meluas mencakup semua segi dan bidang kehidupan, dari masalah jual-beli hasil bumi sampai pada persoalan pengaturan ekonomi nasional dan internasional; dari masalah hubungan pribadi sampai ke masalah-masalah sosial politik yang berskala nasional maupun internasional. Untuk tipe pemikiran yang demikian ini tidak dikenal adanya departementalisasi kehidupan yang duniawi dan yang akhirat. Agama adalah segala-galanya: ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pemikiran seperti ini tampaknya bermula dari pemahaman bahwa agama merupakan perwahyuan langsung dari Tuhan. Bahkan lebih jauh pemikiran ini membuat agama identik dengan Tuhan sendiri. Oleh karenanya agama selanjutnya memiliki sifat-sifat Tuhan dan sifat Mutlak. Dalam hal ini, tidak mengherankan apabila pemikiran ini memandang agama sebagai yang bersifat total, universal, supranatural, supranasional, supratemporal, supraempiris, transhistoris, bersifat normatif, absolut, mutlak, dan merupakan sumber kebenaran yang tak dapat digoyahkan dan ditawarkan lagi. Pemikiran-pemikiran di luar otoritas agama harus dibuang dan dimusnahkan. Agama ditumbuhkan menjadi ideologi pengatur dunia secara total dan universal, baik orde sosial dan politik maupun orde pertahanan dan keamanan. Pemikiran keagamaan yang absolut demikian itu pernah pula dijumpai dalam sejarah.¹⁰

⁹Oraculum (Latin), orakel (Indonesia): tempat para dewa menyatakan kehendak mereka atau meramalkan masa depan dengan tanda-tanda (misalnya dengan sekawan burung terbang, halilintar, getaran usus binatang kurban dan lain-lain). Tanda-tanda tersebut selanjutnya diartikan oleh pemuka agama. Menurut kisah, orakel yang termasyhur berada di Delphi. Lihat W. van Houve, *Ensiklopedia Indonesia*, N-Z, Bandung, hal. 1015.

¹⁰Lihat misalnya Michel Labourdette, Garrigou-Lagrange, pemikir-pemikir ortodoks, dogmatis yang menyerang munculnya pemikiran-pemikiran keagamaan yang baru (*nouvelle theologie*) yang antara lain diprakarsai oleh theolog dan ilmuwan Theilhard de Chardin. Disput

AGAMA SEBAGAI HAL YANG NISBI

Tampaknya manusia harus menerima kenyataan bahwa pola pemikiran keagamaan sebagai hal yang absolut belum pernah terwujud di dalam sejarah; belum ada agama yang berhasil mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, tata dunia yang mutlak sempurna. Krisis keagamaan justru adalah bagian dari krisis sejarah manusia. Situasi yang demikian menumbuhkan pemikiran mengenai agama sebagai hal yang relatif.¹¹ Pola pemikiran ini bukan saja digandrungi oleh kelompok-kelompok non-agama, yang kadangkala muncul dari aliran seperti positivisme, materialisme, rasionalisme, pragmatisme, melainkan kini muncul pula dari dalam kelompok-kelompok umat berbagai agama itu sendiri.

Berbeda dengan tipe pemikiran pertama, tipe pemikiran ini pada dasarnya menempatkan agama pada kedudukan yang tidak sama dengan Tuhan Yang Maha Mutlak. Mereka sadar bahwa yang Mutlak, Absolut, dan Total hanyalah Tuhan. Tidak ada instansi lain yang bersifat demikian di luar Tuhan, termasuk agama ataupun institusi keagamaan. Agama dengan demikian tidak dipikirkan sebagai yang mutlak. Agama tidak bersifat total universal tanpa batas, melainkan selalu ada dalam konteks historis, sosiologis, dan kultural. Dihadapkan dengan "ketidakterbatasan" Tuhan, agama bersifat terbatas. Dalam agama adanya perwahyuan tetap diterima dan dihayati, akan tetapi sekaligus melekat unsur-unsur manusiawi, yang bersifat sejarah, berlangsung dalam rentangan ruang dan waktu. Oleh karenanya, ciri manusia dalam jaman dan waktu yang tertentu memberi warnanya juga.¹² Dalam pola pemikiran ini, kedudukan manusia dipikirkan sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi, bahkan sering pula disebut "imago Dei." Oleh sebab itu, nasib

itu selanjutnya diikuti munculnya *Humani Generis*, (1950) suatu dokumen gereja yang sangat memukul pemikiran-pemikiran keagamaan yang baru. (Avery Dulles, SJ, *Revelation Theology*, London, Burns and Oates/Herder and Herder, 1969, hal. 152-153). Lihat pula *Benyamin B. Warfield* (1851-1921), profesor theologi yang sangat berpengaruh di Princeton, Amerika Serikat (*Ibid.*, hal. 103-104). Lihat juga Dr. Amien Rais, "Gerakan-gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia," dalam *Prisma*, No. Ekstra, 1984 Th XIII, hal. 23-39; ataupun tulisan Edward Mortimer dalam bukunya *Faith and Power: The Politics of Islam*, New York, Random House, Inc., 1982, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Islam dan Kekuasaan*, Bandung, Mizan, 1984.

¹¹Salah satu kejadian penting yang dapat dicatat yakni munculnya jaman yang mulai mempersoalkan/mempertanyakan segala sesuatu yang mutlak, absolut; misalnya pada tokoh-tokoh seperti G.E. Lessing (1729-1781) yang percaya pada kebebasan manusia dalam berbicara dan sikap kritis terhadap agama, tanpa perlu menjadi pemikiran bebas; H.S. Reinmarus (1694-1768) yang menguraikan secara terperinci filsafat naturalis dan menyangkal adanya keaslian supernatural dari jaman Kristen.

¹²Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada perbedaan-perbedaan upacara keagamaan dan kebudayaan dari jaman ke jaman. Dalam konteks ini pula mudah dipahami mengapa orang begitu gampang menarik garis persamaan antara Kristenisasi, modernisasi dan westernisasi.

manusia mempunyai makna dan arti; otonomi dan kebebasan manusia dihormati. Dalam sejarah kebudayaan manusia, agama menjadi salah satu fungsi, bukan satu-satunya fungsi. Agama menjadi bersifat komplementer bersama-sama dengan fungsi dan faktor-faktor lainnya. Di dalam agama itu, berjalamlah rahmat dan dosa, yang transenden dan yang imanen, yang mutlak dan yang terbatas.¹³

PENILAIAN KRITIS

Setelah melihat tipe-tipe pemikiran mengenai agama seperti di atas, perlulah secara singkat memberikan penilaian secara kritis, agar dengan demikian dapat diketahui masing-masing kelemahannya sehingga akan berguna untuk tindak mawas diri.

Kelemahan mendasar pada tipe pemikiran pertama terletak pada *sikap memutlakkan* segala sesuatu yang pada dasarnya tidak bersifat mutlak. Tindakan yang demikian pada hakikatnya sama saja dengan men-"Tuhan"-kan sesuatu yang sebenarnya bukan "Tuhan." Dalam istilah Hegel, ini adalah proses "apotheosis."¹⁴ Karena pada dasarnya yang dimutlakkan itu tidak bersifat mutlak, serta yang di-"Tuhan"-kan itu bukan "Tuhan," walaupun agama merupakan fungsi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan sekalipun. Tipe pemikiran ini hanya akan berakhir pada kemustahilan, ketidakmungkinan, bahkan absurditas.¹⁵ Banyak harapan dan cita-cita justru akan menjadi kosong, hampa, hambar, dan tidak bermakna. Dalam kehidupan bersama atau masyarakat, tipe pemikiran agama seperti itu bisa saja muncul dalam bentuk gerakan "theokratisme,"¹⁶ ataupun ideologisasi

¹³Lihat misalnya pemikiran yang tercermin antara lain dalam *Lumen Gentium* (Terang Bangsa-bangsa), salah satu dokumen Muktamar Vatikan II (1965) tentang Gereja. Di situ pemikir seperti Hans Kung, Karl Rahner, SJ tidak bisa diabaikan (Dr. T. Jacobs, *Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium*, Jilid I, II, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1970). Lihat juga Wolhart Pannenberg (1928-), Jurgen Moltmann (1926-). (Avery Dulles, *Revelation Theology*, *op. cit.*, hal. 128-132). Demikian pula pemikiran yang dilontarkan Fazlul Rahman dari Universitas Chicago dalam International Seminar on New Trends in Islamic Studies di Jakarta: "...cara-cara kuno yang selama ini dilakukan untuk mengkaji Islam harus diubah, karena cara-cara yang demikian tidak kritis. Mengkaji Islam dengan cara-cara yang lebih kritis itulah yang disebut *new trends* (Kompas, 14 Agustus 1985). Juga lihat Munawir Sjadzali dalam "Seminar Nasional Pendalaman Agama" di IAIN Ciputat, bahwa "kebangkitan umat Islam harus diawali dengan kebangkitan pemikiran" (*Pelita*, 3 Oktober 1985).

¹⁴Apotheosis: pendewaan.

¹⁵Absurditas (kesia-siaan hidup): Tema-tema seperti ini sangat laku, diantaranya pernah memberi inspirasi pengarang Perancis Albert Camus (1913-1960) dalam sebuah judul "La Peste."

¹⁶Theokratisme (theos = Tuhan, krateo = pemerintahan). Pemerintahan yang dilakukan atas nama Tuhan. Pemerintah dalam negara agama dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda: lewat seorang raja keturunan "Tuhan" atau penjelmaan suatu dewa, lewat kaum Imam, brahma,

agama-agama secara radikal. Segala sesuatu, baik pemerintahan, undang-undang, hukum maupun bidang-bidang kehidupan sosial politik dan lain-lain, semuanya dipaksa harus berpangkal dari agama.

Di dalam masyarakat yang heterogen dewasa ini, di mana keragaman merupakan sifat alamiah termasuk adanya keragaman agama-agama¹⁷ dan keragaman theologi di dalam suatu agama, tentu saja pemikiran ini akan terbentur kepada masalah-masalah agama mana atau ajaran keagamaan siapa yang menjadi pegangan mutlak itu. Walaupun tidak jarang terkait dengan tema reformasi sosial, transformasi kultural, maupun nilai-nilai universal, tipe pemikiran pertama ini akan bermuara kepada suatu diskriminasi yang sudah tentu tidak demokratis lagi. Munculnya gerakan *puritanisme* ataupun *fundamentalisme*, tampaknya tidak bisa dilepaskan dari situasi pemikiran yang demikian.

Kecenderungan ekstremisme dan radikalisme totaliter keagamaan yang digambarkan di atas tidak pandang agama besar maupun kecil. Dalam keadaan yang demikian dapat ditemukan kecondongan-kecondongan untuk meng-"ideologisasi"-kan agama. Agama dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kolektif. Agama berubah dan diubah menjadi ideologi. Apabila pemahaman agama sampai ke tingkat ini, maka agama bukan lagi untuk mendamaikan, mencerdaskan, dan bercorak "egalitarian," membebaskan manusia. Yang terjadi sebaliknya: agama malahan menakutkan, meresahkan, memecah-belah, membelenggu manusia dan merusak kemanusiaan. Agama bukan lagi untuk manusia, melainkan manusia untuk agama. Perlu ditambah suatu catatan bahwa ideologisasi agama seperti itu dapat pula dilakukan oleh pihak-pihak yang sebetulnya tidak beragama, misalnya kaum atheis, komunis.

Problem dan kerawanan pokok dalam tipe kedua adalah sikap *relativisme*, yang menjadi *radikal* pula dan dimutlakkan. Orang tidak mengetahui manakah batas-batas untuk merelativisasi, sehingga ia condong merelativisasi segalanya (relativistis), yang sesungguhnya tidak berbeda dengan memutlakkan segalanya (absolutis).

Memang dalam kubu tipe pemikiran kedua ini perlu sekali dibedakan dua sikap dasar yang berlainan.¹⁸ Pertama, ada orang-orang yang mampu merela-

bhiksu, atau pelaksana-pelaksana ibadah lain, lewat syariat agama yang ditafsirkan oleh ahli-ahli hukum suci. Segala bentuk theokrasi bersifat statis konservatif, karena hukum agama dipandang tetap tak berubah untuk segala jaman dan situasi.

¹⁷Schubungan dengan masalah ini lihat Munawir Sjadzali dalam *Kompas*, 7 Oktober 1985.

¹⁸Di sini perlu dibedakan antara relativisasi dan relativisme: *relativisasi* adalah kemampuan merelativir hal-hal yang sebenarnya memang relatif, dan *relativisme* adalah kecenderungan merelativir segala sesuatu, termasuk juga yang bernilai mutlak, ataupun yang Mutlak itu sendiri.

tivisasi agama, akan tetapi tetap mengakui dan mempertahankan makna dari agama bagi kehidupan manusia. Kedua, ada orang-orang yang merelativisasi agama sedemikian rupa sehingga menolak makna agama, bahkan lebih jauh lagi menolak adanya Tuhan Yang Maha Mutlak. Baginya, agama maupun Tuhan dipandang sebagai ciptaan manusia semata-mata. Sikap yang kedua itu tampak antara lain di dalam apa yang lazim disebut sebagai sekularisme,¹⁹ yang amat potensial untuk awal dan bibit melawan agama dan selanjutnya melawan Tuhan. Sikap yang terakhir ini disebut pula (*Atheisme*).²⁰ Dari kubu atheisme inilah ada dikemukakan ajaran seperti misalnya: "Allah itu merupakan hasil proyeksi, ciptaan fantasi manusia; semua mimpi indah manusia diberinya nama dan bentuk konkret Allah" (Feuerbach, 1804-1872), "Allah dan surga adalah ciptaan kelas kaum kapitalis sebagai obat bius bagi orang-orang yang teralienasi dari kondisi sosial ekonominya" (Marx, 1818-1883), dan akhir-akhir ini sekitar tahun 1970-an terdengar nyaring pernyataan Nietzsche (1844-1900) yang menyatakan: "Allah telah mati, kitalah yang membunuhnya." Memang kalau Tuhan telah dibuang, akhirnya manusia cenderung untuk men-"Tuhan"-kan apa yang di luar Tuhan itu pula. Di sini justru terjadi titik temu antara dua ekstrem tipe pemikiran kedua (*Atheisme*) dengan tipe pemikiran pertama.

Melihat kenyataan aktual yang demikian, maka permasalahan sekitar agama, tampaknya tetap merupakan diskusi yang urgen. Dalam hal ini, sekalipun pada umumnya orang cukup tanggap serta mudah merasa mengerti apa yang dimaksudkan dengan istilah "agama," akan tetapi di dalam kenya-

¹⁹Pengertian sekularisme ini berbeda dengan sekularisasi. Secara singkat dengan *sekularisme* diartikan suatu paham yang tidak mengakui kewenangan Tuhan campur tangan dalam urusan dunia; sedangkan *sekularisasi* adalah paham yang menerima bahwa dunia ini mempunyai tatanan dan fungsi masing-masing.

²⁰*Atheisme* adalah sistem atau sikap yang menyangkal adanya yang "transendens" atau Tuhan. Dalam hal ini dapat dibedakan antara atheisme yang eksistensial dan atheisme yang non eksistensial. *Atheisme yang eksistensial* adalah sikap atau sistem yang sungguh-sungguh menutup diri terhadap transendensi yang benar (Tuhan), entah karena keangkuhan, entah karena subyek yang terbenam belaka dalam dunia kategorial, dan tidak sudi mengatasi lingkungan tersebut (*superbia et concupiscentia*). *Atheisme* ini adalah sikap yang secara bebas dan insyaf menolak tuntutan kebenaran dan nilai-nilai yang transendens. *Atheisme yang non-eksistensial* adalah sikap atau sistem yang tidak menutup dirinya terhadap kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai mutlak, tetapi menolak suatu ekspresi kategorial dari kepercayaan akan Tuhan (Yang Mutlak). Penolakan itu selanjutnya diberi bentuk penyangkalan eksplisit tentang adanya Tuhan. Penolakan tersebut didasarkan baik oleh kekurangan refleksi dari pihak yang bersangkutan (atheis) yang tidak dapat mengatasi lingkungan yang kategorial, maupun oleh bentuk kategorial yang kurang benar dan serius dari kepercayaan akan Tuhan, yang dianjurkan oleh pihak lain. (Lihat, M. van den Bercken SJ, *Atheisme Sekularisasi Hermeneutik*, Yogyakarta, 1968, hal. 18). Masih dekat dengan paham ini adalah *deisme*, yaitu paham yang percaya bahwa Tuhan telah menciptakan dunia, (yakni memberikan permulaan pertama), namun kemudian Tuhan mundur dari dunia dan selanjutnya dunia berjalan sendiri. Tuhan tidak punya peran eksistensial dalam hidup dan kehidupan ini.

taannya banyak kompleksitas dan kesulitan. Problematika yang selalu aktual serta mendesak bukan saja terletak pada "apa itu agama," melainkan juga pada *bagaimana* menghayati agama itu. Tampaknya problematikanya bukan terletak terutama pada agama, melainkan terletak pada pihak manusia yang beragama.

PENGHAYATAN AGAMA SECARA BARU

Problematika sekitar masalah agama bukan merupakan barang baru. Kalau muncul problem yang demikian, maka inti permasalahan umumnya terletak pada manusianya. Agama tetap hadir dan berdiri tegak pada pelbagai jaman pada berbagai situasi di banyak tempat, serta diyakini oleh banyak manusia dengan segala keragamannya. Agama selalu tetap, namun jaman, tempat dan manusianya yang berbeda, berganti dan berubah.

Karena itu, dalam menghayati kehidupan beragama sekurang-kurangnya dapat dibedakan 2 (dua) sikap yang berbeda satu dari yang lain, yaitu sikap yang irrealistik²¹ dan sikap yang realistik. Tampaknya sejarah akan membawa manusia-manusia beragama sampai kepada sikap yang realistik ini.

Berbeda dengan model penghayatan yang irrealistik, model penghayatan realistik berusaha mencari pesan dan makna ajaran agama bagi jamannya. Menurut pemahaman ini, ajaran agama tidak dilihat sebagai hal yang statis, dogmatis, kaku dan beku, melainkan memiliki sifat yang lentur dan elastis. Agama tidak saja menyapa dan berbicara kepada manusia di masa lalu, tetapi juga kepada manusia pada saat kini dan di sini. Dengan perkataan lain, manusia dalam pelbagai situasi dan kondisinya tetap relevan untuk agama, demikian pun pemahaman agama akan menjadi relevan untuk manusia.

Inilah tampaknya amanat yang amat penting di dalam pemikiran keagamaan manakala dikemukakan gagasan tentang *kontekstualisme*, di samping pemikiran-pemikiran mengenai agama sebagai fungsi komplementer serta pribumisasi ataupun Indonesianisasi penghayatan kehidupan beragama.²²

²¹Sikap irrealistik dalam penghayatan agama pada dasarnya memisahkan penghayatan hidup real sehari-hari dari penghayatan religiusnya. Sikap itu bermula dari kehidupan "religius-doa" yang dicabut dari akarnya dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga selanjutnya orang mengalami dikhotomi dalam penghayatan kehidupannya: hidup di rumah peribadatan di satu pihak, dan hidup dalam kenyataan sehari-hari di lain pihak.

²²Gagasan dan pemikiran-pemikiran tersebut satu sama lain bertujuan mencari makna dan relevansi agama bagi manusia dalam situasi kebudayaan dan jamannya. Untuk itu antara lain dapat dilihat baik dalam sambutan Menteri Agama RI pada seminar "Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fiqh di Indonesia" pada 4 Februari 1985, dalam *Pelita*, 16 Februari 1985, maupun

Bila pemikiran-pemikiran ini dapat tumbuh dan berkembang, maka niscaya agama-agama di tanah air ini akan merupakan unsur kebhinnekaan yang ikut memperkaya dan mempererat ketunggalikaan. Orang kiranya perlu sampai kepada kesadaran bahwa menganut suatu agama dan sekaligus menghayati nilai-nilai kebangsaan tidak mengandung konflik atau kontradiksi yang radikal dan fundamental. Idealisme keagamaan tidak perlu tumpang tindih dengan idealisme kebangsaan, bahkan sebaliknya harus saling memperkuat dan memperteguh, sehingga keduanya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Terlepas dari masalah *agama qua agama*, persoalan timbul terutama disebabkan oleh manusia yang beragama. Seorang manusia yang beragama sekaligus juga bermasyarakat, berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Manusia ini pula yang secara potensial dapat memilih mana yang kurang baik, mana yang baik, dan mana yang lebih baik. Kenyataan ini sekali lagi mengamanatkan perlunya suatu realisme yang kritis kreatif di dalam mengarungi hidup dan kehidupan, termasuk hidup dan kehidupan beragama.

dalam Pembukaan Rakernisgab Mahkamah Agung dan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, tanggal 21 Maret, dalam *Pelita*, 23 Maret 1985; juga tulisan Abdurrahman Wahid, "Masa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa," *Prisma*, No. Ekstra, 1984, Th. XIII.

Kelas Menengah Sebagai Kelompok Strategis

Medelina KUSHARWANTI

PENGANTAR

Filsuf Aristoteles mengemukakan bahwa setiap negara, terdiri atas tiga lapisan masyarakat yaitu lapisan masyarakat yang kaya sekali, lapisan yang sangat miskin dan lapisan masyarakat yang berada di antara dua lapisan itu. Selanjutnya dinyatakan bahwa suatu negara yang kuat harus dibangun dalam pemerataan dan kesamaan, ini dapat terwujud jika sebagian besar warga negara berasal dari kelas menengah karena kelas menengah merupakan lapisan yang paling aman, mereka tidak mudah iri atau tidak akan berbuat jahat terhadap lapisan masyarakat yang kaya dan tidak ada alasan yang menyebabkan kaum miskin merasa iri atau berbuat jahat terhadapnya. Oleh karena itu masyarakat politik yang terbaik berasal dari kelas menengah.¹ Dalam masyarakat Barat kelas menengah merupakan kelompok potensial dan mempunyai pengaruh besar di lingkungannya. Di Indonesia kelas menengah diharapkan juga dapat berperan sebagai kelompok yang memiliki makna strategis, mempunyai peranan penting dalam perkembangan politik, memiliki kaitan erat dengan kejadian-kejadian sosial yang penuh konflik, serta dapat memberikan reformasi dan lain-lain perubahan penting di dalam masyarakat.

KRITERIA DAN PERAN

Farchan Bulkin menunjukkan bahwa golongan menengah mempunyai arti penting dalam sejarah politik ekonomi Indonesia di jaman kolonial maupun pasca kolonial. mereka telah menjadi pusat-pusat masyarakat untuk berperan ideologi untuk masyarakat secara keseluruhan, di samping juga memiliki dalam kegiatan negara dan dalam mengartikulasikan serta merumuskan

¹Aristoteles, "A Classical View," dalam Reinhard Bendix & Seymour, Martin Lipset (eds.), *Class Status and Power* (California: Berkeley).

wawasan dan kesadaran untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka.² Kendati demikian sampai saat ini kriteria-kriteria ataupun peranan kelas menengah di Indonesia (yang dalam tulisan ini didefinisikan sebagai kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pedagang, ahli hukum dan kelompok profesional lain) ternyata masih menjadi bahan perdebatan di kalangan cendekiawan. Ada yang berpendapat bahwa konsep-konsep kelas menengah Eropa Barat dapat dipakai di Indonesia, sedang yang lain mengatakan jika konsep-konsep kelas menengah di Eropa Barat dipergunakan, maka di Indonesia tidak terdapat kelas menengah. Secara teoretis Soetjipto Wirosardjono mengajukan bahwa kelas menengah ini merupakan motor penggerak terhadap perubahan dan pembaharuan, baik di lingkungan dekatnya maupun di tingkat nasional. Mereka diharapkan menjadi faktor yang mendinamisasi pertumbuhan sosial. Jadi kelas menengah tidak cukup jika hanya dilihat dari kacamata ekonomi saja, tetapi harus diperhitungkan pula kriteria-kriteria sosial politiknya.³ Berangkat dari kriteria-kriteria tersebut maka kelas menengah di Indonesia tipis sekali, sehingga peranannya pun menjadi tidak berarti. Pendapat lain tentang kelas menengah di Indonesia menyatakan bahwa kelas menengah merupakan sekelompok manusia Indonesia yang benar-benar merdeka dalam pandangan, politik, dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan.

Meskipun kriteria-kriteria peranan seperti yang ditentukan di atas belum secara penuh melekat pada fungsi yang saat ini ada pada kelas menengah Indonesia, tidak berarti kelas menengah tersebut menjadi rawan dan lembek, tidak pula berarti kelas menengah Indonesia mudah tergusur oleh eksplosif-eksplosif sosial yang ada, atau sama sekali ditolak keberadaannya.

Melalui jalur ekonomi dengan stratifikasi sosial yang tidak terlalu ketat, kelas menengah ini memiliki peluang besar untuk berkembang dan mengakar. Paling tidak dengan dukungan kuantitasnya, di masa mendatang akan merupakan potensi tersendiri di dalam menghadirkan perubahan-perubahan yang menguntungkan masyarakat.

Konsep kelas berkaitan dengan status, dan kelas sosial berlainan dengan kasta yang dimiliki seseorang karena pembawaan. Kelas sosial menurut R. Brown mencerminkan perolehan seseorang atas dasar kemampuan usahanya. Dengan kata lain mobilitas dalam kelas relatif lebih mudah terjadi dengan determinan utama pada aspek ekonomi. Di samping itu tentu saja mobilitas politik, pendidikan, serta standar hidup merupakan faktor-faktor penting yang menentukan peranan dan fungsi kelas tersebut.

²Farchan Bulkin, "Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian," *Prisma*, No. 2, Februari 1984.

³Soetjipto Wirosardjono, "Memperkuat dan Mempertebal Lapisan Kelas Menengah," *ibid.*

PENEBALAN LAPISAN

Usaha-usaha pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus menerus memberikan pengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia. Dengan mengisi kesempatan-kesempatan yang ada muncul kelompok-kelompok dengan tingkat kehidupan yang lebih baik. Pada tahap ini tampil orang-orang yang berketrampilan dan berpendidikan yang dibutuhkan pada era industrialisasi. Pendapatan kelompok ini meningkat sebanding dengan ketrampilan yang dimiliki. Mereka memiliki peluang dan potensi untuk menyediakan serta mengembangkan sumber daya nasional, dapat pula berfungsi sebagai perumus aspirasi infrastrukural dan aktif di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Akhirnya kelompok ini akan dapat dibedakan dari lapisan bawah dan tidak dapat disamakan dengan lapisan atas. Kelompok inilah embrio kelas menengah seperti yang didefinisikan dalam tulisan ini. Mereka memiliki gaya hidup yang amat mementingkan pendidikan, bakat kewiraswastaan, merebut kekayaan dan tanggung jawab pribadi, mereka sangat terlibat di dalam mengejar keuntungan di bidang komersial industri maupun profesional. Oleh adanya sikap dan harapan yang khas kelompok ini akan memainkan peranan penting dalam menghadapi kehidupan dan bermasyarakat. Saul Gellerman menulis bahwa pada orang-orang dalam kelompok yang disebut "kelas menengah," yang terdiri dari para pedagang, manajer profesional dan para ahli yang digaji, biasanya mempunyai dorongan berprestasi yang jauh lebih jelas dibanding dengan orang-orang dari kelas "lebih rendah" atau "lebih tinggi," sehingga peluang yang sangat besar untuk mencapai sesuatu dengan caranya sendiri menjadi semakin kuat, dan tidak mengherankan bahwa mereka juga akan mengintroduksi anak-anak mereka dengan nilai-nilai prestasi dan mendorong mereka mengembangkan kebiasaan serta sikap yang menguntungkan tersebut.⁴ Akibatnya orang dari kelas menengah "merekrut" banyak anggota yang lebih berorientasi pada prestasi dari kelas pekerja ke dalam tingkatannya sendiri dan sekaligus merangsang keinginan untuk memperoleh hasil terbaik di kalangan anak-anak dan anggotanya. Di sini terlihat bahwa orang-orang tua dari kelas menengah menanamkan seperangkat nilai yang berbeda kepada anak-anak mereka dibanding dengan orang tua dari kelas lain, sehingga generasi selanjutnya akan terpengaruh oleh nilai-nilai kelas yang melahirkannya, setelah mereka mencapai taraf kedewasaannya. Sikap tersebut terbentuk secara menetap, ini menghasilkan pola reaksi atau tingkah laku kelas menengah berbeda dengan kelas lainnya. Secara berangsur-angsur unit-unit keluarga kelas menengah melahirkan para wirausaha dan pengejar prestasi di masa datang. Keluarga-keluarga ini mempersiapkan suatu keluarga ekonomis dan sosial yang khas yang sudah dinikmati oleh orang tua mereka. Bahkan Mc.Cleland dalam studinya mengemukakan bahwa bimbingan dan ajaran yang khas ini menghasilkan kecerdikan dan kelihaian

⁴Saul Gellerman, *Motivasi dan Produktivitas* (Jakarta: PPM, 1984).

tertentu, sehingga secara keseluruhan kelompok ini memiliki "keunggulan" yang membuatnya selalu siap menghadapi dunia yang bersaing.⁵ Secara demikian lambat laun kelas menengah merupakan suatu lapisan yang tebal di dalam masyarakat dan memiliki kedudukan yang mantap. Tidak mudah tersepak oleh formasi-formasi baru. Kalaupun ada formasi baru, maka formasi tersebut justru akan bergabung dan memperkokoh keberadaan lapisan tersebut. Kesamaan gaya hidup dan tingkah laku yang khas akan dapat menjadi alat "pemersatu" kelas tersebut. Seandainya generasi pertama kelompok ini tersingkir karena adanya eksplosi sosial maupun politik, dan tiba-tiba muncul "dinasti baru," bukan berarti muncul kelas menengah yang sama sekali baru atau semi kelas menengah. Sebab sikap, harapan atau tingkah laku yang khas tidak ikut tergusur, dan tetap tertanam kuat pada generasi-generasi selanjutnya, yang pada suatu saat akan muncul kembali ke permukaan.

PENUTUP

Menjadikan atau menganggap golongan menengah sebagai kelompok strategis memang kurang memadai jika hanya dilihat dari kuantitasnya, yang terpenting adalah fungsi dan posisi dalam rangka memperbarui masyarakat sekitarnya. Dari segi ekonomi peran dan fungsi ini mungkin sudah lebih jelas terlihat, misalnya dengan keberhasilan mereka dalam bidang ekonomi, secara tidak langsung turut membantu meningkatkan kesempatan kerja melalui pembukaan usaha-usaha baru, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat lainnya. Bila kelompok ini diharapkan memiliki posisi dan fungsi yang sungguh-sungguh mencerminkan sebagai kelompok strategis, sehingga keberadaan mereka selalu terkait dengan perkembangan dan perubahan struktur sosial, ekonomi maupun politik Indonesia, maka permasalahannya tidak hanya terletak pada pengembangan potensi yang dimiliki kelas ini, namun berkaitan pula dengan sistem-sistem yang lain. Seperti pentingnya struktur sosial politik yang menguntungkan dengan birokrasi pemerintah yang sederhana. Sebab panjangnya birokrasi pemerintah dan kuatnya pengaruh patrimonialisme akan berarti menghambat gerak serta mengurangi kebebasan politik kelas menengah, sehingga akibatnya semakin menjauhkan kelas menengah dari fungsi dan peran yang seharusnya dimiliki. Secara demikian maka kelas menengah perlu diberi kesempatan yang proporsional semacam kekuasaan dan kewenangan tertentu, sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang sejahtera dan makmur, namun juga memiliki identitas dan aspirasi nasional serta mempunyai komitmen tinggi dengan masyarakatnya, atau semacam rasa berbagai kepentingan dengan kelompok lain, yang menjauhkannya dari status quo.

⁵Saul Gellerman, *ibid.*

Kebijakan Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Ekonomi

H. Haryo ASWICAHYONO*

PENDAHULUAN

Alih teknologi sesuai dengan kompleksitasnya memiliki banyak sekali aspek, mulai dari aspek legal, politis, dan tentu saja aspek ekonomis. Dalam melakukan alih teknologi ini negara berkembang dihadapkan pada beberapa masalah pokok yaitu mengenai jenis teknologi yang akan dipilih, saat pengalihan teknologi dan yang tak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menggeluti teknologi tersebut. Ketepatan suatu negara dalam melakukan alih teknologi akan membuahkan sukses di masa depan, tetapi sebaliknya kesalahan dalam alih teknologi akan membawa bencana bagi negara tersebut. Contoh klasik keberhasilan misalnya dapat dilihat sekarang ini pada negara Jepang, Korea dan Taiwan.

Tulisan berikut ini merupakan studi literatur yang berusaha menunjukkan alasan-alasan ekonomis untuk melakukan alih teknologi dan selanjutnya mencari saat yang tepat dalam melakukan alih teknologi.

EKONOMI ALIH TEKNOLOGI

Dalam melakukan alih teknologi timbul pertanyaan-pertanyaan bagi penjual maupun pembeli teknologi. Di pihak penjual pertanyaan yang relevan adalah kapan saat yang tepat bagi penjualan teknologi. Dua hal selalu timbul sekaligus yaitu perolehan-uang sebesar harga teknologi itu $[P(t)]$, tetapi di lain pihak dia kehilangan uang sebesar keuntungan yang diperoleh bila bukan teknologi, melainkan hasil pemanfaatan teknologi tersebut yang dijual. Keun-

*Staf CSIS

tungan tersebut bila dihitung pada tahun ke- t dan biasa dikenal sebagai *expected discounting future profit* (EDFP) penjual teknologi [= $R_1(t)$] yang tergantung pada tingkat gaji, tingkat suku bunga, dan kemungkinan teknologi tersebut menjadi usang pada tahun ke- t (fungsi dari tingkat pertumbuhan teknologi) di negara penjual teknologi. Sudah dapat diduga bahwa penjual teknologi hanya akan menjual teknologinya bila harga jual teknologi tersebut lebih besar dari EDFP-nya. Lebih dari itu, penjual teknologi akan berusaha memaksimumkan keuntungannya sebesar harga teknologinya dikurangi EDFP teknologi di negara penjual teknologi tersebut.

Hal yang sedikit berbeda dihadapi oleh pembeli teknologi karena pembeli teknologi di samping harus membayar harga teknologi, juga harus menyediakan biaya transfer (transfer cost) misalnya penyediaan prasarana, penyediaan tenaga ahli dan lain sebagainya. Biaya transfer ini biasanya semakin kecil dengan berjalannya waktu. Semakin lama semakin mudah memperoleh tenaga ahli, akumulasi pengalaman dan prasarana semakin lengkap sehingga EDFP pembeli teknologi [$R_2(t)$] tergantung dari tingkat gaji, sukubunga, perkembangan teknologi dan biaya transfer. Penundaan alih teknologi di satu pihak akan menimbulkan biaya karena kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut tetapi di lain pihak membawa keuntungan karena berkurangnya biaya transfer. Seperti halnya penjual teknologi, pembeli teknologi hanya akan membeli teknologi bila keuntungan yang diperoleh dengan membeli teknologi (= EDFP pembeli teknologi) lebih besar dari harga teknologi, dan pembeli teknologi juga akan memaksimumkan keuntungannya sebesar EDFP pembeli teknologi dikurangi harga pembelian teknologi.

Karena penjual teknologi berusaha membuat harga teknologinya lebih tinggi dari $R_1(t)$, sedang pembeli teknologi berusaha membuat harga teknologi tersebut lebih rendah dari $R_2(t)$ maka persoalannya adalah tawar-menawar harga. Tingkat harga akan tergantung dari kekuatan tawar-menawar masing-masing pihak, yang dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:

$$P(t) = b.R_1(t) + (1-b).R_2(t) \quad (1)$$

Dalam persamaan ini, b menunjukkan kekuatan tawar-menawar pembeli teknologi.

Karena kedua belah pihak berusaha memaksimumkan keuntungan, maka timbul pertanyaan baru. Mungkinkah alih teknologi tersebut terjadi, dan bila mungkin adakah saat di mana kedua belah pihak memperoleh keuntungan maksimum? Dari persamaan (1) terlihat bahwa alih teknologi hanya akan terjadi bila EDFP pembeli teknologi [$R_2(t)$] lebih besar EDFP penjual teknologi [$R_1(t)$]. Bila $R_2(t)$ sama dengan atau lebih kecil dari $R_1(t)$ sepanjang waktu, maka keuntungan keduabelah pihak akan sama dengan nol atau negatif

sehingga dalam yargon matematik dikatakan bahwa alih teknologi tersebut akan terjadi pada waktu tak terhingga. Bila memang terdapat perbedaan positif antara $R_2(t)$ dan $R_1(t)$ pada tahun-tahun tertentu dan dari persamaan satu terlihat bahwa keuntungan penjual maupun pembeli teknologi akan mencapai harga maksimum pada saat selisih EDFP kedua negara mencapai harga maksimum (saat optimum), sedangkan pembagian keuntungan tersebut hanya tergantung pada kekuatan tawar-menawar masing-masing pihak, sementara kekuatan tawar-menawar kedua belah pihak tetap sepanjang waktu, maka di luar saat optimum tersebut keuntungan pembeli maupun penjual teknologi pasti lebih kecil.

Di atas sudah disebutkan bahwa EDFP merupakan fungsi dari tingkat gaji di negaranya, suku bunga, kemungkinan usangnya teknologi dan biaya transfer. Terlihat bahwa bila faktor-faktor di luar gaji dibuat konstan, maka perbedaan EDFP hanya tergantung dari perbedaan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak dalam pemanfaatan pekerjaanya, sehingga semakin besar selisih gaji semakin cepat teknologi itu sebaiknya dialihkan, dan semakin besar keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak dan sebaliknya. Jika biaya transfer memang menurun dengan berjalannya waktu [katakan fungsi biaya transfer $c(t) = k/(t + 1)$], maka semakin besar biaya transfer (semakin besar k) saat alih teknologi semakin tertunda dan semakin kecil keuntungan yang diperoleh. Kemungkinan usangnya teknologi akan terdistribusi secara eksponensial sepanjang waktu bila proses diketemukannya teknologi baru mengikuti proses poison, sehingga semakin cepat pertumbuhan teknologi, semakin cepat teknologi tertentu menjadi usang. Sifat itu membawa kesimpulan bahwa pertumbuhan teknologi yang cepat akan menunda alih teknologi dan mengurangi keuntungan.

PERAN PEMERINTAH

Di atas sudah disebutkan bahwa pembeli teknologi hanya akan memperoleh keuntungan bila harga teknologi tersebut berada di bawah EDFP-nya. Namun karena kurangnya informasi, atau salah perhitungan bisa terjadi suatu perusahaan membeli teknologi dengan harga di bawah EDFP-nya (misalnya: perusahaan tersebut tidak mengetahui bahwa teknologi tersebut sebentar lagi akan usang, yang berarti salah dalam menghitung pertumbuhan teknologi). Di sini sangat diharapkan peran pemerintah dalam memperluas cakrawala pandang perusahaan sehingga kesalahan di atas dapat dihindari. Walaupun dalam alih teknologi pembeli teknologi maupun penjual teknologi memperoleh keuntungan, namun pembagian keuntungan tersebut sangat tergantung pada kekuatan tawar-menawar masing-masing pihak, seperti terlihat pada persamaan (1), yaitu tergantung pada besarnya b . Kekuatan tawar-menawar ini an-

tara lain tergantung pada keahlian dan ketrampilan dalam melakukan perundingan yang diantaranya berarti mampu menunjukkan kepada penjual keuntungan-keuntungan lain yang bisa diperoleh dari penjual teknologi tersebut, kemudian juga tergantung pada posisi penjual (berada pada posisi monopoli, oligopoli, atau persaingan sempurna) atau pembeli (monopsoni, oligopsoni, persaingan sempurna) di pasar teknologi. Adalah tugas pemerintah untuk memperkuat posisi tawar-menawar (bargaining position) perusahaan-perusahaan yang akan melakukan alih teknologi.

Dapat dilihat bahwa pembahasan di atas hanya membicarakan keuntungan perusahaan dalam melakukan alih teknologi, sedangkan keuntungan sampingan yang diperoleh perusahaan lain dalam mengadopsi teknologi yang sudah dialihkan oleh perusahaan terdahulu (biasa disebut eksternalitas) tidak diperhitungkan. Penundaan alih teknologi yang mempunyai eksternalitas positif berarti mengurangi keuntungan sosial walaupun penundaan itu menguntungkan perusahaan yang telah dibicarakan di atas. Salah satu tugas pemerintah sehubungan dengan hal ini adalah mendorong perusahaan melakukan alih teknologi yang mempunyai eksternalitas positif ke waktu yang lebih dini dengan lebih berpijak pada waktu optimum sosial daripada waktu optimum perusahaan itu sendiri. Salah satu instrumen dapat disebut pemberian suku bunga khusus sehingga industri tertentu terdorong untuk membeli teknologi pada waktu optimum sosial dan keuntungan total yang diperoleh lebih besar.

PENUTUP

Tentu saja pembahasan di atas tidak dimaksudkan untuk menjawab seluruh pertanyaan mengenai alih teknologi khususnya mengenai saat yang tepat dalam alih teknologi karena sifat teknologi itu sendiri yang sangat kompleks. Ambil saja fungsi EDFP terhadap waktu yang disederhanakan sehingga merupakan fungsi kontinyu yang hanya memiliki empat variabel: keuntungan perusahaan yang tergantung pada besarnya gaji, suku bunga, kemungkinan usangnya suatu teknologi pada sepanjang garis waktu dan biaya transfer. Dapat dilihat di situ hanya dimasukkan satu faktor produksi dan yang paling susah diperhitungkan adalah kemungkinan usangnya teknologi, juga asumsi bahwa kekuatan tawar-menawar konstan sepanjang waktu dapat dipertanyakan. Namun demikian, betapa pun sederhana model yang dipakai dalam membuat kebijakan, yang memenuhi syarat efektivitas dan efisiensi, pasti jauh lebih baik daripada tidak mempunyai pegangan sama sekali.

Kerangka Landasan Hukum dan Problematik Dasarnya

Oct. Ovy NDOUK*

Pembangunan nasional kita merupakan pembangunan di segala bidang, antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya saling berkaitan. Sehubungan dengan itu dan guna memungkinkan kita tinggal landas kelak pada Repelita VI, maka bidang hukum yang merupakan salah satu bidang yang luas kaitannya dengan pembangunan itu, memang perlu semakin ditingkatkan pembangunannya sejalan dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH, dalam ceramahnya pada pembukaan Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tanggal 6 Februari 1985, antara lain menyatakan bahwa dalam Pembangunan Lima Tahun IV ini harus diletakkan kerangka landasan hukum yang betul-betul kokoh, yang kemudian dimantapkan dalam Repelita V sebagai bekal tinggal landas kelak dalam Repelita VI.¹ Ini berarti bahwa dalam Repelita IV, yang merupakan tahap penciptaan kerangka landasan pembangunan nasional, kerangka landasan di bidang hukum itu sudah harus menjadi kenyataan (sama seperti bidang-bidang pembangunan lainnya) untuk menyongsong era tinggal landas. Dengan demikian, seyogyanyalah segala daya dan dana yang berkaitan dengan pembangunan di bidang hukum perlu diarahkan kepada pembentukan kerangka landasan hukum itu.

Dalam hubungan itu, Presiden Soeharto juga telah menegaskan dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus 1984, antara lain menyatakan bahwa,

*Staf CSIS.

¹*Sinar Harapan*, 8 Februari 1985.

"... kita juga terus bekerja keras untuk menegakkan kerangka landasan di bidang hukum yang juga sangat esensial bagi kita dalam menumbuhkan negara Pancasila berdasarkan hukum. Sebagai akibat dari kemajuan yang kita capai dalam pembangunan, maka di masa-masa yang akan datang dapat kita bayangkan dari sekarang bahwa masyarakat akan bergerak dan berubah dengan cepat disertai dengan perubahan-perubahan tata nilai. Berbagai macam kepentingan akan bermunculan, yang secara realistik harus kita akui tidak selamanya sejalan satu dengan yang lain. Dalam keadaan demikian perlu ada pengawasan yang efektif, agar semuanya tadi berjalan selaras, tidak saling berbenturan melainkan saling menunjang ke arah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita yang makin mantap dan makin dewasa. Karena itu jika kita tidak menciptakan kerangka landasan yang tahan uji, kukuh dan berdayaguna di bidang hukum, maka kemajuan tadi akan membawa bermacam-macam konflik kepentingan yang berlarut dan penggunaan yang salah dari kekuasaan politik dan ekonomi yang berbahaya. Negara dan masyarakat yang makin maju mutlak memerlukan hukum yang makin maju dan sikap taat hukum di kalangan penyelenggara negara dan di seluruh kalangan masyarakat."²

Berdasarkan penegasan Presiden itu, maka dalam Repelita IV ini kita harus meningkatkan usaha pembangunan di bidang hukum terutama untuk menegakkan kerangka landasan hukum. Hal ini perlu, selain untuk lebih meningkatkan citra negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, juga agar perangkat hukum nasional kita kelak dapat memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan secara keseluruhan, tuntutan kepentingan masyarakat yang terus maju dan berubah seiring dengan makin majunya pembangunan, terutama dalam menghadapi berbagai kepentingan yang bisa saja saling berbenturan satu dengan yang lainnya.

Jadi, usaha untuk meningkatkan pembangunan hukum guna menegakkan kerangka landasan hukum itu memang perlu direalisasikan dalam Repelita IV ini. Sebab, dengan adanya kerangka landasan yang kuat, yang kemudian dimantapkan lagi dalam Repelita berikutnya, diharapkan bahwa pada saat lepas landas nanti perangkat hukum nasional kita, yang akan berwujud suatu Tata Hukum Nasional yang baru, akan mampu memegang peranan utama dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara. Benturan kepentingan tidak perlu terjadi dan perubahan nilai-nilai serta pranata-pranata sosial akan berlangsung tenang tanpa gejolak.

Idealnya memang seperti itu. Akan tetapi, persoalannya tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Sehubungan dengan itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan pembangunan hukum guna menegakkan kerangka landasan hukum. Untuk itu secara berturut-turut akan dibahas tentang pembangunan hukum itu sendiri, problematik dasar kerangka landasan hukum, dan diakhiri dengan penutup.

²Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus 1984, hal. 17-18.

PEMBANGUNAN HUKUM

Repelita IV yang sekarang sedang kita laksanakan, oleh sementara kalangan dinamakan juga sebagai Era Pembangunan Hukum. Maksudnya adalah bahwa dalam kurun waktu lima tahun itu usaha pembangunan di bidang hukum harus benar-benar ditingkatkan lebih daripada masa-masa sebelumnya.

Nampaknya, mengucapkan era pembangunan hukum itu memang mudah. Tetapi, mengisinya sungguh merupakan pekerjaan yang berat. Sebab di sini terkait langsung dengan faktor kemampuan kita untuk merumuskan dan melaksanakan apa saja yang menjadi prasyarat dari era pembangunan hukum itu. Hal ini penting agar dapat mewujudkan tekad kita meningkatkan usaha pembangunan hukum guna menegakkan kerangka landasan hukum.

Untuk itu, kita harus memahami dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan hukum itu. Kita semua mengetahui bahwa pembangunan hukum di negara kita ini sebenarnya telah dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan pembangunan hukum dalam Repelita IV ini, tidak lain merupakan kelanjutan dari usaha pembangunan hukum masa sebelumnya. Hanya saja dalam Repelita IV ini usaha seperti itu akan semakin ditingkatkan dan diarahkan untuk menegakkan kerangka landasan hukum, disesuaikan dengan arah pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebab seperti kita ketahui bahwa Repelita IV ini merupakan era untuk menciptakan kerangka landasan pembangunan untuk tumbuh dan berkembang terus agar kemudian dapat dimantapkan dalam Repelita V, sehingga dalam Repelita VI nanti kita sudah dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Sehubungan dengan usaha meningkatkan pembangunan hukum guna menegakkan kerangka landasan hukum itu, perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan pembangunan hukum itu bukan hanya menyangkut hukum dalam arti sempit saja, seperti peraturan perundangan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran atau tentang hak dan kewajiban warga negara, melainkan mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa hukum yang dimaksud di sini tidak identik dengan Departemen Kehakiman atau Mahkamah Agung. Dan oleh karena itu juga pembangunan hukum itu tidak hanya bidangnya Departemen Kehakiman atau Mahkamah Agung saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka konsep dasar pembangunan hukum yang kita laksanakan sekarang ini adalah pembangunan hukum yang ber-

kaitan dengan seluruh sistem konstitusional dan bukannya hanya terkait dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan konsep dasar inilah kerangka landasan hukum itu akan ditegakkan dalam Repelita IV ini.

Dengan demikian, langkah kebijaksanaan yang ditempuh berkenaan dengan usaha meningkatkan pembangunan hukum itu akan lebih terarah. Dan tentu saja kebijaksanaan itu disesuaikan dengan pedoman yang telah digariskan dalam GBHN 1983, khususnya mengenai landasan dan arah pembangunan di bidang hukum,³ yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat:
 - (1) Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
 - (2) Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.
 - (3) Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.

Akan tetapi, untuk melaksanakan kebijaksanaan seperti itu bukannya tanpa persoalan. Misalnya saja, seperti yang selama ini terjadi, tuntutan kebutuhan masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa, sedangkan ketentuan hukum berkenaan dengan perkembangan itu sudah usang. Ketidakseimbangan ini tentu bisa menimbulkan persoalan jika tidak ditangani secara baik. Yang paling ideal adalah bagaimana mengusahakan agar hukum dan peraturan perundangan lainnya mampu mendahului perkembangan masyarakat tersebut. Namun, harus diakui bahwa untuk menciptakan keadaan seperti itu bukanlah sesuatu hal yang mudah.

PROBLEMATIK DASAR KERANGKA LANDASAN HUKUM

Untuk menciptakan suatu era hukum, di mana hukum memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bangsa dan negara, kiranya memerlukan beberapa persyaratan tertentu. Secara garis besar dapat kiranya dikemukakan bahwa ada tiga unsur utama yang terkait di dalamnya. *Pertama*, tersedianya perangkat perundang-undangan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. *Kedua*, terwujudnya aparatur yang bersih dan ber-

³Lihat *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Ketetapan MPR No. II/MPR/1978), *Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983), *Pola Umum Pelita Keempat, bidang Hukum* (Sekretariat Negara RI), hal. 105-106.

wibawa di samping tangkas, tanggap serta tangguh. *Ketiga*, terciptanya suatu kondisi di mana kesadaran hukum masyarakat secara merata sudah tinggi; suatu keadaan di mana hukum menjadi panutan setiap orang dalam berhubungan satu sama lain.

Jika dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan pembangunan hukum dalam masa Repelita IV ini, maka ketiga unsur utama tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi. Artinya, guna menegakkan kerangka landasan hukum, sebagai prasyarat tinggal landas di bidang hukum, ketiga unsur utama itu sedapat mungkin terpenuhi. Persoalannya adalah apakah ketiga unsur utama (kerangka landasan hukum) itu dapat dicapai dalam tahapan Repelita IV ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, akan dicoba untuk menelaah masing-masing unsur tersebut.

Perangkat Perundang-undangan

Seperti diketahui, sampai saat ini sebagian dari peraturan perundangan kita adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Peraturan perundangan tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini diperlukan untuk menjaga jangan sampai timbul kekosongan hukum dalam negara yang baru merdeka, yang belum tersusun lembaga-lembaga perundang-undangannya dan dengan demikian belum mempunyai undang-undang nasionalnya. Selain itu, Pasal II Aturan Peralihan itu mengandung pula arti berupa instruksi bagi setiap penyelenggara negara untuk secepatnya membentuk peraturan perundangan nasional.

Sebegitu jauh kita sudah berulang kali membuat peraturan perundangan yang baru, namun karena mungkin kurang terencana dan terarah, kita belum berhasil mengganti seluruh hukum kolonial tersebut. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sejalan dengan makin majunya pembangunan, telah menyebabkan peraturan perundangan kolonial itu tidak memadai lagi untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan baru. Oleh karena itu, pembaharuan hukum nasional sudah seharusnya dijadikan sasaran program peningkatan pembangunan hukum dalam Repelita IV ini, guna menegakkan kerangka landasan di bidang hukum.

Bahwa pembaharuan hukum itu perlu dilakukan, Presiden Soeharto dalam sambutannya ketika menerima peserta Rapat Kerja Kejaksaan di Istana Merdeka tanggal 11 April 1985, menyatakan antara lain bahwa pembaharuan dan pengembangan hukum merupakan hal penting yang harus terus-menerus dilakukan. Terlebih-lebih karena kita masih mewarisi hukum dari masa lampau, yang tidak sesuai lagi dengan jaman yang telah cepat berubah. Selanjut-

nya dikatakan bahwa dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum itu, kita harus tetap berpijak pada kepribadian bangsa sendiri. Hukum yang dibangun dengan semangat demikian akan mempunyai akar yang kokoh dalam masyarakatnya sendiri dan akan menjadi kekuatan pendorong bagi laju pembangunan selanjutnya. Dengan cara demikian, hukum akan terasa sebagai bagian dari nilai kehidupan masyarakat yang harus dijunjung tinggi. Bukan sebagai sesuatu yang harus dipatuhi tetapi tidak dimengerti.⁴

Selain perlunya pembaharuan hukum nasional, yang patut diperhatikan juga dari penegasan Presiden tersebut adalah pembaharuan dan pengembangan itu harus tetap berpijak pada kepribadian bangsa sendiri. Ini berarti hukum yang baru itu haruslah memanifestasikan dasar falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila yang telah diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain hukum sebagai suatu kebudayaan harus merupakan suatu refleksi dari cara berpikir, pandangan hidup dan watak/karakter bangsa kita, yaitu Pancasila. Dengan demikian hukum yang baru harus berintikan keadilan yang serasi dan seimbang antara kedudukan dan kepentingan individu dan masyarakat.

Pembaharuan itu tentu saja meliputi semua segi peraturan hukum yang berlaku. Jadi, dapat berupa penggantian ketentuan peraturan perundangan yang lama dengan yang baru, memperbaiki lagi peraturan yang sudah pernah diperbaiki (kalau memang perlu) dan atau membuat peraturan perundangan yang baru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang penting juga adalah bahwa pembaharuan itu tidak hanya berpijak pada kenyataan sekarang tetapi juga menjangkau jauh ke depan sehingga hukum selalu dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pembangunan seiring dengan semakin majunya pembangunan itu.

Jelasnya, Ketua Mahkamah Agung, Ali Said, SH, sewaktu masih selaku Menteri Kehakiman, mengatakan pada Temu Karya Nasional Bidang Hukum yang diselenggarakan oleh DPP Golkar, 21 Mei 1984,⁵ antara lain: Mengenai komponen Hukum Nasional dipikirkan akan terdiri dari dua bagian yakni berupa *hukum-hukum pokok* dan *hukum-hukum sektoral*. Hukum-hukum pokok ialah aturan-aturan hukum yang memuat asas-asas serta prinsip-prinsip yang menyangkut seluruh aspek kehidupan bangsa, dan pada umumnya menyangkut setiap orang. Misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum acara perdata, hukum perdata internasional, dan sebagainya.

⁴Lihat *Suara Karya*, 12 April 1985.

⁵Lihat Ali Said, SH, "Pembangunan Hukum Dalam Pelita IV," *Media Karya*, No. 4, 11 Juni 1984, hal. 13.

Sedangkan hukum-hukum sektoral ialah hukum yang secara khusus mengatur bidang-bidang tertentu. Jika dikaitkan dengan bidang pembangunan nasional, hukum sektoral ini antara lain meliputi hukum yang diperlukan di bidang Ekuin, Kesra maupun Polkam.

Selanjutnya dikatakan bahwa usaha pembentukan hukum-hukum pokok dan hukum-hukum sektoral yang membangun Tata Hukum Nasional yang baru harus dapat dirampungkan dalam masa Repelita IV. Hal ini disebabkan masa tinggal landas pembangunan rakyat Indonesia pada Repelita VI nanti memerlukan adanya kerangka landasan hukum yang kecuali memantapkan hasil-hasil pembangunan, juga dapat menciptakan kondisi kehidupan hukum yang menjamin ketertiban serta kepastian hukum.

Apakah semua peraturan perundangan itu dapat dirampungkan dalam masa Repelita IV ini, kiranya belum dapat dijawab secara pasti. Sebab masih ada waktu untuk bisa berbuat sesuatu. Dan kenyataannya, dalam waktu yang relatif singkat kita telah berhasil menelorkan beberapa peraturan perundangan, antara lain lima undang-undang di bidang politik. Sedangkan sekarang ini, dua RUU di bidang peradilan, yakni RUU Mahkamah Agung dan RUU Peradilan Umum, sedang dalam proses pembahasan, yang juga diharapkan rampung secepatnya.

Sementara itu, kita memang harus berpacu dengan waktu. Untuk itu, mungkin akan lebih berhasil jika daftar skala prioritas yang sudah ada ditinjau kembali. Artinya, bidang-bidang mana yang kiranya perlu diprioritaskan untuk dibangun/diperbaharui. Misalnya, yang menyangkut masalah ketertiban dan keamanan, yang permasalahannya sudah timbul dan mungkin akan lebih berkembang lagi di masa-masa mendatang, sedangkan peraturan yang ada sudah tidak memadai lagi untuk diterapkan. Atau bidang-bidang yang sekiranya bisa menunjang pembangunan nasional baik sekarang maupun di masa mendatang seperti Undang-Undang tentang Pendidikan, Ketenagakerjaan/Perburuhan, dan sebagainya.⁶ Jadi, pada pokoknya masalah skala prioritas ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Ditinjau dari segi kualitas, kebijaksanaan dengan skala prioritas ini penting artinya. Kita tentu saja tidak ingin bahwa peraturan perundangan yang akan dibangun itu hasilnya kurang memadai. Kenyataan menunjukkan bahwa ada peraturan perundangan yang setelah diberlakukan ternyata masih mengandung cacat cela. Oleh karena itu, berdasarkan skala prioritas yang ada pembangunan hukum tetap dilakukan secara bertahap. Dengan demikian,

⁶Lihat Sudibyo Triatmodjo, " Pembangunan Hukum Dalam Pelita IV," *Merdeka*, 16 Maret 1984.

mungkin sebaiknya justru tidak perlu ada sebutan era pembangunan hukum, karena hukum akan terus berkembang sesuai dengan, serta menjaga, perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Di samping persoalan tersebut di atas, salah satu persoalan pokok yang berkaitan dengan usaha meningkatkan pembangunan hukum (peraturan perundangan) itu adalah mengenai pembentukan satu sistem Hukum Nasional yang baru. Jadi, bukannya persoalan tentang apa hukum nasional kita. Hal ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita sejak lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan kemudian pelaksanaannya diselesaikan dengan lahirnya Pembukaan (yang juga mengandung Pancasila) dan UUD 1945. Selanjutnya kita ketahui bahwa berbagai ketetapan MPR telah dikeluarkan, yang pada pokoknya tetap berpegang pada sumber-sumber tersebut.⁷

Usaha pembaharuan peraturan perundangan tersebut di muka, sebenarnya merupakan bagian dari usaha untuk membentuk suatu sistem hukum nasional. Dan sebagaimana telah disebutkan di muka, hukum nasional itu haruslah merupakan refleksi dari cara berpikir, pandangan hidup dan watak bangsa kita yaitu Pancasila. Sehubungan dengan itu dapat kiranya dikatakan bahwa dengan ditetapkan dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jalan ke arah satu sistem hukum nasional sudah mulai dirintis secara mendasar.

Berbicara mengenai sistem hukum nasional tentunya tidak terlepas dari persoalan apa yang dinamakan unifikasi dan kodifikasi. Sebab dasar dari satu sistem tersebut menghendaki adanya unifikasi dan kodifikasi dari hukum kita.

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan hukum sekarang ini, unifikasi atau keseragaman hukum seharusnya dijadikan tujuan atau sasaran akhir dari pembangunan hukum itu. Sebab secara teoretis, unifikasi hukum itu akan dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat. Namun tentu saja semua itu tergantung juga pada kesiapan dan kemampuan kita untuk menyeragamkan hukum itu.

Jadi, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana usaha penyeragaman itu dilakukan. Sebab harus disadari bahwa di dalam usaha mencapai kesera-

⁷Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Pancasila merupakan Sumber Dari Segala Sumber Hukum; dan sesuai dengan sistem Konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Authentik UUD 1945, UUD 1945 adalah bentuk Peraturan Perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bawahan dalam Negara.

gaman itu kita akan dihadapkan pada kenyataan tentang adanya bidang-bidang hukum yang kiranya masih sulit untuk diseragamkan. Bidang-bidang seperti itu dapat dikategorikan sebagai bidang yang sifatnya "sensitif." Hal ini disebabkan adanya sifat kebhinnekaan yang tersebar di tanah air kita, akibat perbedaan daerah, suku maupun agama. Hal-hal seperti ini harus benar-benar dipertimbangkan, dan oleh karena itu penyeragamannya memang harus dilakukan secara bertahap, dan dimulai dengan hal-hal yang sifatnya "administratif."⁸

Selain itu, ada bidang-bidang hukum yang dapat dikategorikan sebagai bidang yang sifatnya "netral." Bidang-bidang ini pada umumnya adalah hukum publik, khususnya hukum administrasi, hukum acara dan segala hukum yang mengatur perihal tata cara atau formalitas-formalitas, yang kiranya mudah dikembangkan dengan cepat dan menurut pertimbangan "efficiency." Oleh karena itu penyeragamannya kiranya akan lebih mudah dilaksanakan, walaupun kadangkala ada peraturan perundangan setelah diberlakukan ternyata masih mengandung kekurangan. Persoalan yang disebutkan terakhir ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, agar penyeragaman itu dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Dalam pada itu, sebagaimana telah disebutkan di muka, salah satu sasaran dari usaha meningkatkan pembangunan hukum guna menegakkan kerangka landasan hukum (bidang peraturan perundangan) adalah mengadakan kodifikasi hukum nasional, yakni pembukuan atau penghimpunan dalam suatu perangkat perundang-undangan. Hal ini memang perlu dilakukan sebab untuk melaksanakan unifikasi kita memerlukan kodifikasi terlebih dahulu. Jadi, kodifikasi dan unifikasi ini merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena kita tidak akan membuat beberapa undang-undang mengenai satu materi yang sama untuk setiap daerah. Suatu kodifikasi harus bersifat "nation-wide."⁹ Pelaksanaannya, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan skala prioritas sebagaimana telah diuraikan di muka. Dan yang terpenting juga adalah bahwa peraturan perundangan yang dikodifikasi itu harus selalu sesuai dengan tuntutan jaman dan keadaan.

Sebagai catatan tambahan tentang unifikasi dan kodifikasi ini, patut kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka pembentukan satu sistem hukum nasional yang baru, yang dasarnya adalah pandangan hidup dan watak bangsa Indonesia yakni Pancasila, perlu dipikirkan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, bagaimana dengan kesiapan kita untuk melaksanakannya secara konsekuen;

⁸Lihat Prof. Subekti, SH, "Beberapa Penikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang," *Hukum dan Keadilan*, No. 9, tahun VII, September-Oktober 1979, hal. 42-43.

⁹*Ibid.*, hal. 43.

kedua, apakah unifikasi dengan kodifikasi itu dapat diterapkan dalam masyarakat kita yang majemuk ini.

Aparatur Pelaksana

Adanya peraturan perundang-undangan yang baik belum merupakan jaminan bagi terlaksananya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya jika tidak ada aparatur yang bisa diandalkan untuk melaksanakannya dengan baik. Ini berarti aparat pelaksana merupakan faktor yang dominan dalam menegakkan kehidupan hukum. Oleh karena itu posisi aparatur pelaksana ini sangat menentukan terutama jika dikaitkan dengan usaha pembangunan satu Sistem Hukum Nasional yang baru.

Sehubungan dengan itu, pertanyaan klasik yang muncul adalah bagaimana mewujudkan aparatur yang bisa diandalkan tersebut. Untuk sementara ini jawaban yang ada ialah dengan cara melakukan pembinaan. Cara ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena kita semua mengetahui bahwa pembinaan itu telah dilakukan juga jauh-jauh sebelumnya. Namun, hasilnya mungkin belum cukup memuaskan. Karena itu tidak mengherankan jika dalam Repelita IV ini pembinaan tersebut diusahakan untuk ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan program-program pembinaan yang lebih terpadu dan terarah.

Kita tentu sependapat dengan maksud baik tersebut agar kegagalan di masa lalu bisa diperbaiki dalam masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apalagi dalam Repelita IV ini kita bertekad untuk menegakkan kerangka landasan pembangunan nasional termasuk di bidang hukum, agar siap tinggal landas dalam Repelita VI. Namun demikian, keberhasilan program pembinaan itu masih sulit diduga. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana agar pembinaan itu berhasil. Sebab keberhasilan itu akan menentukan apakah kerangka landasan di bidang hukum dapat ditegakkan dalam Repelita IV ini.

Untuk itu pembinaan harus ditujukan kepada semua aparatur pelaksana, seperti penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara), pelayan hukum di bidang kewarganegaraan, keimigrasian, bantuan hukum, dan sebagainya, serta prosedur di bidang hukum maupun bidang administrasi lainnya. Dan yang lebih penting juga, selain memperhatikan segi kuantitas, pembinaan itu lebih ditekankan pada segi kualitas guna membentuk aparatur yang berpengetahuan dan trampil, juga bermoral dan berakhlak tinggi. Hal ini sejalan dengan hakikat pembangunan nasional kita yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, pembinaan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu proses yang hasilnya tidak bisa diharapkan akan dapat terwujud hanya dalam waktu yang singkat. Sehubungan dengan itu, mungkin catatan-catatan berikut ini ada manfaatnya.

1. Karena pembinaan itu merupakan satu proses, maka hasil dari semacam evaluasi yang mungkin telah dilakukan secara periodik, tentang pola, sistem atau program pembinaan, perlu diperhatikan secara serius. Untuk itu, koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan departemen akan sangat penting artinya.
2. Sebagai suatu proses, tentu saja sulit untuk mentargetkan kapan harus diselesaikan seluruhnya. Karena itu pembinaan secara bertahap memang merupakan pilihan yang terbaik. Sejalan dengan itu, maka dalam rangka pembinaan yang terencana, terarah dan terpadu, perlu ditingkatkan upaya perluasan pengetahuan, penebalan kesadaran hukum dan keterbukaan cakrawala aparatur untuk melihat kenyataan yang ada dalam perkembangan kehidupan masyarakat kita saat ini dan tantangan masa depan yang tak terhindarkan. Di samping itu peningkatan aktivitas pengawasan terhadap setiap segi pelaksanaan tugas hendaknya dilakukan secara rutin dan terkoordinasi secara baik demi terpeliharanya sikap disiplin dan tanggung jawab yang sehat di kalangan aparatur.
3. Karena masyarakat kita masih merupakan masyarakat yang "paternalistik," maka sedapat mungkin diusahakan agar para pembina selalu menjadi panutan dari yang dibina, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk dapat mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa, tangkas, tanggap serta tangguh (sebagai salah satu unsur utama dalam menegakkan kerangka landasan hukum) kiranya masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, hal tersebut akan merupakan salah satu persoalan yang akan kita hadapi, terutama jika dikaitkan dengan usaha kita untuk menegakkan kerangka landasan di bidang hukum dalam Repelita IV ini.

Sementara itu, satu hal lagi yang berkaitan dengan pembinaan aparatur tersebut di atas, adalah masalah pembinaan prosedur hukum dan administrasi lainnya. Ada kesan bahwa prosedur yang berbelit-belit menimbulkan citra pelayanan yang buruk di mata masyarakat. Keadaan seperti itu secara tidak langsung juga dapat memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan satu masalah atau mengurus hak dan kewajibannya. Sebaliknya, aparatur pemerintah juga bisa meman-

faatkan keadaan seperti itu demi kepentingannya (timbul apa yang dinamakan uang pelicin, pungli, dan sebagainya). Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur hukum dan administrasi lainnya yang sudah dilaksanakan sekarang ini perlu kiranya ditingkatkan lagi. Hal ini pada gilirannya dapat menunjang usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Terciptanya Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu arah pembangunan dan pembinaan hukum yang penting untuk dilaksanakan adalah mengamankan serta menyelamatkan jalannya pembangunan nasional. Untuk itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka memupuk disiplin nasional perlu terus dilaksanakan.

Kiranya sudah menjadi kenyataan bahwa sampai saat ini tingkat kesadaran hukum masyarakat kita masih berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan baik tingkat pendidikan maupun tingkat kehidupan/status sosial atau hal-hal lain yang bisa mempengaruhi bentuk kesadaran hukum seseorang.

Jika keadaan seperti itu dibiarkan berlangsung terus, sulit untuk mengharapkan tegaknya kehidupan hukum di negara kita ini. Bahkan keadaan seperti itu juga dapat terjadi walaupun kita berhasil dalam melaksanakan pembaharuan hukum nasional dan berhasil pula dalam pembinaan aparatur pelaksana hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu sudah seharusnya jika sekarang ini usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat itu lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam rangka menegakkan kerangka landasan di bidang hukum.

Peningkatan program penyuluhan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini kiranya merupakan pilihan yang cukup baik. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang telah digariskan dalam GBHN 1983 yang menyatakan bahwa usaha-usaha dalam pembangunan dan pembinaan hukum adalah meningkatkan penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam rangka tegaknya hukum, ketertiban, serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Meskipun demikian, harus diakui bahwa cukup sulit untuk membuat masyarakat sadar hukum. Usaha membangun sikap dan perilaku masyarakat yang majemuk ini bukan merupakan pekerjaan yang sederhana. Itulah sebabnya sulit untuk menyatakan bahwa pembinaan kesadaran hukum masyarakat

¹⁰Lihat Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara, *loc. cit.*, hal. 106.

(sebagai salah satu unsur untuk menegakkan kerangka landasan hukum) akan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Yang jelas bahwa hal itu membutuhkan waktu yang lama, terutama karena menyangkut masalah proses pembinaan sikap maupun perilaku seseorang. Karena itu jalan yang terbaik adalah sedapat mungkin diusahakan agar pembinaan itu dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten. Sehubungan dengan itu, mungkin hal-hal berikut ini ada manfaatnya untuk ditelaah.

1. Era pembangunan hukum Repelita IV ini seyogyanya dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan seutuhnya, bukan hanya diartikan dengan banyaknya produk undang-undang. Tegaknya hukum mempunyai korelasi positif dengan semangat, kemauan dan keberanian masyarakat dalam menuntut hak-haknya. Oleh karena itu penyuluhan hukum seyogyanya merupakan program terpadu guna mengembangkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara berdasar atas hukum ini. Jadi, bukan sekedar memberikan informasi tentang bunyi ketentuan undang-undang saja kepada masyarakat.
2. Perlu adanya koordinasi yang tepat untuk menghindari tumpang-tindih penyuluhan hukum, yang selama ini telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Ditjen Agraria, Departemen Pertanian, Departemen Penerangan, LBH dan berbagai perguruan tinggi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
3. Dengan program yang terencana, dan terpadu, sebaiknya penyuluhan itu disesuaikan dengan tingkat kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat kita. Secara teknis penyuluhan untuk sementara ini yang paling baik adalah dengan pendekatan persuasif. Melalui pendekatan seperti ini kita mengharapkan adanya tanggapan yang bersumber dari kesadaran hati nurani, akal kecerdasan dan tanggung jawab sosial dari setiap warga masyarakat untuk menerima kenyataan bahwa mereka hidup dalam satu sistem sosial yang memerlukan toleransi dan pengorbanan demi kepentingan umum.¹¹ Ini merupakan harapan ideal. Namun dalam prakteknya mungkin kenyataannya akan berbeda. Oleh karena itu perlu dipikirkan juga alternatif teknis penyuluhan yang lain.
4. Idealnya, materi penyuluhan adalah seluruh peraturan perundangan yang berlaku. Namun, kalau keadaan belum memungkinkan, sebaiknya dipertimbangkan juga dengan menempuh cara penentuan skala prioritas dan urgensinya bagi masyarakat.

¹¹Lihat Soepardjo Rustam, "Aspek Penegakan Hukum dan Kepemimpinan Pemerintahan," sambutan di depan Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta pada peringatan HUT Kota Jakarta ke-457 tanggal 22 Juni 1984, *Kompas*, 26 Juni 1984.

5. Karena menyangkut proses pembinaan perilaku seseorang, maka selain penyuluhan terhadap orang dewasa, perlu pembinaan sedini mungkin terhadap anak-anak, sebab mereka yang akan menentukan tingkat kesadaran hukum generasi kita di masa mendatang. Untuk itu, khusus bagi anak-anak yang duduk di bangku sekolah (dasar dan menengah), perlu dipikirkan sejauh mana kurikulum dan suasana pendidikan pada umumnya yang ada sekarang ini (terutama yang berkaitan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial) bisa serta-merta menunjang pembinaan seperti itu atau tidak. Demikian juga halnya dengan kegiatan ekstra kurikuler yang telah dilakukan selama ini.
6. Program Jaksa Masuk Desa kiranya merupakan bagian dari usaha penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, untuk melanjutkan dan meningkatkan program seperti itu, mungkin perlu ditelaah kembali apakah pesan yang disampaikan melalui program itu telah tepat atau belum, dan bagaimana tanggapan masyarakat. Sehubungan dengan itu, apakah Program ABRI Masuk Desa juga membawa pesan seperti itu.
7. Wibawa aparat pemerintah khususnya aparat penegak dan pelayan hukum tidak berdasarkan kekuasaannya tetapi rasa keadilannya yang tampak dalam tindakannya. Kesadaran hukum masyarakat akan berkembang baik apabila adilnya hukum diutamakan dan bukannya memberikan kesan untungnya hukum bagi penguasa atau orang/kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, para abdi negara dan masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi dan mampu menjadi teladan masyarakat sekitarnya dalam mematuhi hukum.

PENUTUP

Sebagai penutup dapat kiranya dikatakan bahwa tantangan yang kita hadapi untuk mengisi era pembangunan hukum ini sungguh berat. Apalagi kalau targetnya adalah menciptakan kerangka landasan hukum yang siap pakai pada saat tinggal landas nanti. Hal ini bukan saja karena kita selalu dikejar oleh waktu, tetapi juga karena sulitnya kita merumuskan dan mewujudkan sekaligus tiga unsur utama yang terkait dengan usaha menegakkan kerangka landasan hukum itu, yang memang harus dilaksanakan secara terpadu. Sebab ketiga unsur utama itu saling kait-mengait satu dengan yang lain.

Oleh karena itu sebaiknya penyebutan masa Repelita IV ini sebagai era pembangunan hukum tidak perlu dijadikan harga mati. Apalagi karena

hukum itu sebenarnya akan terus berkembang mengantar dan menjaga perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa pembangunan hukum itu seyogyanya berlangsung terus sesuai dengan perkembangan itu. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana usaha kita menghadapi tantangan untuk mewujudkan satu Sistem Hukum Nasional yang baru bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan ditetapkan dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jalan dan iklim politis, ideologis dan kultural ke arah itu telah mulai dirintis. Tinggal bagaimana kita menjabarkannya di dalam pembangunan tata hukum kita. Sebab hukum nasional itu haruslah merupakan refleksi dari cara berpikir, pandangan hidup dan watak bangsa kita, yakni Pancasila.

Proses itu, tentu saja memerlukan adanya partisipasi. Sebab berhasil atau tidaknya usaha pembangunan dan pembinaan hukum itu tidak hanya tergantung pada bagaimana usaha pemerintah, tetapi juga pada bagaimana perkembangan seluruh masyarakat. Pemerintah beserta segenap aparatnya secara struktural melaksanakan tugasnya untuk membangun dan membina hukum. Namun usaha-usaha tersebut akan lebih berhasil apabila dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pemuda dan Tantangannya

BABARI*

PENGANTAR

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Hal ini berarti secara khusus PBB memberikan perhatian yang besar kepada para pemuda di seluruh dunia. Tema Tahun Pemuda Internasional yang dicanangkan oleh PBB adalah: Partisipasi, Pembangunan dan Perdamaian. Bagaimana menjabarkan tema itu agar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan para pemudanya.

Di negara kita gema Tahun Pemuda Internasional itu juga bergaung. Pemerintah cq. Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga juga membentuk Panitia Nasional Tahun Pemuda Internasional di Indonesia. Salah satu programnya yang sudah terlaksana adalah menyelenggarakan Pertemuan Pengusaha Muda ASEAN di Jakarta tanggal 12-15 Agustus yang baru lalu. Panitia nasional juga merangsang agar masing-masing himpunan/kelompok pemuda melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi, profesi, dan minat di lingkungannya masing-masing. Harapan kita dari semua kegiatan itu, para pemuda dapat melakukan refleksi diri, menginventarisasi tantangan yang dihadapi pemuda saat ini dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang serta menetapkan langkah-langkah antisipasi masalah-masalah kepemudaan di masa mendatang.

Dalam melakukan refleksi diri ini para pemuda harus mampu menempatkan tonggak-tonggak sejarah yang menunjukkan kesuksesan perjuangan pemuda di masa lalu pada proporsi dan kurun waktunya. Hal ini dimaksudkan agar pemuda masa kini tidak memberikan bobot nilai yang berlebihan

*Staf CSIS.

pada semua kesuksesan itu sehingga timbul keinginan untuk membanggakan kesuksesan itu semata dan lupa memikirkan tata cara dan strategi untuk menghadapi tantangan pemuda kini dan di masa datang. Pemuda bukanlah kelompok orang yang mengagung-agungkan masa lampau sehingga tenggelam dalam nostalgia, tetapi adalah orang yang berusaha mengenal masa lampau dengan maksud untuk mengetahui keadaan pemuda masa kini dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Inilah makna refleksi diri bagi pemuda.

Pemuda yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sekelompok manusia yang berusia sekitar 15-30 tahun. Dalam kurun usia seperti ini tantangan yang dihadapi oleh para pemuda adalah sebagai berikut: (1) kesempatan kerja, bagi mereka yang telah tamat atau drop out dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Pertama; (2) kesempatan untuk memperoleh tempat di Perguruan Tinggi bagi para pemuda yang ingin melanjutkan studinya; dan (3) wadah sebagai sarana pembinaan dan pengembangan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya serta berperan dalam proses pembangunan negara bangsa. Tantangan dimaksudkan sebagai suasana kehidupan dalam masyarakat yang tidak memberikan peluang kepada pemuda untuk mewujudkan diri sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Tulisan ini mencoba menelaah tantangan itu dan mencoba memberikan jawaban terhadap tantangan itu berupa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemuda.

KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja mempunyai kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari angkatan kerja. Keseimbangan di antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menunjukkan tingkat daya serap kesempatan kerja. Makin tinggi daya serap kesempatan kerja yang ada berarti semakin besar jumlah pencari kerja mendapat pekerjaan. Hal ini berarti memperkecil jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Sedangkan apabila daya serap kesempatan kerja semakin kecil jumlahnya maka jumlah angkatan kerja yang menganggur akan semakin besar. Sebagai contoh kita lihat keadaan angkatan kerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tahun 1985. Menurut perhitungan tahun 1985 angkatan kerja yang terdaftar sedang mencari pekerjaan berjumlah 2.476.219 orang. Kesempatan kerja yang ada sebanyak 2.367.052. Ini berarti ada 109.167 orang tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan (akan menganggur). Sisa tenaga kerja yang belum mendapat kesempatan kerja tahun 1984 sebanyak 100.809 orang. Dengan demikian jumlah tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar di DKI Jaya tahun 1985 sebesar 209.976 orang. Di samping itu tentu masih ada angkatan kerja yang tidak terdaftar di DKI Jaya ini, yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar daripada angkatan kerja yang terdaftar.

Kesempatan kerja yang terbuka untuk menampung pencari kerja meliputi beberapa sektor, yaitu: (1) sektor pemerintah, berupa penerimaan menjadi pegawai negeri dan anggota ABRI; (2) sektor industri; (3) sektor pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta; (4) sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan; (5) pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui proyek Antar Kerja Antar Negara (AKAN); dan (6) sektor kewiraswastaan yang meliputi perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan kegiatan-kegiatan informal lainnya.

Sektor pemerintah menyediakan kesempatan kerja yang sangat sedikit jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh formasi yang ada telah terisi semuanya, sehingga pengangkatan pegawai baru hanya untuk mengisi pegawai negeri yang pensiun atau meninggal dunia. Di samping itu berdasarkan pengamatan sementara di beberapa departemen/instansi pemerintah terlihat adanya kelebihan tenaga kerja, sehingga mereka hanya bekerja sungguh-sungguh dalam waktu yang terbatas dan sisa waktunya dipergunakan untuk santai bersama teman-temannya. Terjadilah pengangguran terselubung atau setengah pengangguran. Mengingat sektor ini menjadi pilihan pertama para pencari kerja dan proses masuknya biasanya berdasarkan pada koneksi dan "uang pelicin" maka dapat diperkirakan bahwa jumlah tenaga kerja yang setengah menganggur atau penganggur terselubung di sektor ini akan terus bertambah setiap tahun.

Pertumbuhan industri-industri sejak Pelita I sampai dengan Pelita III cukup menggembirakan para pencari kerja. Daya serap tenaga kerja di sektor ini diperkirakan sekitar 10-15% angkatan kerja kita. Ini berarti sektor ini menempati urutan ketiga dalam hal daya serap tenaga kerja setelah sektor pertanian (50%) dan sektor jasa kemasyarakatan (23-30%). Memasuki tahun 1980-an negara maju dilanda oleh resesi ekonomi. Resesi ini menyebabkan mereka mengurangi atau untuk sementara tidak membeli barang-barang produksi/komoditi yang diekspor oleh negara-negara sedang berkembang. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan industri di negara sedang berkembang termasuk Indonesia mengalami stagnasi, karena harus menurunkan jumlah produksi. Usaha untuk menjaga industri tidak jatuh pailit, beberapa industri seperti tekstil, otomotif, elektronika, kayu lapis, dan timah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tindakan ini berarti memperpanjang barisan para pencari kerja (penganggur). Dengan tindakan PHK ini maka harapan bahwa sektor industri akan menampung banyak tenaga kerja akan semakin sulit untuk menjadi kenyataan.

Sektor pembangunan proyek-proyek pemerintah dan swasta juga membuka kesempatan kerja baru bagi para pencari kerja. Tenaga kerja yang bekerja di proyek-proyek pada umumnya waktu kerja mereka ditentukan oleh

saat mulai dan berakhirnya pembangunan proyek. Ikatan kerja mereka dengan para kontraktor proyek bersifat sementara, maksudnya selama ada proyek yang dikerjakan. Setelah proyek-proyek yang ditangani oleh kontraktor itu selesai dikerjakan tenaga kerja itu dilepaskan dan mereka kembali menjadi pencari kerja. Sebagai contoh dapat disebutkan PT Civa, sebuah perusahaan kontraktor di Bogor yang mem-PHK sejumlah tenaga kerjanya dengan alasan pembangunan proyek-proyek sudah selesai.

Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor yang masih memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Di sektor pertanian masalahnya adalah sempitnya tanah untuk bertani. Sensus Penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa di antara 17,5 juta keluarga petani di Pulau Jawa, terdapat 11 juta keluarga petani yang mengusahakan kurang dari 0,5 ha per keluarga. Sempitnya tanah pertanian ini menyebabkan tingkat setengah pengangguran di desa-desa Pulau Jawa cukup tinggi. Akibatnya terjadilah urbanisasi. Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota ini menimbulkan masalah baru di kota, yaitu memperbanyak jumlah pencari kerja yang berusaha untuk merebut kesempatan kerja yang sangat sedikit. Karena itu apabila di desa mereka masih tergolong dalam setengah penganggur maka di kota mereka akan menjadi penganggur penuh. Sedangkan di sektor perkebunan, perikanan dan peternakan lainnya masih dalam proses pengadaan sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri seperti tenaga kerja wanita dan pria ke Timur Tengah, Serawak, dan Brunei Darussalam belum banyak membantu memecahkan masalah tenaga kerja di Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri masih sedikit sekali. Tenaga kerja kita yang dikirim ke luar negeri tidak memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan negara penerima tenaga kerja. Apalagi tingkat pendidikan formal tenaga kerja kita relatif masih rendah. Karena itu mereka sulit bersaing dalam merebut pasaran kerja dengan tenaga kerja dari negara yang lain. Usaha Departemen Tenaga Kerja untuk mendidik tenaga kerja kita di Balai Latihan Kerja dengan ketrampilan-ketrampilan khusus patut dihargai dan didukung sepenuhnya. Di samping itu pemerintah juga mengadakan pengiriman tenaga kerja antar daerah. Maksudnya daerah-daerah yang kelebihan tenaga kerja mengirimnya ke daerah-daerah lain di wilayah negara ini yang memerlukan tenaga kerja. Realisasi dari proyek ini tidak tampak. Apakah proyek transmigrasi juga merupakan salah satu perwujudan dari program pengiriman tenaga kerja ini?

Sektor kewiraswastaan, yang meliputi usaha dagang, jasa kemasyarakatan dan usaha-usaha informal lainnya merupakan medan usaha yang memberikan kesempatan kerja yang luas. Usaha di sektor informal sangat beraneka-ragam,

seperti pedagang kali lima, pedagang keliling, membuka warung, sebagai tukang cukur, sebagai tukang sepatu, tukang loak, dan beberapa jenis usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tahu, kue, es mambo, tukang jahit, tenun, serta kerajinan tangan lainnya. Kegiatan usaha sektor informal ini umumnya sederhana, modalnya kecil, tidak memiliki izin usaha sehingga untuk memulai usaha ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan memulai suatu usaha formal seperti mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Yang perlu dimiliki oleh seorang yang bekerja di sektor informal adalah kemauan untuk bekerja keras, kemampuan untuk mengelola modal dan setiap keuntungan yang diperoleh tidak dihabiskan tetapi diinvestasikan, bersikap hemat dan kreatif.

Namun demikian sektor yang terakhir ini sangat kurang menarik perhatian para pencari kerja. Mereka lebih senang memilih menganggur daripada memulai suatu usaha di sektor informal. Kesempatan kerja yang dicarinya adalah di sektor formal meskipun mereka mengetahui bahwa daya serap tenaga kerja di sektor itu sangat sedikit. Suasana inilah yang menantang pemuda untuk memberikan jawabannya. Pemuda sebagai bagian terbesar dari angkatan kerja yang berusia antara 15-30 tahun, berpendidikan menengah atau tinggi, yang mencari pekerjaan untuk pertama kali, dan belum memiliki ketrampilan tambahan atau pengalaman kerja.

KESEMPATAN MEMPEROLEH TEMPAT DI PERGURUAN TINGGI

Setiap tahun ajaran baru, kita selalu mengalami kenyataan bahwa besarnya jumlah lulusan SLTA yang ingin melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi tidak sebanding dengan jumlah tempat yang tersedia, baik di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Oleh karena itu setiap akhir masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya bertambah besar. Penambahan jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan setiap tahunnya juga tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia terutama di sektor kerja yang formal. Akibatnya jumlah pengangguran, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan masih terus berusaha mencari pekerjaan akan meningkat.

Oleh karena itu perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di perguruan tinggi perlu diupayakan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilaksanakan saat ini adalah pembukaan Universitas Terbuka. Perhatian yang sungguh-sungguh perlu diberikan pada pengembangan Universitas Terbuka ini, sehingga terbentuklah masyarakat belajar di tanah air ini. Sebab apabila kemauan masyarakat un-

tuk belajar ini dapat tersalurkan secara baik melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, maka pada saatnya kita dapat mengharapkan akan timbul satu masyarakat yang kreatif, dinamis, dan mampu menghasilkan nilai tambah.

Selain itu pengembangan pendidikan non-formal seperti yang dikemukakan oleh Menteri P dan K, Prof.Dr. Fuad Hassan, perlu benar-benar dilaksanakan. Sebab dengan pendidikan non-formal ini angkatan kerja lulusan SLTA atau yang drop out dapat memperoleh pengetahuan tentang ketrampilan sesuai dengan minat dan pilihannya. Pengembangan pendidikan non-formal ini juga dimaksudkan agar mata pelajaran ketrampilan tidak perlu masuk ke dalam kurikulum sekolah umum. Dengan demikian di sekolah-sekolah umum pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilaksanakan secara lebih intensif. Pengembangan sekolah menengah kejuruan seperti STM, SPG, SMKK, SMEA dan lain-lainnya perlu juga dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga setiap siswa tamatan sekolah kejuruan benar-benar menguasai ketrampilan kejuruannya dan siap memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan ketrampilan kejuruannya itu.

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian dan tanggapan dari pemerintah adalah keluhan masyarakat bahwa perguruan tinggi swasta itu mahal. Selain uang sumbangan yang dipungut pada saat pertama kali masuk di perguruan tinggi swasta, perbedaan besarnya uang kuliah per tahun antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sesuai dengan jenis fakultas rata-rata berkisar di antara 1:20. Maksudnya apabila uang kuliah setahun di perguruan tinggi negeri Rp100,00, maka di perguruan tinggi swasta sudah menjadi Rp2.000,00. Oleh karena itu perguruan tinggi swasta hanya menjadi tempat belajar bagi para mahasiswa yang berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong dalam ekonomi kuat. Disadari bahwa perguruan tinggi swasta juga mempunyai alasan tersendiri dan kuat untuk melakukan hal tersebut. Semua biaya penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi swasta ditanggung oleh yayasan penyelenggaranya sendiri. Pemerintah belum dapat memberikan bantuan berupa subsidi kepada perguruan tinggi swasta selain pengawasan dalam pengakuan status.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan tinggi umumnya dalam proses pengembangan sumberdaya manusia ini maka pengembangannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah ataupun masyarakat luas yang menaruh perhatian pada pendidikan, khususnya dunia usaha sebagai pemakai tenaga kerja. Politeknik perlu dikembangkan di semua perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta yang berkemampuan dapat mendirikan politekniknya. Sehingga dengan demikian perguruan tinggi juga menghasilkan tenaga kerja trampil. Selain itu pembinaan tenaga-tenaga manajer yang ber-

kemampuan mengelola suatu usaha perlu ditangani juga oleh pemerintah melalui pembukaan akademi-akademi manajemen negeri. Hingga saat ini akademi seperti itu kebanyakan dikelola oleh badan-badan swasta sehingga biayanya yang harus dikeluarkan oleh calon mahasiswa sangat mahal.

Kenyataan kurangnya jumlah tempat yang tersedia di perguruan tinggi negeri, mahalnya tempat kuliah di perguruan tinggi swasta, kurangnya jumlah pendidikan terminal tingkat perguruan tinggi (politeknik, akademi) yang dikelola oleh pemerintah merupakan tantangan yang perlu juga dicarikan jawabannya oleh pemuda. Pemuda sebagai bagian dari angkatan kerja perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti itu. Dengan keahlian dan ketrampilan itu pemuda kita dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan mampu menghasilkan nilai tambah dari suatu jenis pekerjaan.

Mengapa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di tingkat perguruan tinggi bagi pemuda perlu mendapatkan perhatian? Jawabannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemuda sebagai bagian dari angkatan kerja perlu memiliki tingkat keahlian dan ketrampilan tertentu, sehingga mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Dengan kemampuan ini diharapkan para pemuda mampu menciptakan pekerjaan sendiri sehingga mampu memberi pekerjaan kepada orang lain, dan bukan hanya sebagai tenaga kerja yang mencari pekerjaan pada orang lain. *Kedua*, pemuda sebagai kader bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Apabila kita menoleh ke belakang sejenak untuk melihat para pemuda pelopor pergerakan (Angkatan 1908, 1928) dan para pemuda pencetus kemerdekaan (Angkatan 1945), kita dapat mengatakan bahwa mereka umumnya adalah pemuda-pemuda yang terdidik pada masanya. Mereka umumnya telah memperoleh pendidikan formal pada jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu sudah seharusnya para pemuda kita memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Hal ini menjadi lebih penting artinya lagi apabila kita mampu mengantisipasi ke masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi industri, teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat menuntut dari kita, terutama para pemudanya, untuk menempatkan diri secara benar dalam proses perkembangan ini. Untuk itu pemuda harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Pemuda yang diharapkan akan menjadi pemimpin di masa depan harus mulai membina diri saat ini juga melalui jenjang pendidikan formal yang terendah sampai yang

tertinggi. Sehingga dengan demikian di masa depan akan timbul generasi pemimpin baru yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

WADAH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

Disadari bahwa dewasa ini wadah pembinaan dan pengembangan pemuda sudah ada dan bahkan ada kesan bahwa sudah terlalu banyak. Ada wadah pembinaan dan pengembangan pemuda yang dibentuk oleh pemerintah seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, PKK, dan AMPI; ada organisasi pemuda yang di masa lalu dikenal dengan organisasi massa seperti Pemuda Katolik, Pemuda Ansor, dan lain sebagainya; ada organisasi mahasiswa ekstra-universiter seperti PMKRI, HMI, GMNI, GMKI, dan PMII; ada organisasi intra-universiter seperti Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), Senat Mahasiswa; Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis, dan BPM. Ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), KUKMI, dan organisasi fungsional serta profesional pemuda lainnya.

Masalahnya, adalah apakah semua organisasi pemuda telah menjalankan fungsi/perannya secara benar dan optimal dalam membina dan mengembangkan potensi pemuda, sehingga benar-benar menjadi riil dan para pemuda mampu menolong dirinya sendiri. Jumlah pemuda yang sangat besar dalam struktur kependudukan kita apabila dapat dibina dan digunakan sebagai tenaga kerja produktif merupakan modal pembangunan yang besar. Dewasa ini kita lihat hampir semua organisasi pemuda yang memiliki program-program pembinaan dan pengembangan pemuda hanyalah merupakan dokumen tertulis yang akan menjadi bahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap konperensi/kongres pemuda dan bukan untuk dilaksanakan secara benar dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu para pemuda merasa bahwa semua organisasi pemuda yang ada tidak mampu memecahkan masalah yang menantang pemuda saat ini, seperti sempitnya kesempatan kerja, kurangnya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, tidak ada ketrampilan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada, tidak ada modal untuk memulai suatu usaha, dan tidak ada dana yang dapat dipakai untuk membiayai pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

Semua masalah itu perlu dipecahkan oleh para pemuda secara nasional. Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap masalah pemuda. Hal ini terlihat dengan adanya Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga. Pemerintah telah membangun Graha Pemuda sebagai tempat para pemuda mendiskusikan dan memecahkan masalah pemuda. Rupanya sampai saat ini semua itu belum berjalan seperti yang diharapkan dan seharusnya terlaksana. Rupanya hingga saat ini kita belum mempunyai kebijaksanaan nasional ten-

tang kepemudaan yang menyeluruh dan terpadu. Kebijakan yang mampu memecahkan masalah kepemudaan saat ini dan mampu mengantisipasi masalah kepemudaan di masa depan.

GBHN 1983 tentang Generasi Muda telah memberi arah pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai kader pembangunan negara bangsa. Masalahnya adalah bagaimana ketentuan dalam GBHN itu dituangkan dalam satu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan. Bersumberkan pada kebijaksanaan itu disusun rencana kerja, program-program kerja yang operasional dan dapat dilaksanakan sehingga terasa manfaatnya oleh pemuda di seluruh wilayah tanah air kita. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat kebanyakan pemimpin organisasi pemuda saat ini hanya dapat berbicara dengan bahasa slogan dan semboyan-semboyan yang muluk-muluk tetapi tidak terwujud dalam karya nyata. Kegagalan proyek desa pemuda, transmigrasi pemuda, merupakan petunjuk bahwa kita belum memiliki kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan, yang dalam tahap perencanaan dan penyusunan programnya dilakukan secara terpadu dengan instansi pemerintah lainnya.

PENUTUP

Pemuda harus mampu memberikan jawaban terhadap tantangan yang dihadapinya saat ini dan di masa depan. Pemuda Angkatan 1908, 1928, telah berhasil menghadapi tantangan terhadap pemerintahan kolonial dan mampu menyatakan kemerdekaan serta mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Angkatan 1945 mampu mempertahankan kemerdekaan negara bangsa dalam perang kemerdekaan dan melakukan kegiatan mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara berencana dan bertahap. Oleh karena itu pemuda yang menyebut dirinya Angkatan '66 ataupun sesudahnya harus mampu menjamin pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara berkesinambungan.

Dalam proses pembangunan ini telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan itu terjadi akibat pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakatnya. Perubahan yang terjadi itu menuntut kepada para pemuda dan generasi muda umumnya untuk menguasai ketrampilan-ketrampilan sehingga mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara konstruktif dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu para pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan sekarang ini ataupun di masa yang akan datang harus mulai dengan membina diri sendiri, yaitu dengan jalan membaca dan belajar.

Agar hal ini dapat terwujud maka sarana dan prasarana untuk membaca dan belajar ini perlu disediakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah cq. Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga yang menjalin kerjasama dengan Menteri P dan K, Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, dan Menteri Transmigrasi. Kerjasama ini perlu diatur dalam satu koordinasi yang fungsional dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Hingga saat ini masalah koordinasi kerjasama di lingkungan departemen-departemen pemerintahan tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan dan sulit terwujud dalam pelaksanaan kerja nyata.

Sambil menunggu perwujudan kerjasama antar departemen pemerintah ini para pemuda melalui organisasi-organisasi pemuda yang ada membangun masyarakat informasi melalui karya nyata pemuda, yaitu mendirikan perpustakaan pemuda sampai di tingkat desa. Sebab hanya pemuda yang memiliki kesadaran dan minat untuk membaca dan belajar adalah pemuda yang mampu menjawab tantangannya secara kritis dan konstruktif.

Pendayagunaan Wadah Remaja

BABARI*

PENGANTAR

Remaja merupakan sekelompok manusia yang berada dalam proses peralihan. Peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Masa ini berkisar di antara usia 9/10 tahun sampai dengan 19/20 tahun untuk wanita dan 11/12 tahun sampai dengan 21/22 tahun untuk lelaki. Masa ini juga disebut masa puber dan setelah masa itu disebut masa adolescence serta seterusnya menjadi manusia dewasa. Di dalam kurun waktu usia remaja ini terjadi banyak perubahan-perubahan di dalam diri remaja. Perubahan itu terlihat dalam perkembangan fisik berupa pertumbuhan dalam ruas-ruas tulang yang semakin panjang sehingga si remaja itu bertambah cepat tinggi badannya. Di samping itu pertumbuhan hormonnya mencapai kesempurnaan dalam arti para remaja telah mampu meneruskan keturunan apabila mereka melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Remaja juga mengalami perkembangan emosi. Hal ini terlihat dalam upayanya yang selalu mencari identitas diri dan pengakuan dari masyarakat sekitarnya. Mereka selalu berusaha untuk bersama dalam kelompok kesebayaannya. Hal ini akan menimbulkan rasa kesetiakawanan (solidaritas) di antara mereka. Di samping itu para remaja juga mengalami perkembangan intelektual. Hal ini terlihat dalam sikap selalu bertanya tentang realita hidup, tentang nilai dan norma yang mengatur sikap dan perilaku hidup dalam masyarakat. Mereka mempunyai sikap yang kritis terhadap semua itu. Karena sikap kritis ini mereka mulai menyeleksi nilai dan norma yang akan diekspresi dalam sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari.

Remaja juga merupakan sekelompok manusia yang tengah berusaha untuk menemukan dirinya baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam

*Staf CSIS.

kelompok kesebayaan. Dalam proses ini mereka melakukan sosialisasi diri dan komunikasi. Hal ini terjadi di dalam lingkungan rumah tangga/keluarga, sekolah, dan organisasi remaja, baik yang terdapat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Organisasi remaja sebagai wadah yang menghimpun para remaja ini perlu didayagunakan kehadirannya sehingga dirasakan manfaatnya oleh para remaja. Tentu yang dimaksudkan dengan pendayagunaan adalah menjadikan wadah penghimpun para remaja itu sebagai salah satu sarana penunjang pembentukan remaja, baik secara individual maupun secara bersama-sama dalam kelompok kesebayaan untuk menjadi pemuda atau manusia dewasa yang berdedikasi dan bertanggung jawab baik untuk dirinya sendiri, masyarakatnya, dan negara bangsanya.

Masalahnya, adalah apakah wadah-wadah yang menghimpun remaja yang ada sekarang di dalam kehidupan masyarakat kita telah mendayagunakan kehadirannya secara optimal dalam hal pembentukan dan pengembangan potensi remaja untuk menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan dan maksud keberadaan wadah/organisasi remaja itu? Sejauh pengamatan penulis, wadah/organisasi yang menghimpun remaja belum mampu menjabarkan tujuan dan maksud organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya ke dalam perencanaan yang selanjutnya dituangkan dalam program kerja organisasi. Akibatnya hampir semua wadah/organisasi remaja keberadaannya hanya terlihat pada papan nama organisasi tetapi tidak mempunyai kegiatan apa pun yang berhubungan langsung dengan kepentingan remaja. Secara deskriptif tulisan ini mencoba menguraikan tentang wadah/organisasi remaja yang ada dan selanjutnya memberikan sumbang-saran sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan wadah/organisasi remaja ini sebagai sarana pengembangan potensi remaja.

WADAH/ORGANISASI REMAJA

Wadah/organisasi remaja merupakan sarana yang menghimpun para remaja atas dasar sukarela, menerima asas, tujuan, dan maksud organisasi itu serta mampu bekerjasama guna mencapai tujuan dan maksud organisasi. Oleh karena itu tujuan dan maksud organisasi yang tercantum dalam AD/ART organisasi harus dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Organisasi dan kemudian dijabarkan secara terperinci dalam Program Kerja Organisasi. Berdasarkan pada Program Kerja Organisasi itu para pengurus organisasi mulai menggerakkan kegiatan organisasi itu berupa kegiatan/kerja nyata para anggota organisasi itu. Kegiatan nyata inilah yang menunjukkan tingkat partisipasi para anggota organisasi pada organisasinya. Tingkat partisipasi para anggota dalam melaksanakan kegiatan nyata ini merupakan alat ukur apakah

rencana kerja dan program kerja organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan maksud organisasi itu menampung pendapat dan sesuai dengan keinginan para anggotanya. Maksudnya memenuhi kebutuhan yang menjadi kepentingan bersama para anggotanya.

Dewasa ini telah ada begitu banyak wadah/organisasi remaja. Kita dapat mengelompokkannya sebagai berikut. *Pertama*, wadah/organisasi remaja yang terdapat di lingkungan sekolah, seperti Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS), IKOSIS (Ikatan Keluarga OSIS), dan Pramuka. *Kedua*, wadah/organisasi remaja di luar lingkungan sekolah, seperti Karang Taruna, Pramuka, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, perkumpulan olahraga bela diri, perkumpulan pencinta alam, dan himpunan remaja yang berdasarkan ikatan keagamaan, seperti remaja mesjid, muda-mudi paroki dan lainnya. Di samping itu ada juga remaja-remaja yang tidak terhimpun dalam wadah/organisasi remaja yang ada. Mereka umumnya remaja yang telah bekerja baik di sektor-sektor formal maupun di sektor-sektor informal. Ada lagi remaja yang masih berada dalam status pencari kerja untuk pertama kalinya atau masih menganggur.

OSIS

Organisasi Siswa Intra-Sekolah sudah ada di semua Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas negeri ataupun swasta, serta umum ataupun kejuruan. Pada hakikatnya organisasi ini merupakan wadah untuk membina dan mengembangkan siswa sesuai dengan minatnya dan bersifat ekstra kurikuler. Oleh karena itu kegiatan OSIS di lingkungan sekolahnya terlihat dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga, kesenian, menata lingkungan sekolah yang sehat, dan sewaktu-waktu melakukan karya bhakti kemasyarakatan. Organisasi ini berada di bawah bimbingan para guru pembina OSIS. Sedangkan pemilihan pengurusnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) dan yang mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah. Untuk menjadi calon pengurus OSIS, biasanya sekolah melakukan latihan-latihan kepemimpinan bagi para siswa yang telah menjadi pengurus kelas. Dalam latihan itu mereka diberikan dasar-dasar tentang organisasi, kepemimpinan, dan kesekretariatan.

Apabila demikian maka seharusnya OSIS mampu menumbuhkan semangat kekeluargaan siswa di dalam lingkungan satu sekolah. Dengan semangat kekeluargaan ini para pengurus OSIS seharusnya mampu mengarahkan dan mengawasi sikap dan perilaku para siswa yang menjadi anggotanya. Namun demikian para pengurus OSIS selalu menghadapi kesulitan dalam usahanya membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan siswa ekstra kurikuler.

Hambatan utama adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk itu. Di samping itu rupanya para guru pembina OSIS belum melakukan tugasnya secara baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesibukan para guru itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru bidang studi sehingga waktunya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan OSIS tidak ada lagi.

Hambatan prasarana seperti tanah lapang untuk bermain guna meningkatkan penguasaan teknik dan ketrampilan di bidang olahraga yang merupakan pelaksanaan salah satu program penting OSIS sangat dirasakan oleh para siswa yang bersekolah di kota-kota. Hampir semua SLTP dan SLTA di kota tidak memiliki tempat berolahraga sendiri. Oleh karena itu beberapa sekolah yang berlainan jenis dan tingkat biasanya memakai satu tempat olahraga yang sama milik pemerintahan kota. Di tempat ini biasanya timbul bibit-bibit permusuhan para siswa antar sekolah. Padahal pelajaran olahraga bila dikelola secara benar merupakan mata pelajaran yang mampu membentuk sikap jujur, sportif, dan semangat toleransi antar sesama teman sekolah atau antar sekolah.

Di samping itu di lingkungan sekolah OSIS juga bertugas untuk menegakkan ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan sekolah (5K). Sehubungan dengan ketertiban dan keamanan maka OSIS seharusnya mampu mencegah terjadinya kerusakan atau perkelahian di antara sesama pelajar baik di dalam lingkungan sekolahnya sendiri maupun di luar atau antar sekolah. Selain itu pengurus OSIS harus mengawasi para anggotanya agar selama jam-jam pelajaran berlangsung para pelajar tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah ataupun membolos. Mungkin ini merupakan tugas yang berat bagi pengurus OSIS. Namun apabila dalam melaksanakan tugas itu guru pembina OSIS dan Kepala Sekolah turut memberikan dukungan kepada pengurus OSIS maka tugas itu akan dapat dilaksanakan oleh pengurus OSIS. Dukungan ini perlu, sebab para pelajar tetap memandang pengurus OSIS sebagai sesama teman sekolahnya.

OSIS juga mengkoordinasi kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) di lingkungan sekolahnya. Maksud dari kegiatan itu sangat manusiawi, yaitu menyadarkan para siswa akan pentingnya sikap dan perilaku saling tolong-menolong di antara sesama umat manusia. Namun kegiatan Palang Merah Remaja ini sering kali salah dalam melaksanakan kegiatannya, seperti melakukan pemungutan dana palang merah dari masyarakat dengan cara menyuruh para pelajar mendatangi rumah-rumah penduduk mengedarkan daftar sumbangan dan menjual karcis sumbangan di jalan-jalan yang ramai dilalui oleh kendaraan. Pelaksanaan kegiatan seperti ini tidak mendidik dan tidak manusiawi dipandang dari segi harga diri pelajar sebagai remaja. OSIS juga sering kali mengkoordinasi kegiatan rekreasi dan pengembangan daya kreasi

dan kreativitas pelajar melalui pengadaan majalah dinding ataupun majalah sekolah. Pelaksanaan kegiatan yang terakhir ini perlu ditunjang secara material atau moral oleh sekolah bersama dengan para gurunya.

Apabila semua kegiatan itu dapat dilaksanakan oleh pengurus OSIS bersama-sama dengan para pelajar di lingkungan sekolahnya dan mendapat bantuan dan dukungan sepenuhnya dari Kepala Sekolah bersama para gurunya, maka kehadiran wadah/organisasi OSIS di sekolah-sekolah akan mempunyai arti dalam proses pembinaan dan pengembangan para pelajar di lingkungan sekolah terutama dalam kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler. Hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan oleh sekolah seperti menyediakan tempat untuk pengembangan olahraga, kesenian, dan kreativitas lainnya perlu mendapat bantuan sepenuhnya dari pemerintah setempat. Apabila kemampuan pemerintah untuk itu masih terbatas maka pemerintah perlu menggali potensi yang ada dalam masyarakat untuk ikut menyumbangkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Ini merupakan perwujudan sikap adanya tanggung jawab bersama di bidang pendidikan antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat.

IKOSIS

Ikatan Keluarga OSIS merupakan wadah koordinasi antar OSIS semua sekolah yang terdapat di dalam satu kota. Untuk kota sebesar Jakarta ini maka sebaiknya IKOSIS berada di setiap wilayah kota agar lebih mudah melakukan tugas-tugas koordinasi. Badan ini bertugas melakukan koordinasi kegiatan bersama pelajar antar sekolah. Misalnya melakukan pertandingan olahraga antar sekolah sewilayah, dan perlombaan-perlombaan lainnya. Melalui sarana ini diharapkan hubungan pelajar antar sekolah terjalin sehingga mereka dapat saling mengenal.

Lucunya, sering kali terjadi perkelahian pelajar antar sekolah pada saat penyelenggaraan pertandingan itu. Mungkin hal ini disebabkan oleh keinginan yang besar dari setiap sekolah untuk memperoleh kemenangan. Tetapi di pihak lain kita menyayangkan bahwa peristiwa seperti itu terjadi pada saat penyelenggaraan pertandingan. Sebabnya adalah pertandingan olahraga itu hanya merupakan praktek dari pengetahuan teori olahraga yang diajarkan di dalam kelas. Tentu dalam pelajaran teori olahraga semua guru/pelajar olahraga telah menanamkan beberapa sikap/perilaku yang harus dimiliki oleh setiap olahragawan seperti jujur, sportif, dan menghargai sesama teman dalam pertandingan itu seperti diri sendiri.

Apabila pihak penyelenggara (IKOSIS) sebagai wadah koordinasi dapat menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta per-

tandingan ataupun pertemuan-pertemuan lainnya dan guru-guru pembina OSIS di setiap sekolah mampu mempersiapkan anak didiknya secara baik, maka perkelahian-perkelahian pelajar antar sekolah dalam suasana penyelenggaraan pertandingan ataupun pertemuan lainnya tidak akan terjadi. Agar wadah IKOSIS dapat berperan secara baik maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) IKOSIS sebagai wadah koordinasi perlu menjalin hubungan timbal-balik yang baik dengan OSIS yang berada di setiap sekolah; (2) guru-guru pembina OSIS perlu membina hubungan/kerjasama yang erat dengan para pengurus IKOSIS dan melakukan tugas membina dan mendidik OSIS di sekolahnya masing-masing; dan (3) pengurus IKOSIS perlu memiliki program kerja yang disetujui oleh OSIS di masing-masing sekolah dan diketahui oleh para guru pembina OSIS di sekolah-sekolah.

Dengan cara ini kita mengharapkan agar IKOSIS dapat berperan sebagai wadah koordinasi OSIS yang efektif dan efisien. Maksudnya apabila terdapat indikasi hubungan pelajar antar sekolah yang kurang harmonis, IKOSIS dapat memainkan peranan sebagai penengah atau juru-damai. Ini merupakan tindakan pencegahan. Oleh karena itu para pengurus IKOSIS harus mampu mendeteksi permasalahan para pelajar antar sekolah. Dalam menjalankan tugas ini bantuan dari OSIS masing-masing sekolah sangat diperlukan. Selain itu pengurus IKOSIS dapat juga melaksanakan tugas represif, yaitu ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pelajar antar sekolah. Dengan cara ini kehadiran IKOSIS sebagai wadah koordinasi OSIS antar sekolah sewilayah dapat mempunyai arti.

PRAMUKA

Pramuka merupakan salah satu wadah pembinaan dan pembentukan para remaja, baik yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah lagi. Pramuka membina dan mengembangkan sikap/perilaku remaja agar lebih sesuai dengan sikap/perilaku umum yang terdapat di dalam masyarakat. Pramuka merupakan lembaga yang bergerak di sektor ekstra kurikuler dan umumnya menggunakan waktu setelah jam-jam pelajaran selesai untuk latihan kepramukaan. Melalui bermain dan berkreasi di luar lingkungan sekolah dan rumah tangga Pramuka membimbing dan membina para anggotanya untuk menjadi manusia dewasa yang trampil dan bertanggung jawab baik untuk dirinya sendiri, masyarakat sekitarnya, dan negara bangsanya.

Melalui kegiatan berkemah misalnya, Pramuka ingin menanamkan rasa cinta pada lingkungan hidup sekitarnya. Kegiatan mencari jejak dilakukan dengan maksud untuk menanamkan rasa setia kawan dan menyadarkan

bahwa dalam melakukan tugas harus teliti, hati-hati, dan bertanggung jawab. Hampir semua latihan dalam kegiatan kepramukaan dilakukan secara kelompok. Ini dimaksudkan untuk melatih para remaja belajar bekerjasama dalam kelompok. Dalam kerjasama ini peran dari setiap individu harus ditempatkan sebagai bagian dari kelompok, sehingga hasil yang dicapai oleh kelompok merupakan hasil bersama semua anggota kelompok. Melalui latihan kerjasama seperti ini setiap anggota akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya masing-masing.

Hampir semua SLTP dan SLTA di seluruh wilayah tanah air kita telah mempunyai Gerakan Pramuka di sekolahnya masing-masing. Yang perlu dilakukan dewasa ini adalah bagaimana meningkatkan peranan Pramuka ini sehingga keberadaannya di suatu sekolah mempunyai arti terutama dalam hal membantu membina dan mengembangkan kepribadian para pelajar remaja secara ekstra kurikuler. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para guru pembina Pramuka mengingat sebagian besar para pelajar remaja kita belum mampu menggunakan waktu-waktu luangnya untuk suatu pekerjaan yang produktif. Demikian juga halnya dengan Gerakan Pramuka yang terdapat di desa dan kelurahan, yang menghimpun remaja yang sudah tidak bersekolah lagi, baik karena drop-out ataupun yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Lurah dan Kepala Desa bersama dengan stafnya perlu membantu perkembangan Gerakan Pramuka di wilayahnya masing-masing.

KARANG TARUNA

Karang Taruna adalah wadah yang menghimpun para remaja yang terdapat di setiap kelurahan, desa sampai ke tingkat rukun tetangga. Pada mulanya kegiatan Karang Taruna hanya berpusat pada olahraga dan kesenian. Namun dewasa ini kegiatannya diperluas dengan mengadakan pendidikan ketrampilan bagi remaja yang putus sekolah. Oleh karena itu seharusnya Karang Taruna merupakan wadah yang mampu memberikan jawaban konkret terhadap masalah yang dimiliki oleh setiap remaja, yaitu ketrampilan untuk dapat memulai suatu pekerjaan ataupun mencari kerja.

Wadah ini berada di bawah Departemen Sosial. Oleh karena itu Karang Taruna merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan membantu masyarakat sesuai dengan rencana dan program kerja Departemen Sosial. Ini berarti semua kegiatan Karang Taruna harus dibiayai oleh Departemen Sosial, atau departemen lain yang menjalin kerjasama dengan Departemen Sosial. Yang jelas dalam program pembinaan ketrampilan bagi remaja, Departemen Sosial dapat menjalin kerjasama dengan Departemen Tenaga

Kerja yang dewasa ini telah memiliki Balai Latihan Ketrampilan (BLK), Departemen P dan K, Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Apabila koordinasi kerjasama antar departemen ini dapat terlaksana, maka Karang Taruna sebagai pelaksana program di tingkat kelurahan, desa, dan rukun tetangga akan dapat melaksanakan tugas itu.

Dewasa ini kehadiran Karang Taruna kurang dirasakan manfaatnya oleh remaja. Hal ini disebabkan Karang Taruna tidak memiliki program kerja yang spesifik. Kegiatan olahraga dan kesenian bagi remaja sudah dilakukan oleh begitu banyak kelompok-kelompok remaja sendiri-sendiri yang terhimpun dalam kelompok olahraga dan kesenian remaja. Oleh karena itu bila Karang Taruna menginginkan keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh remaja, maka para pengurusnya harus mampu memilih dan melaksanakan kegiatan-kegiatan konkret yang menjawab permasalahan yang dihadapi oleh remaja setempat. Hal ini memerlukan kemampuan pengurus Karang Taruna membaca dan menanggapi kebutuhan remaja setempat baik yang manifestes maupun yang laten.

Organisasi Remaja yang Lain

Remaja selain menghimpun diri dalam wadah/organisasi remaja yang resmi (tercantum dalam GBHN) juga menghimpun diri dalam wadah/organisasi olahraga, kesenian, pencinta alam yang terbentuk atas inisiatif remaja sendiri. Di kota-kota juga ada remaja yang menghimpun diri dalam gang-gang yang bersumber pada semangat setia kawan dan mereka selalu melakukan suatu perbuatan bersama-sama. Di samping itu ada juga remaja yang menghimpun diri sesuai dengan agama yang dianutnya seperti Remaja Mesjid, Muda-mudi Paroki yang bidang kegiatannya lebih bersifat keagamaan. Semua itu merupakan wadah/organisasi yang menghimpun remaja yang juga menjadi tempat sosialisasi nilai dan norma yang akan terpancar dalam sikap dan perilaku remaja setiap harinya. Pada umumnya organisasi remaja jenis ini hanya memusatkan perhatiannya pada satu kegiatan utama, seperti Group Bola Voli Remaja yang menghimpun remaja yang suka bermain voli; Vocal Group yang menghimpun remaja yang senang main gitar dan menyanyi; dan remaja yang menghimpun diri sesuai dengan agamanya memusatkan kegiatannya pada kegiatan yang berhubungan dengan ritus dan ibadah agamanya.

Mengingat wadah/organisasi seperti ini terbentuk atas inisiatif remaja setempat sendiri, maka para remaja lebih bersimpati untuk masuk menjadi anggotanya. Apalagi kalau tokoh remaja yang mengambil inisiatif pembentukannya adalah remaja yang dikenal secara luas oleh masyarakat setempat karena

menguasai salah satu cabang olah raga atau kesenian yang ingin dimasyarakatkannya di kalangan sesama remaja. Oleh karena itu kehadiran mereka di tengah-tengah remaja harus diterima oleh aparat pemerintah setempat dan memberikan perlindungan serta bantuan bila perlu.

Kerjasama antar Organisasi Remaja di Suatu Wilayah

Kerjasama para remaja pelajar yang terhimpun dalam OSIS telah terwujud melalui wadah IKOSIS. Ikatan Keluarga OSIS ini mengkoordinasi semua OSIS yang terdapat dalam satu wilayah, seperti wilayah kota. Melalui IKOSIS ini terjalin kerjasama pelajar antar sekolah. Dengan demikian mereka akan saling mengenal. Melalui proses ini kita mengharapkan agar perkelahian pelajar antar sekolah tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu IKOSIS perlu memiliki program-program kegiatan yang mampu mempertemukan remaja pelajar antar sekolah untuk saling berdialog, berkomunikasi. Caranya dapat melalui kegiatan yang terencana di bidang olahraga, kesenian, perlombaan karang-mengarang, dan kwis remaia.

Untuk itu pengurus IKOSIS harus terdiri dari para remaja pelajar yang selain memiliki jiwa dan semangat memimpin juga harus kreatif dan diterima oleh pengurus OSIS di semua sekolah sewilayah. Oleh karena itu pengurus IKOSIS harus dipilih secara demokratis oleh pengurus OSIS setiap sekolah. Prinsipnya pengurus IKOSIS ini haruslah para remaja pelajar sendiri, dan bukan orang-orang yang sudah tidak berstatus pelajar lagi. Tentu kehadiran para guru sebagai pembina IKOSIS sangat diperlukan. Para guru pembina ini perlu meluangkan waktunya untuk melakukan tugas-tugas pembinaan ini. Agar tugas membina ini dapat dilakukan oleh guru pembina secara baik dan bertanggung jawab maka kepala sekolah sebaiknya mengatur agar jumlah jam pelajaran seminggu bagi mereka dikurangi. Misalnya jumlah jam kerja seorang guru yang mengajar di SLA seminggu adalah 24 jam, maka bagi guru yang mendapat tugas membina OSIS atau IKOSIS adalah 16 jam. Hal ini dimaksudkan agar waktu 8 jam pelajaran itu dipergunakan oleh para guru pembina untuk melakukan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan OSIS atau IKOSIS.

Pramuka sebagai satu organisasi yang menghimpun remaja dan yang telah memiliki struktur organisasi yang mantap perlu meningkatkan perannya dalam hal membina dan mengembangkan kepribadian remaja untuk menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara bangsanya. Gerakan Pramuka yang ada di setiap sekolah perlu menjalin kerjasama yang baik dan teratur dengan pengurus OSIS sekolah. Maksudnya kegiatan-kegiatan OSIS dan Gerakan Pramuka di satu sekolah harus saling mengisi dan menunjang. Tentu guru pembina

OSIS dan pembina Gerakan Pramuka perlu mulai menjalin kerjasama ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara OSIS dan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya OSIS biasanya menyelenggarakan "camping" bagi para pelajar dan Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan berkemah. Kedua kegiatan ini sama sehingga dapat disatukan saja, dan dana yang dikeluarkan untuk itu menjadi lebih kecil jumlahnya. Kepala sekolah memegang peran menentukan dalam mewujudkan kerjasama ini.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana menjalin kerjasama antar wadah/organisasi remaja yang terdapat di kelurahan dan desa. Sebagaimana diketahui bahwa ada begitu banyak wadah/organisasi yang menghimpun remaja di tingkat kelurahan dan desa. Dan semua itu hanya terpancang pada papan nama. Hampir tidak ada kegiatan yang dilaksanakan oleh remaja sendiri. Hal ini disebabkan remaja hanya mengetahui nama wadah/organisasi itu dan tidak mengetahui tujuan, maksud, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kehadiran wadah/organisasi itu di wilayah mereka hanya berdasarkan pada instruksi dan surat keputusan dari pihak yang berwenang. Malahan kepengurusan dari organisasi remaja itu langsung dipegang oleh Lurah/Kepala Desa atau staf/pamongnya.

Hal ini merupakan satu hambatan mengapa kehadiran organisasi remaja di tingkat kelurahan/desa tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh remaja itu sendiri. Remaja merasa bahwa mereka hanya menjadi pelengkap peserta dalam organisasi/wadah remaja sendiri dan bukan sebagai pelengkap pelaku. Kenyataan ini perlu diubah. Berikan kepada remaja kesempatan untuk membina dan mengembangkan diri mereka melalui wadah/organisasi remaja yang ada. Dengan cara ini remaja akan merasa memiliki wadah/organisasi yang menghimpun remaja itu seperti Karang Taruna, Pramuka, AMPI dan lainnya. Apabila hal ini terwujud maka peranan Lurah/Kepala Desa bersama staf dan pemuka lainnya hanya sebagai pendamping yang mendorong motivasi remaja untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan program yang ada.

Peran lain yang dapat dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa bersama dengan pemuka masyarakat adalah mengayomi dan mengajak semua remaja itu untuk merumuskan pedoman kerja bersama di wilayahnya. Dengan cara ini semua wadah/organisasi remaja dapat berdialog dan berkomunikasi. Selanjutnya mereka akan bersama-sama juga melaksanakan pedoman kerja bersama itu. Apabila harapan ini dapat terwujud maka remaja-remaja yang belum menghimpun dirinya dalam salah satu wadah/organisasi remaja akan tertarik untuk ikut mengambil bagian di dalamnya. Hal ini terdorong oleh rasa solidaritas yang kuat dalam diri setiap remaja. Hal-hal itu merupakan upaya yang harus dilakukan oleh para Kepala Sekolah dan guru-guru di

sekolah serta Lurah/Kepala Desa bersama stafnya di tempatnya masing-masing. Ini merupakan upaya untuk mendayagunakan wadah/organisasi remaja agar dapat berperan serta dalam menanggulangi masalah-masalah remaja saat ini.

Mengerti dan Memahami Remaja

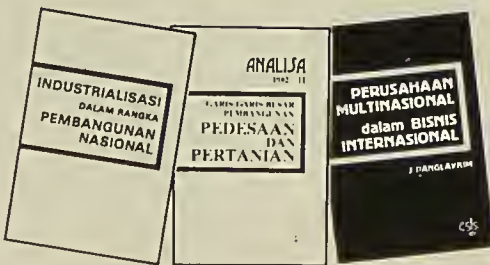
Para guru di sekolah, orang tua di rumah, dan pemuka masyarakat seperti Kepala Kelurahan/Desa bersama stafnya serta pemuka pendapat lainnya perlu berusaha mengerti dan memahami remaja sebagaimana mestinya. Remaja merupakan sekelompok manusia muda usia yang masih berada dalam proses mencari identitas dirinya. Dalam proses ini remaja ingin berusaha sendiri dan tidak mau menerima campur tangan dari pihak luar. Meskipun demikian remaja masih juga membutuhkan kehadiran orang dewasa sebagai pendamping yang mampu memberikan bimbingan dan pengarahan bilamana diperlukan. Dalam suasana kejiwaan seperti ini kita sebagai orang dewasa harus pandai menempatkan diri. Hal ini perlu agar kehadiran kita di dalam lingkungan remaja sesuai dengan kebutuhan remaja sendiri. Dengan cara ini kehadiran kita sebagai orang dewasa dirasakan manfaatnya oleh remaja dan bukan sebagai faktor penghambat kreatifitas remaja untuk menemukan dirinya. Oleh karena itu mungkin sudah saatnya kita menyelenggarakan pendidikan kembali (reedukasi) bagi orang dewasa umumnya dan orang dewasa yang karena fungsinya menjadi pendamping remaja. Pendidikan kembali ini dilaksanakan dengan maksud agar kita dapat mengenal dan memahami remaja dengan semua masalah dan kebutuhannya sebagaimana mestinya.

Dewasa ini terlihat bahwa wadah/organisasi remaja diurus oleh orang-orang dewasa. Dan umumnya para pengurus (orang dewasa) dalam merumuskan rencana dan program kerja organisasi remaja yang dipimpinnya memaksakan pendapat dan pemikirannya sendiri. Mengingat pengetahuan kita tentang remaja bersama masalah dan kebutuhannya terbatas maka pendapat dan pemikiran kita itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh remaja. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat antara pengurus wadah/organisasi remaja yang adalah orang-orang tua dengan para remaja itu sendiri sebagai anggota. Kenyataan ini terlihat di semua wadah/organisasi remaja saat ini. Akibatnya hampir semua wadah/organisasi remaja tidak dapat mendayagunakan dirinya sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam AD/ART organisasinya. Keadaan ini menimbulkan terjadinya krisis kepercayaan para remaja terhadap para pembina/pengurus wadah/organisasinya. Apabila krisis ini berkepanjangan maka hilanglah kewibawaan para pembina/pengurusnya itu.

Sebagai contoh dapat kita sebut perkelahian pelajar antar sekolah di kota-kota saat ini. Dalam kejadian-kejadian itu terlihat bahwa para guru, orang tua, dan pemimpin wadah/organisasi remaja sudah tidak mampu mengatasinya. Akibatnya pihak keamanan (polisi) terpaksa turut berusaha mengatasinya. Melihat kenyataan ini kita akan berpendapat bahwa memang itu tugas polisi untuk menjamin keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Namun demikian dari kenyataan itu kita perlu mengakuinya secara jujur bahwa kewibawaan para guru, orang tua, dan para pembina remaja umumnya telah merosot atau sudah tidak ada lagi. Untuk itu kita perlu mulai lagi dari awal, yaitu mendidik diri lagi agar kita dapat mengerti dan memahami remaja bersama dengan masalah kebutuhannya.

PENUTUP

Mendayagunakan kembali wadah/organisasi remaja agar dapat berperan-serta dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh remaja perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Hal ini dapat dimulai dengan cara memberi peran aktif kepada remaja untuk menanggulangi masalahnya sendiri. Maka itu para guru di sekolah, Lurah/Kepala Desa bersama dengan staf dan pemuka masyarakat lainnya perlu memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengurus dan mendayagunakan wadah/organisasi remaja sendiri. Kita hanya menempatkan diri sebagai pendamping yang mengerti dan memahami suasana hidup remaja. Nasihat dan petunjuk hanya diberikan pada saat yang diperlukan oleh remaja. Dalam peranan ini kita perlu memberikan teladan melalui sikap dan perilaku kita yang patut menjadi contoh.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/buletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35